



UNIVERSITAS INDONESIA

***SAMBANDHA* PADA PRASASTI-PRASASTI
MASA BALITUNG (820-832 ŚAKA)**

SKRIPSI

DEWI PURNAMASARI

0806343544

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ARKEOLOGI

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

***SAMBANDHA* PADA PRASASTI-PRASASTI
MASA BALITUNG (820-832 ŚAKA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora

DEWI PURNAMASARI

0806343544

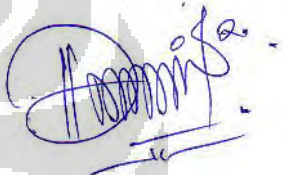
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 09 Juli 2012



Dewi Purnamasari

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dewi Purnamasari
NPM : 0806343544
Tanda Tangan : 
Tanggal : 09 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dewi Purnamasari
NPM : 0806343544
Program Studi : Arkeologi
Judul Skripsi: *Sambandha* pada Prasasti-Prasasti Masa Balitung
(820-832 Ś)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

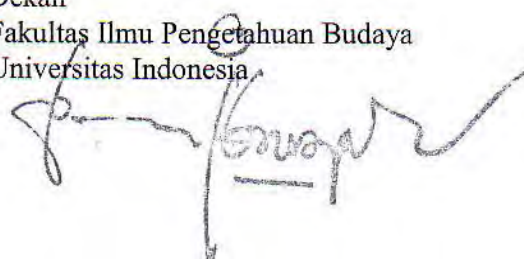
Pembimbing : Andriyati Rahayu, M. Hum ()

Penguji I : Dr. Ninie Susanti Tedjowasono ()

Penguji II : Dr. Wanny Rahardjo Wahyudi ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 09 Juli 2012

Oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 19651023990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Andriyati Rahayu, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan pengertiannya dalam membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir. Beliau telah dengan sabar memberi masukan-masukan saat saya menemukan kebuntuan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
- (2) Dr. Ninie Susanti Tedjowasono dan Dr. Wanny Rahardjo Wahyudi selaku pembaca sekaligus penguji. Terimakasih atas waktu yang telah disediakan untuk membaca dan mengoreksi skripsi ini. Kritikan dan masukan yang diberikan sangat membantu tersusunnya skripsi ini hingga akhir;
- (3) Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik material maupun moral kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Maafkan atas segala kenakalan dan keras kepala saya selama ini. Inilah salah satu hadiah kasih sayang yang bisa saya berikan untuk kalian, dan satu diantara banyak mimpi yang kalian harapkan terjadi pada anak kalian, yaitu mengantarkan kami menjadi sarjana. Budi Irawan selaku kakak yang mengajarkan apa arti ketekunan dan kerja keras. Adon Ramadhan yang selalu mengalirkan angin kebahagiaan dan optimisme, membuat cita-cita dan mimpi yang awalnya dirasa jauh dan berat menjadi ringan dan menyenangkan. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini;
- (4) Semua teman seangkatan yaitu angkatan 2008 yang telah bersama-sama

berjuang dari awal kita menginjakkan kaki di bidang ilmu ini hingga akhirnya bisa menyelesaikan studi bersama-sama. Kartika Anjanie, Lisda Meyanti, Gaya Mentari, Wilda Zakiah, Kartina Risma, Addissya Paramasasti, Farina Amelia, dan Nita Lestari merupakan teman sekaligus sahabat selama saya menempuh studi di Arkeologi UI. Di luar itu, semua teman-teman terhebat saya yang tidak akan mungkin bisa cukup kertas ini untuk menuliskannya. Saya yakin kalian tahu bahwa jiwa dari tulisan ini adalah kalian semua, karena saya tidak akan bisa menyelesaikan tulisan ini tanpa dukungan dari kalian. Terimakasih atas tawa, duka, dan hal-hal gila yang tidak lain saya anggap sebagai dukungan untuk saya;

- (5) Teman-teman di luar bidang Arkeologi baik yang memberikan dukungan langsung maupun melalui jarak jauh, Viviana Lisma Lestari dan semua yang tidak bisa saya tuliskan namanya satu persatu di sini, karena apresiasi saya terhadap kalian sungguh jauh lebih besar dari hanya menuliskan nama kalian dalam karya tulisan ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu arkeologi pada khususnya.

Dewi Purnamasari

2012

HALAMAN PERNYAATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Purnamasari
NPM : 0806343544
Program Studi : Arkeologi
Departemen : Arkeologi
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

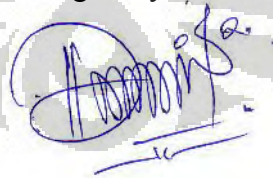
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Sambandha pada Prasasti-Prasasti Masa Balitung (820-832 Ś)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 09 Juli 2012
Yang menyatakan



(Dewi Purnamasari)

ABSTRAK

Nama : Dewi Purnamasari
Program Studi : Arkeologi
Judul : *Sambandha* pada Prasasti-Prasasti Masa Balitung (820-832 Ś)

Sambandha merupakan salah satu unsur dari prasasti *sīma*, yaitu prasasti yang memperingati sebuah tanah dijadikan *sīma*. *Sambandha* merupakan alasan atau sebab dari sebuah peristiwa yang pada akhirnya diabadikan dalam sebuah prasasti. Hal yang unik adalah rupanya *sambandha* tidak hanya ditemukan pada prasasti *sīma*, namun juga pada prasasti *jayapatra* dan prasasti pajak. *Sambandha* dari ketiga jenis prasasti tersebut memiliki perbedaan dalam hal fungsi, ragam, dan cara penganugerahannya. Akan tetapi ketiganya sama-sama berfungsi mengantarkan alasan dibalik peristiwa yang diabadikan dalam prasasti. Dinamika masa pemerintahan Balitung berkembang dalam setiap periode. Berdasarkan *sambandha* dari prasasti-prasastinya, masa pemerintahan Balitung sangat penuh dinamika dan gejolak terutama pada akhir-akhir pemerintahannya.

Kata Kunci : *sambandha*, prasasti *sīma*, prasasti *jayapatra*, prasasti ‘sengketa pajak’, Balitung.
xv+108 halaman : 16 tabel; 2 grafik
Daftar Referensi : 28 (1913-2009)

ABSTRACT

Name : Dewi Purnamasari
Study Program : Archaeology
Title : *Sambandha* pada Prasasti-Prasasti Masa Balitung (820-832 Ś) (The *Sambandha* of the Balitung's Inscriptions (820-832 Ś))

Sambandha is one element of the inscription *sima*, the inscription commemorating a land made *sima*. *Sambandha* is the reason or the cause of an event which in turn perpetuated in an inscription. The unique thing is apparently *sambandha* not only found in the inscriptions *sima*, but also the inscriptions *jayapatra* and inscriptions of taxes. *Sambandha* of the three types of inscriptions may have differences in terms of function, range, and how it is given. However, they have in common is to deliver the reasons behind the events warned in inscriptions. The dynamics of Balitung reign developing in every period. Based *sambandha* from his inscriptions, Balitung reign is full of dynamics and turbulence, especially in the late reign.

Key words : *Sambandha*, *sīma* inscription, *jayapatra*, taxes inscription, Balitung.
xv+108 pages : 16 tables; 2 graphics
References : 28 of references (1913-2009)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLEGIARISME	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Permasalahan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sumber Data Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
2. GAMBARAN UMUM MASA PEMERINTAHAN BALITUNG	13
2.1 Penataan Wilayah dan Birokrasi Kerajaan Mataram Kuna	13
2.2 Sumber-Sumber Tertulis yang Digunakan sebagai Data Penelitian	14
1. Prasasti Ayam Teas I	14
2. Prasasti Taji	16
3. Prasasti Luitan	18
4. Prasasti Kayu Ara Hiwang	20
5. Prasasti Rongkab	21
6. Prasasti Watukura I	22
7. Prasasti Penggumulan I	23
8. Prasasti Ketanen	25
9. Prasasti Rumwiga II	26
10. Prasasti Poh	28
11. Prasasti Kubu-Kubu	30
12. Prasasti Palepangan	32
13. Prasasti Telang	33
14. Prasasti Kandangan	35
15. Prasasti Mantyasih I	36
16. Prasasti Sangsang	38
17. Prasasti Guntur	40
18. Prasasti Bhatari	42
19. Prasasti Rukam	43
20. Prasasti Kinewu	45

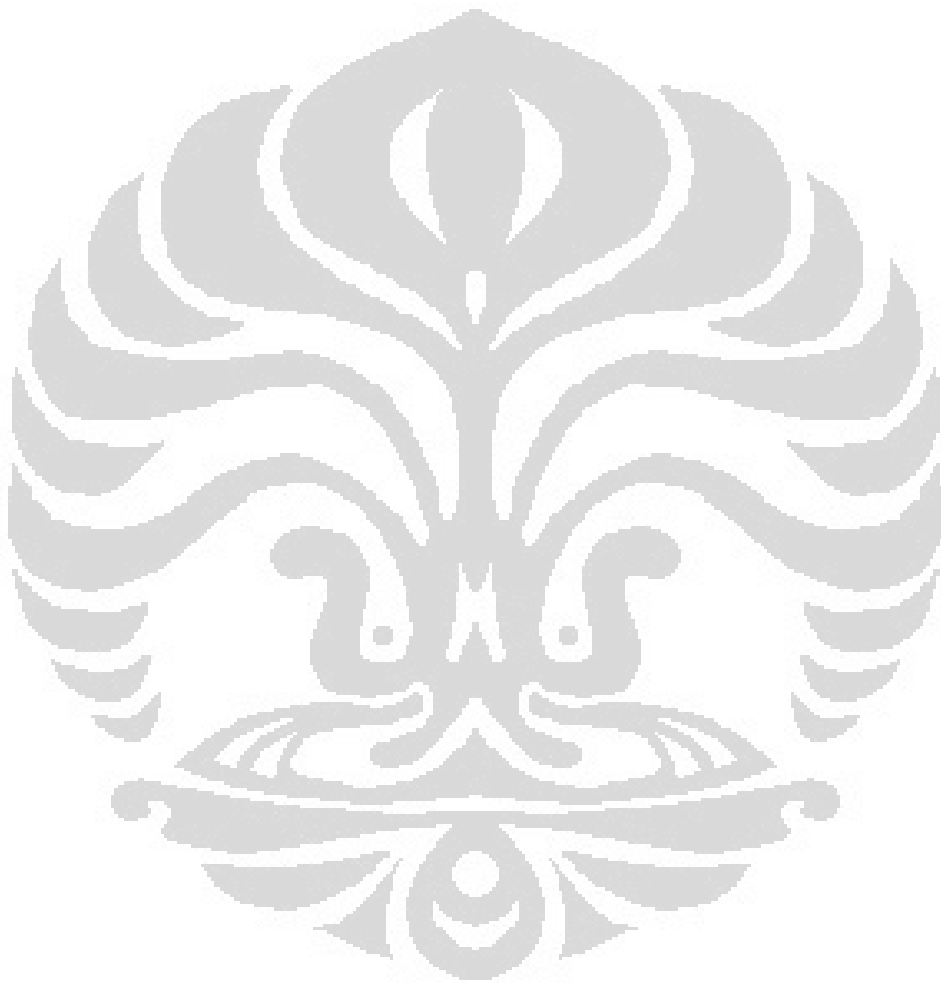
21. Prasasti Wanua Tengah III	47
22. Prasasti Kaladi	49
23. Prasasti Tulangan	51
24. Prasasti Wukajana	52
3. ANALISIS SAMBANDHA	54
3.1 <i>Sambandha</i> dalam Penyebutannya	54
3.2 <i>Sambandha</i> dalam Jenis-Jenis Prasasti	56
3.3 Perbedaan Antarjenis <i>Sambandha</i>	57
3.3.1 Perbedaan dalam Hal Fungsi <i>Sambandha</i>	58
3.3.2 Perbedaan dalam Jumlah Ragam <i>Sambandha</i>	62
3.3.3 Perbedaan dalam Hal Penganugerahan Prasasti	64
3.4 Isi <i>Sambandha</i>	72
3.4.1 Pembuatan Bangunan Suci	72
3.4.2 Pemeliharaan Bangunan Suci	75
3.4.3 Penghormatan terhadap Agamawan	81
3.4.4 Penghargaan terhadap Hal yang Berkaitan dengan Ibadah	83
3.4.5 Pernikahan Raja	83
3.4.6 Perang	84
3.4.7 Silsilah	85
3.4.8 Pembuatan Sarana Penyeberangan	86
3.4.9 Penghidupan Lahan Hancur	87
3.4.10 Keresahan Penduduk	88
3.4.11 Pengalihfungsian Lahan	88
3.4.12 Masalah Seputar Pajak	89
3.4.13 Persidangan	93
3.5 Aspek-Aspek dalam <i>Sambandha</i>	94
4. DINAMIKA SOSIAL-BUDAYA PADA MASA BALITUNG.....	96
4.1 Dinamika Tiap Aspek dalam Tiap Periode	97
4.1.1 Aspek Agama	97
4.1.2 Aspek Ekonomi	98
4.1.3 Aspek Politik	99
4.1.4 Aspek Keamanan	100
4.1.5 Aspek Lingkungan	100
4.1.6 Aspek Hukum	101
4.2 Dinamika Sosial-Budaya Masa Balitung	102
4.2.1 Periode Awal	103
4.2.2 Periode Pertengahan	106
4.2.3 Periode Akhir	108
5. PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan.....	114
DAFTAR REFERENSI	117

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Istilah Yang Digunakan Dalam Penyebutan Bagian Alasan Pada Prasasti.....	55
Tabel 2 Jenis-Jenis Prasasti Yang Memiliki Unsur <i>Sambandha</i>	56
Tabel 3 Formula Prasasti ‘Sengketa Pajak’	59
Tabel 4 Formulasi 3 Jenis Prasasti	61
Tabel 5 Jenis Prasasti Dan Aspeknya.....	62
Tabel 6 Struktur Birokrasi Ketika Perintah Diturunkan	66
Tabel 7 Struktur Birokrasi Ketika Permohonan Diajukan	70
Tabel 8 Bangunan Suci Yang Diberikan Tanah <i>Sīma</i>	76
Tabel 9 Aspek-Aspek Yang Terdapat Dalam <i>Sambandha</i>	95
Tabel 10 Persentase Aspek Agama Dalam Tiap Periode.....	97
Tabel 11 Persentase Aspek Ekonomi Dalam Tiap Periode.....	98
Tabel 12 Persentase Aspek Politik Dalam Tiap Periode.....	99
Tabel 13 Persentase Aspek Keamanan Dalam Tiap Periode	100
Tabel 14 Persentase Aspek Lingkungan Dalam Tiap Periode.....	101
Tabel 15 Persentase Aspek Hukum Dalam Tiap Periode	102
Tabel 16 Prasasti Yang Dikeluarkan Berdasarkan Periode Pemerintahan.....	103

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1: Perbandingan Jumlah Jenis Prasasti Pada Masa Balitung 58
- Grafik 2: Kecenderungan Peristiwa Yang Terjadi Di Tiap Periode 112



DAFTAR SINGKATAN



<i>BEFEO</i>	: <i>Bulletin de l'École Française d'Étrême Orient.</i>
<i>EEI</i>	: <i>Études d'épigraphie Indonésienne.</i>
FIB	: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
FSUI	: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
MISI	: Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia.
PIA	: Pertemuan Ilmiah Arkeologi.
<i>OJO</i>	: <i>Oud-Javaansche Oorkonden.</i>
Ś	: (Tahun) Śaka.
TU	: Tahun Umum/ Tahun Masehi.
<i>TBG</i>	: <i>Tijdschrift voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde.</i> <i>Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap</i> <i>van Kunsten en Wetenschappen.</i>
<i>VBG</i>	: <i>Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap</i> <i>van Kunsten en Wetenschappen.</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Prasasti merupakan sumber sejarah kontemporer warisan masa lalu yang dipahatkan di atas permukaan benda-benda yang keras seperti batu atau logam. Prasasti memiliki derajat kesaksian yang tinggi bila dibandingkan dengan sumber tertulis lain. Seiring berjalannya waktu, prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia semakin banyak jumlahnya. Sebagian besar dari prasasti-prasasti tersebut merupakan prasasti *sīma*, yaitu prasasti yang memperingati penetapan sebidang tanah menjadi daerah perdikan sebagai anugerah raja kepada seseorang yang telah berjasa atau untuk kepentingan suatu bangunan suci, sedangkan prasasti yang paling sedikit ditemui adalah prasasti yang berisi mengenai proses pengadilan atau biasa disebut sebagai *jayapatra*. (Boechari, 1977: 2-5; Bakker, 1972: 5)

Oleh karena jumlahnya yang melimpah dan karakteristik formulanya, telah banyak para ahli yang menyusun unsur-unsur yang terdapat pada isi prasasti *sīma*. Boechari mengurutkannya menjadi beberapa unsur, yaitu unsur penanggalan, nama raja, urutan para pejabat kerajaan penerima perintah, peristiwa pokok penetapan daerah menjadi *sīmayang* di dalamnya mencakup *sambandha* atau alasan mengapa daerah tersebut dijadikan *sīma*, daftar pejabat yang hadir sebagai saksi dan penerima pasek-pasek, dan sumpah (Boechari, 1977: 6-21).

Tidak terlalu berbeda dengan Boechari, Hasan Djafar mengurutkan unsur-unsur prasasti *sīma* diantaranya terdiri dari seruan pembuka, unsur penanggalan, nama raja atau pejabat pemberi perintah, nama pejabat penerima perintah, peristiwa pokok atau isi perintah, *sambandha*, upacara, para saksi, sumpah atau kutukan, dan penutup (Djafar, 1990: 31). Unsur-unsur yang disebutkan oleh Hasan Djafar lebih beragam, hal ini mungkin karena semakin banyak sumber data prasasti yang ditemukan. Dewasa ini bahkan ada yang mengurutkannya hingga lebih dari itu.

Salah satu hal yang menarik dari keseluruhan formula yang terdapat pada prasasti *sīma* adalah pada bagian yang mengantarkan sebab atau alasan suatu

daerah dijadikan daerah perdikan, yaitu *sambandha*. Bagian *sambandha* atau latar belakang penetapan daerah menjadi *sīma* ini menjadi salah satu bagian terpenting dari sebuah prasasti *sīma*. Bisa dikatakan bahwa pada bagian *sambandha*lah inti dari sebuah prasasti *sīma* itu terletak, dan dari penjelasan yang diuraikan dalam *sambandha* tersebut dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa lampau (Djafar, 1990: 31). Hal ini karena penetapan *sīma* merupakan peristiwa penting bagi rakyat karena pada saat itulah mereka mendapatkan anugerah raja, bagi rakyat mendapatkan anugerah raja bagai mendapatkan anugerah dari dewa (Haryono, 1980: 48).

Sambandha dalam tiap prasasti *sīma* tidak selalu sama, tergantung dari kejadian apa yang melatarbelakangi ketetapan raja atas tanah itu (Ekawana, 1983: 22). Hal tersebut karena sebuah desa atau seseorang mendapat anugerah prasasti *sīma* memiliki alasannya tersendiri, dengan kata lain setiap prasasti memiliki isi *sambandha* yang berbeda-beda.

Dari bagian yang memuat *sambandha* inilah dapat diketahui berbagai masalah yang terjadi, mulai dari masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, dan beberapa masalah lain yang dapat ditelaah dari prasasti. Masalah-masalah tersebut bagai disajikan langsung di bagian *sambandha*, karena bagian ini berisi peristiwa yang terjadi pada masa prasasti tersebut dikeluarkan.

Menurut Boechari, prasasti *sīma* merupakan prasasti yang memperingati penetapan sebidang tanah sebagai *sīma*, daerah perdikan, sebagai anugerah raja kepada seseorang pejabat yang telah berjasa kepada kerajaan atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan suatu bangunan suci (Boechari, 1977: 5). Pendapat tersebut memiliki pengertian bahwa prasasti *sīma* diberikan atas dua alasan, pertama adalah untuk kepentingan keagamaan dan kedua karena balas jasa. Dengan kata lain *sambandha* terbagi ke dalam dua golongan tersebut, yaitu kepentingan keagamaan dan balas jasa.

Prasasti *sīma* yang diberikan atas alasan kepentingan keagamaan sejauh ini masih merupakan alasan terbanyak dari semua prasasti *sīma* yang pernah ditemukan. Misalnya adalah prasasti Humanding (797 Ś), prasasti Mamali (800 Ś), dan masih banyak lagi.

Berbeda dengan alasan yang diberikan atas kepentingan keagamaan, pemberian anugerah *sīma* untuk seseorang yang telah berjasa kepada raja dapat amat beragam bentuk peristiwanya. Hal tersebut tergantung dari jasa apa yang telah dilakukan sehingga membuat raja merasa berterimakasih dan menganugerahkan tanah *sīma*. Sebagai contoh adalah prasasti Kudadu yang berasal dari masa pemerintahan Krtarajasa Jayawardhana. Raja menetapkan desa Kudadu sebagai *sīma* kepada pejabat desa Kudadu karena dahulu telah berjasa menyelamatkan Krtarajasa Jayawardhana yang ketika itu belum menjadi raja dan sedang melarikan diri dari serbuan musuh. Penduduk desa Kudadu membantu menyembunyikan serta memberikan makan dan minum. Ketika menjadi raja, Krtarajasa Jayawardhana tidak lupa atas budi baik penduduk desa Kudadu dan kemudian menganugerahkan status *sīma* atas desa Kudadu untuk dinikmati pejabat desa tersebut dan keturunannya hingga akhir zaman. *Sambandha* prasasti ini ditulis dengan panjang lebar hingga lebih dari 2 lempeng (Boechari, 1977: 11).

Meskipun pendapat yang menyatakan bahwa prasasti *sīma* dikeluarkan atas dua alasan di atas benar dan umum terjadi, namun tidak menutup kemungkinan adanya alasan lain dibalik penganugerahan status *sīma* sebuah wilayah atau desa. Hal itu ditunjukkan oleh prasasti Telang I (825 Ś) yang menceritakan bahwa sebuah status *sīma* dikeluarkan atas alasan sosial dan ekonomi. Pada saat itu raja membebaskan beberapa desa dari pungutan biaya karena akan dibangun sarana penyeberangan yang digunakan untuk menyeberangkan penduduk dari satu desa ke desa seberang. Desa-desa tersebut diringankan dari pajak, namun sebagai gantinya harus menyeberangkan orang-orang yang akan lewat.

Berdasarkan contoh-contoh singkat di atas dapat diketahui bahwa jenis dari isi *sambandha* berbeda-beda. Tergantung kepada permasalahan, kepentingan, dan kebijakan raja pada saat itu. Hasan Djafar dalam artikel „Historiografi dalam Prasasti“ membagi *sambandha* ke dalam dua jenis, yaitu yang berisi genealogi dan yang berisi peristiwa kesejarahan (Djafar, 1990: 5-7). Dari sini saja sudah terlihat bahwa *sambandha* mampu menggambarkan keadaan dan dinamika sosial pada masa lalu.

Dalam *sambandha* ada masalah-masalah yang jelas dimaksudkan untuk dituliskan di dalam prasasti maupun yang tidak dimaksudkan untuk dituliskan namun masih tetap tersirat. Masalah-masalah tersebut dapat mengarah ke dalam beberapa aspek yaitu aspek keagamaan, aspek sosial lingkungan, aspek politik, dan aspek keamanan. Setiap aspek tersebut rupanya dapat diurai lagi menjadi bagian yang lebih spesifik. Misalnya aspek agama yang tergambar dalam *sambandha* prasasti *sīma* masa Balitung mencakup beberapa hal, yaitu pendirian bangunan suci (Telang I 825 Ś, Taji 823 Ś, Kandangan 828 Ś), pelestarian atau pemeliharaan bangunan suci (Kambang Arum 824 Ś, Poh 827 Ś), *dharmma* atau kebaktian (Ketanen 826 Ś), dan penghormatan kepada pendeta (Ketanen 826 Ś).

Sebuah *sambandha* rupanya tidak selalu hanya mengandung satu masalah atau aspek saja. Ada beberapa prasasti yang pada bagian *sambandhanya* mengandung beberapa aspek yang dapat menjelaskan masalah-masalah apa yang terjadi pada masa itu. Sebagai contoh pada prasasti Kaladi (831 Ś) yang mengandung 2 aspek yaitu keamanan dan lingkungan, masalah keamanan yang dapat diartikan telah terindikasikan di dalamnya tindakan kekerasan berupa pembegalan pada sebuah daerah. Masalah lingkungan terlihat dari perubahan fungsi lahan yang sering terjadi pembegalan tersebut dari hutan menjadi sawah.

Sambandha yang mengandung lebih dari satu aspek tidak hanya ditemukan dalam prasasti Kaladi. Contoh lain yaitu prasasti Mantyasih I mengandung aspek politik dan keamanan lingkungan yaitu adanya penyebutan tentang pernikahan raja, beberapa patih di Mantyasih telah banyak melakukan *buathaji* atau kerja bakti untuk raja pada saat pernikahan raja, banyak melakukan pemujaan kepada bhatara dan bhatari, serta telah menjaga keamanan di desa Kuning. (Soemadio, *ed.*, 2009: 175).

Cara bagaimana sebuah prasasti dianugerahkan rupanya juga memiliki perbedaan satu sama lain. Ada prasasti yang dianugerahkan langsung oleh seorang raja, namun ada pula yang diberikan oleh seorang penguasa watak atau rakai. Selain karena anugerah yang dihadiahkan langsung oleh raja atau rakai, prasasti juga dapat diajukan permohonannya oleh rakyat. Beberapa prasasti mencatat permohonan rakyat kepada raja dan raja mengabulkan permohonan tersebut dengan menganugerahkan status *sīma* atas mereka. Misalnya Prasasti Kinewu

yang berangka tahun 829 Ś. Pada prasasti Kinewu dijelaskan bagaimana pengajuan permohonan dari rakyat yang kemudian diteruskan oleh pejabat yang lebih tinggi hingga sampai kepada raja (Boechari, 1981: 75).

Selama ini *sambandha* diidentikkan dengan prasasti *sīma* karena *sambandha* memang merupakan salah satu unsurnya. Akan tetapi ternyata ada beberapa prasasti bukan *sīma* yang di dalamnya juga menyebutkan kata-kata *sambandha*. Misalnya prasasti Guntur (829 Ś) yang merupakan prasasti *jayapatra* pada baris ketiga terdapat kalimat dengan kata *sambandha*: ‘..*sambandha nikan guṇadoṣa. hana saṅ dharma nāranya..*’ (Guntur: 3). Prasasti jenis lain sejauh ini belum ada yang menyusun formulanya. Hal tersebut kemungkinan besar karena jumlahnya yang terbatas, tidak sebanyak prasasti *sīma*. Apabila dicari pengertiannya, kata *sambandha* sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti hubungan, pertalian, hubungan kepada, hubungan pribadi, sebab, alasan, peristiwa. Di dalam prasasti *sambandha* mengantar bagian yang mendeskripsikan alasan mengapa surat keputusan tersebut dianugerahkan. (Zoetmulder, 2006: 1000).

Belum banyak sarjana yang menguraikan secara panjang lebar perihal *sambandha*. Di antaranya yang mengkaji berdasarkan *sambandha* adalah I Gusti Putu Ekawana. Ia menerbitkan artikel yang berjudul „Beberapa *Sambandha* pada Prasasti Bali“. Dengan 7 *sambandha* dari 7 prasasti yang berbeda masa, ia menunjukkan bahwa tiap prasasti mempunyai *sambandha* yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan *sambandha* prasasti-prasasti tersebut maka dapat diketahui bahwa latar belakang masalah antara satu prasasti dengan prasasti lain tidak sama. (Ekawana, 1983: 21-34).

„Epigrafi dan Sejarah Indonesia“ karangan Prof. Boechari juga menyinggung sedikit tentang *sambandha*. Dalam artikel tersebut Boechari memaparkan perkembangan ilmu epigrafi di Indonesia dan kemudian kepada bagian-bagian dari prasasti *sīma* yang merupakan prasasti terbanyak di Indonesia. Pada saat membicarakan mengenai *sambandha*, Boechari mengemukakan bahwa ada *sambandha* yang berisi penjelasan atas suatu peristiwa secara panjang lebar, namun ada pula yang hanya samar-samar saja.

Kerajaan Mataram Kuno di bawah pemerintahan Raja Balitung berlangsung dari tahun 820-832 Ś. Masa Balitung berlangsung selama sekitar 12 tahun. Selama 12 tahun pemerintahan tersebut, Raja Balitung mengeluarkan lebih kurang 50 prasasti. Dari 50 prasasti yang dikeluarkan, 26 di antaranya merupakan prasasti *sīma*.

Banyaknya prasasti *sīma* yang dikeluarkan menunjukkan bahwa ada banyak kejadian yang dapat diketahui dari bagian *sambandhanya*. Melalui ke-26 prasasti *sīma* berarti ada 26 *sambandha* yang dapat dikaji. Ke-26 *sambandha* tersebut tentunya berbeda dalam hal isi yang berarti berbeda pula alasan mengapa raja menganugerahkannya. Adanya keberagaman isi *sambandha* dari satu masa, menumbuhkan keingintahuan besar terhadap situasi kehidupan di masa tersebut.

Dari banyaknya prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Balitung seolah menegaskan kepada kita bahwa pada masa itu telah tercipta tradisi untuk menuliskan sesuatu sebagai sebuah peringatan. Selain itu pada masa Balitung sepertinya raja sangat berperan penting karena banyak prasasti yang dikeluarkan oleh raja Balitung, berbeda dengan masa sebelumnya yaitu masa Kayuwangi yang sebagian besar prasastinya dikeluarkan oleh seorang Rakai. Keistimewaan-keistimewaan tersebut membuat masa pemerintahan Balitung tetap menarik untuk dikaji.

Masa Balitung telah cukup banyak dikaji oleh para ahli sebelumnya karena melimpahnya data berupa prasasti yang dikeluarkan Balitung. Berikut ini adalah beberapa sarjana epigrafi yang telah membahas mengenai masalah Balitung dalam bentuk skripsi, diantaranya adalah; Abu Sidik Wibowo (1976) dengan judul „Rakai Watukura Dyah Balitung“, Richadiana Kartakusuma (1972) dengan judul „Prasasti Rukam“, Ninie Soesanti (1975) dengan judul „Struktur Birokrasi pada Zaman Balitung: Data Prasasti“, Titi Surti Nastiti (1976) dengan judul „Prasasti Pangumulan (Suatu Telaah tentang Masalah tanah Abad 9 & 10 Masehi)“, Dyah Wijaya Dewi (1976) dengan judul „Prasasti Luitan“, Sadiono Budi (1980) dengan judul „Prasasti Ayam Teas I Tahun 822 Śaka“, Rita Fitriati (1982) dengan judul „Pasak-Pasak dari Masa Balitung dan Sindok“, dan Mahanizar (1983) dengan judul „Upacara Penetapan *Sīmapada* Masa Rakai kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung“.

Meskipun demikian penelitian-penelitian tersebut tidak mengkajinya secara menyeluruh, hanya pada beberapa tema atau aspek saja. Misalnya Ninie Soesanti yang pernah membahas mengenai masalah birokrasi pada masa pemerintahan Rakai watukura Dyah Balitung. Dalam tulisannya itu ia menggunakan 29 prasasti dari masa balitung sebagai sumber data, yaitu prasasti-prasasti yang hanya mengandung struktur birokrasi. Selain itu Titi Surti Nastiti dalam tulisannya menelaah mengenai hak milik atas tanah dari prasasti Panggumulan A (824 Śaka) dan prasasti Panggumulan B (825 Śaka). Pada prasasti Panggumulan B terdapat suatu proses transaksi tanah khususnya jual gadaai.

Selain hasil penelitian dalam bentuk skripsi, banyak pula artikel-artikel yang terbit berkenaan dengan prasasti Balitung, seperti misalnya Edhie Wurjantoro (1981) dalam artikelnya yang berjudul „Wanua i Tpi Siring: Data Prasasti dari Jaman Balitung“, dan Titi Surti Nastiti dkk. dengan bukunya yang berjudul „Tiga Prasasti dari Masa Balitung“ yang berisi analisis kritis dari 3 prasasti dari masa Balitung. Selain para ahli yang disebutkan sebelumnya, tentunya masih banyak lagi ahli-ahli lain yang mengkaji masa Balitung.

Pembacaan prasasti, mulai dari alih aksara hingga penerjemahan dan kemudian menginterpretasikannya, telah banyak dilakukan oleh para ahli. Ada juga beberapa yang mengkaji hanya berdasarkan satu unsur dari beberapa prasasti *sīma* yang dikaitkan satu sama lain, dan kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan. Struktur birokrasi pernah coba direkonstruksikan dengan menggunakan data prasasti *sīma* yaitu unsur penyebutan pejabat-pejabat pengiring dalam sebuah upacara penetapan *sīma*. Jalannya upacara penetapan *sīma* pun telah dijadikan tulisan. Hingga unsur *sapatha* atau kutukan juga telah dikaji oleh beberapa ahli. Mengingat bahwa unsur *sambandha* merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam sebuah prasasti *sīma*, maka kajian prasasti berdasarkan *sambandha* yang di ambil dari masa pemerintahan yang paling banyak mengeluarkan prasasti *sīma*, dalam hal ini masa Balitung, menarik untuk dilakukan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki 3 permasalahan yang menjadi pokok perhatian, yaitu:

1. Banyaknya aspek yang dapat ditelisik dari *sambandha* dalam sebuah prasasti, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah ragam *sambandha* pada masa Balitung, jenis *sambandha* apakah yang paling banyak dikeluarkan.
2. Bagaimanakah *sambandha* yang terdapat pada prasasti *sīmadan sambandha* yang terdapat pada prasasti bukan *sīma*, apakah keduanya memiliki fungsi yang sama.
3. Bagaimanakah dinamika kehidupan pada masa Balitung dengan mengaitkan antara tiap jenis *sambandha* dengan aspek lain yang tergambar dalam prasasti.

1.3 Tujuan Penelitian

Selain para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa sarjana yang membahas beberapa tema pada masa Balitung, namun bukan melalui bagian *sambandhanya*. Sedangkan untuk dapat mengetahui dinamika kehidupan yang terjadi pada masa Balitung, diperlukan suatu kajian yang menyeluruh terhadap semua aspek dari isi semua prasasti yang mungkin dikaji. Terlebih lagi masih ada beberapa prasasti Balitung yang telah dibaca namun belum diterbitkan, sehingga masih mungkin untuk dilakukan penulisan sejarah Balitung secara menyeluruh. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah dinamika kehidupan pada masa Balitung yang menyeluruh dari berbagai aspek yang bertolak dari sikap dan keputusan raja yang tercermin dari *sambandha-sambandha* pada prasasti yang dikeluarkannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Berusaha menggambarkan keanekaragaman *sambandha* yang paling umum ditemui dengan menggunakan data prasasti-prasasti dari satu masa pemerintahan yaitu raja Balitung.

2. Berusaha menggambarkan dinamika yang terjadi pada masa Balitung. Rekonstruksi sejarah masa Balitung yang dikaitkan dengan *sambandha* dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan, yaitu dengan mengaitkan segala aspek yang muncul dari *sambandha* agar didapat suatu gambaran yang utuh dari masa tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah masa Kerajaan Mataram Kuna dibawah pemerintahan Raja Rakai watukura Dyah Balitung yang berlangsung dari tahun 820-832 Śaka. Masa pemerintahan Balitung dipilih karena ia paling banyak mengeluarkan prasasti selama masa pemerintahannya selain Kayuwangi. Selain itu, masa pemerintahan Balitung dipilih sebagai batasan penelitian ini adalah karena hampir semua dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa Balitung memiliki susunan isi yang lengkap termasuk bagian *sambandha*.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsi analisis. Penelitian ini tidak melakukan pembacaan ulang pada data prasasti. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah tahapan yang biasa dilakukan pada penelitian arkeologi yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi.

1. Pengumpulan Data

Tahapan pertama adalah tahapan observasi yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Pada penelitian ini tidak akan melakukan studi lapangan dan hanya akan melakukan studi literatur. Melakukan pengumpulan literatur-literatur yang terkait dengan topik, yaitu tulisan-tulisan yang banyak membahas mengenai sejarah kuna khususnya masa Balitung, tulisan-tulisan mengenai kajian prasasti dari masa Balitung, dan yang paling utama adalah alih aksara prasasti-prasasti dari masa Balitung yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya melakukan alih bahasa pada bagian *sambandha*-nya dan beberapa poin terkait, misalnya raja/ pejabat yang mengeluarkan prasasti. Data yang dipakai

dalam penelitian ini terbatas hanya pada prasasti yang telah dialihaksarakan sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data, data berupa alih aksara prasasti kemudian dilakukan pengalihbahasaan hanya pada bagian *sambandha* dan beberapa poin terkait, misalnya siapa yang mengeluarkan prasasti, daerah apa yang dianugerahkan prasasti, dan hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan *sambandha*. Alihbahasa dilakukan terhadap prasasti-prasasti yang belum pernah dilakukan alihbahasa sebelumnya, yang sudah pernah dialihbahasakan namun belum diterbitkan atau yang menurut penulis perlu untuk dialihbahasakan ulang. Setelah itu, ketika semua *sambandha* selesai dialihbahasakan, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hal-hal yang terkait dengan *sambandha*. Baik itu diklasifikasikan berdasarkan isinya, hal ini dilakukan untuk melihat jenis *sambandha* apa saja yang muncul pada masa Balitung.

Setelah diperoleh jenis-jenis *sambandha*, tiap jenis dari *sambandha-sambandha* tersebut kemudian dikerucutkan lagi ke dalam aspek yang lebih khusus untuk melihat masalah apa saja yang muncul dalam tiap aspek tersebut. Sejauh ini telah didapat beberapa aspek yang terlihat dari *sambandha* yaitu aspek keagamaan, aspek sosial-lingkungan, aspek politik, dan aspek keamanan. Aspek keagamaan kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa poin khusus yaitu; tentang pendirian bangunan keagamaan, tentang pemeliharaan bangunan keagamaan, tentang dharmma atau kebaktian, dan tentang penghormatan kepada pendeta. Aspek lingkungan yang terdapat 2 masalah yaitu berkaitan dengan bencana alam dan tentang perubahan fungsi lahan. Kemudian aspek politik yang berkaitan dengan pernikahan raja dan keberhasilan dalam sebuah perang atau pertempuran. Sedangkan aspek keamanan bercabang menjadi kegiatan pengantisipasi kejahatan dan pembasmian kejahatan. Setelah tiap aspek diketahui maka kemudian aspek-aspek tersebut dikaitkan satu sama lain dan diurutkan berdasarkan kronologi tahun dikeluarkannya prasasti, pemberi anugerah, dan mungkin juga daerah yang dianugerahi untuk selanjutnya dilakukan interpretasi.

3. Interpretasi

Tahap terakhir adalah melakukan interpretasi atau asumsi dari pola-pola yang muncul pada tahap analisis, kemudian interpretasi atau asumsi yang dikaitkan satu sama lain dengan konteks dan mengungkapkan hubungan antara data prasasti dengan aspek-aspek kehidupan yang tergambar dalam *sambandha-sambandha* tersebut.

1.6 Sumber Data Penelitian

Balitung sampai saat ini diketahui telah mengeluarkan prasasti sebanyak 50 prasasti. Sebanyak 33 prasasti memiliki angka tahun dan 17 prasasti tanpa angka tahun. Khusus untuk prasasti-prasasti yang tanpa angka tahun, biasanya adalah karena tidak terbaca akibat dari keadaan prasasti yang sudah rusak. Akan tetapi di dalam prasasti tersebut disebutkan nama raja yang sedang memerintah atau pejabat yang menjadi penanda masa pemerintahan suatu raja, misalnya Rakryan Mahamantri i Hino pu Daksa yang merupakan rakai hino pada saat pemerintahan Balitung.

Secara khusus fokus penelitian ini adalah ingin mengungkap unsur *sambandha* dalam prasasti Balitung. Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa *sambandha* merupakan salah satu unsur dari formula prasasti *sīmayang* terkadang disebutkan secara jelas maupun secara tersirat. *Sambandha* juga rupanya disebutkan dalam prasasti jenis lain, tidak hanya dalam prasasti *sīma*. Berdasarkan hal tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Semua prasasti *sīmadan* non-*sīma* dari masa Balitung yang menyebutkan kata *sambandha* yang telah dialihaksarakan;
2. Semua prasasti *sīmadan* non-*sīma* dari masa Balitung yang tidak menyebutkan kata *sambandha* secara khusus namun menggambarkan *sambandha* itu sendiri secara tidak langsung;

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sumber data penelitian.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM SITUASI PADA MASA BALITUNG

Bab ini berisi deskripsi singkat mengenai situasi dan keadaan kerajaan Mataram Kuna khususnya Balitung. Kemudian deskripsi, alihaksara dan alihbahasa prasasti-prasasti masa Balitung yang di dalamnya mengandung unsur *sambandha*.

BAB 3 : ANALISIS SAMBANDHA

Bab ini berisi analisis yang dilakukan terhadap data khususnya terhadap *sambandha*. Mulai dari *sambandha* dalam penyebutannya, jenis-jenisnya, perbedaannya, dan isinya kemudian klasifikasinya.

BAB 4 : DINAMIKA SOSIAL-BUDAYA PADA MASA BALITUNG

Pada bab ini kronologi masa pemerintahan raja Balitung disusun berdasarkan tahun dikeluarkannya prasasti dengan mengaitkan aspek-aspek yang terdapat dalam *sambandha*. Masa pemerintahan kemudian dibagi ke dalam tiga periode yaitu periode awal, pertengahan, dan akhir.

BAB 5 : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan terhadap analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN MASA BALITUNG

2.1 Penataan Wilayah dan Birokrasi Kerajaan Mataram Kuna

Berdasarkan prasasti, Kerajaan Mataram Kuna terbagi ke dalam tiga satuan wilayah yaitu wanua, watak, dan pusat kerajaan. Wanua adalah satuan wilayah terkecil yang biasanya dipimpin oleh *rāma*. Satuan wilayah kedua adalah watak yang dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang disebut *rakai*. Beberapa wanua (desa) bersekutu membentuk suatu kelompok yang disebut watak tadi dan bergantung kepada pejabat tinggi yaitu *rakai*. Akan tetapi wanua-wanua tersebut tidak membentuk suatu kesatuan wilayah, lebih tepatnya hanya dalam hal „cakupan wewenang“. (Susanti, 1986: 305)

Dalam kinerja birokrasinya, pejabat-pejabat wanua mengurus hal-hal keseharian penduduk desanya. Watak sebagai wilayah otonom memiliki birokrasi pemerintahannya sendiri yang mengakomodir kebutuhan beberapa wanua bawahannya. Pemerintah pusat yang berada di lingkungan kerajaan terdiri atas raja yang dibantu oleh para pejabat tinggi kerajaan.

Menurut berita Cina, di ibukota kerajaan berdiam raja dan keluarganya yaitu permaisuri dan anak-anaknya yang belum dewasa serta para hamba istana (*hulun haji, watek i jro*). Di luar istana namun masih dalam lingkungan dinding kota, terdapat kediaman putera mahkota (*rake hino*), dan tiga orang saudara mudanya (*rakai halu, rakai sirikan, rakai wka*), dan kediaman pejabat tinggi kerajaan. Merekalah yang merupakan kelompok elit birokrasi tertinggi atau yang disebut sebagai pejabat eselon I. Di dalam lingkungan tembok kota tersebut juga tinggal para pejabat sipil yang lebih rendah, yaitu *mangilala drwya haji* yang jumlahnya sekitar 300 orang, bersama-sama dengan keluarga mereka. Mereka disebut juga sebagai kelompok non elit birokrasi, diantaranya adalah termasuk abdi dalem keraton, pengawal istana, para pandai, dan lain-lain. (Soemadio, ed, 2009: 214)

Sementara itu dalam hal birokrasi, hubungan raja secara langsung dengan kelompok non elit birokrasi sulit terlaksana, sedang dengan kelompok elit birokrasi saja hubungan tersebut hanya terjadi secara formal. Setiap hari raja

mengadakan pertemuan dengan putera mahkota, para pangeran, para pejabat tinggi kerajaan, serta penasehat raja. Dalam pertemuan tersebut perintah raja biasanya diturunkan melalui putera mahkota yang kemudian meneruskannya kepada para pejabat tinggi kerajaan. Lalu kemudian mereka menyampaikan perintah tersebut kepada utusan daerah yang telah datang menghadap, atau pun memerintahkan petugasnya untuk menyampaikan perintah raja itu ke daerah yang bersangkutan. (Soemadio, ed., 2009: 215)

2.2 Sumber-Sumber Tertulis yang Digunakan sebagai Data Penelitian

1. Prasasti Ayam Teas I

Tempat Ditemukan	: Purworejo, Jawa Tengah.
Disimpan	: Museum Nasional, Jakarta Pusat.
No. Inventaris	: E. 69.
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: 1 lempeng.
Ukuran	: 25 cm x 9 cm.
Bagian yang Ditulisi	: Bagian yang ditulisi terletak pada kedua belah sisinya. Sisi depan sejumlah 9 baris sedangkan pada sisi belakang sejumlah 6 baris.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 822 Śaka.
Raja	: Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Dharmodaya Mahāsambhu.
Jenis Prasasti	: <i>Sīma</i> .
Referensi	: Alih aksara oleh Boechari dan A.S Wibowo dalam <i>Prasasti Koleksi Museum Nasional I</i> 1985/1986: 137-139; terjemahan oleh Sadio Budi dalam Skripsi Sarjana tahun 1986 yang berjudul <i>Prasasti Ayam Teas I Tahun 822 Śaka</i> .

Alih aksara prasasti Ayam Teas I:

Sisi depan:

1. *swasti śakawarṣātīta 822 punaḥ posyamāsa tithi aṣṭami śuklapakṣa. ha.*
2. *ka. wṛ. wāra. tatkāla ajña śrī maharāja rake watukura dyaḥ dharmodaya mahāsambhu*
3. *tumurun i rakryānmapatiḥ i hino pu bāhubajra pratipakṣakṣaya rake halu pu*
4. *saṅgrāmanurānddhara. rake sirikan pu samarawikranta. rake wka pu bhāsvara. rake pagar wsi*
5. *pu wīrawikrama rake bawaṅ pu maṅlawan samgat tiruan pu śiwāstra. maṅhuri pu cakra*
6. *wadihati pu ḍapit makudur pu sāmwrada. kumonnakan soāra niḥ wanua sīmai aya*
7. *m tēas hiḅhiṅnana ikaṅaṅ masamwyawahāra hanaṅkāna anuḅ tan knā de saṅ maṅilala nra*
8. *wyahaji tuḅ tuhān iḅ sasambyawahāra iḅ sa sīma.*

Terjemahan prasasti Ayam Teas I:

Sisi depan:

1. // Selamat! tahun Śaka yang telah berlalu 822 tahun bulan Posya tanggal 8 paro terang (pada) hari Haryang (paringkelan)
2. Kaliwuan (pasar) dan hari Kamis menurut perhitungan 7 hari. Ketika perintah Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Dharmodaya Mahāsambhu
3. turun kepada Rakryān Mapatiḥ i Hino (bernama) Pu Bāhubajra Pratipakṣakṣaya, Rake Halu (bernama) Pu
4. Saṅgramadurandhara, Rake Sirikan bernama Pu Samarawikranta, Rake Wka bernama Pu Bhaswara, Rake Pagarwsi bernama
5. Pu Wirawikrama, Rake Bawaṅ bernama Pu Maṅlawan, Samgat Tiruan bernama Pu Śiwāstra, Maṅhuri bernama Pu Cakra
6. Wadihati bernama Pu Ḍapit, Makudur bernama Pu Sāmwrada memerintahkan seluruh desa sīmadi (wilayah) Ayam

7. Těas agar diberi batas-batas semua orang yang berdagang di sana yang tidak dimasuki oleh segala macam mañilala drawya
8. haji (jumlahnya dibatasi) tiga *tuhān* (untuk setiap) usaha dagangnya dalam satu *sīma*.

2. Prasasti Taji

Tempat Ditemukan	: Ponorogo, Jawa Timur.
Disimpan	: Museum Nasional, Jakarta Pusat.
No. Inventaris	: E.12 a-d.
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: Terdiri dari empat lempeng yang merupakan lempeng ke-1, 3, 6, dan 7 dari sebuah prasasti lengkap.
Ukuran	: a. Lempeng pertama berukuran 48 cm x 14,5 cm yang bertuliskan pada satu sisi dengan 10 baris tulisan; b. Lempeng ketiga berukuran 47 cm x 15 cm yang bertuliskan pada satu sisi dengan 12 baris tulisan; c. Lempeng keenam berukuran 48 cm x 15 cm yang bertuliskan pada satu sisi dengan 11 baris tulisan; dan d. Lempeng ketujuh berukuran 49 cm x 14,5 cm yang bertuliskan 12 baris pada sisi depan dan 3 baris pada sisi belakang.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuno.
Tahun Dikeluarkan	: 823 Śaka.
Raja	: Śri Mahārāja rake Watukura Dyah Balitung.
Jenis Prasasti	: <i>Sīma</i> .
Referensi	: Alih aksara oleh Boechari dalam <i>Prasasti Koleksi Museum Nasional I</i> 1985/1986: 42-46; terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara prasasti Taji:

1. *swasti śakawarṣātīta 823 caitra māsa. dwitīya kṛṣṇapakṣa. wurukun. pahīṅ. budha. wāra. ādityastha. anurādha nakṣatra. mitra dewatā. warīyā*
2. *n yoga. taithila kāraṇa. tatkāla rakryān i watu tihan pu saṅgrāma dhurandara manusuk lmaḥ kbuan kbuan i taji watēk dmuṅ. ukurnya lamwēan wai*
3. *tan pañidulnya. ḍpa sihuā 93 kidul pañabaratnya ḍpa sihuā 112 kabarat pañalornya ḍpa sihuā 93 lor pañawetanya ḍpa sihuā 112 anuṅ ma*
4. *ka lmaḥ ikananṅ lmaḥ anak wanua i taji. naran nikananṅ malmaḥ. si tukai rama ni tihan. muaṅ si padas ibu ni sumēg. si mēṅdut ibu ni maṅas. si kiṅdayut rāma ni*
5. *bērētēk. si tawdak rama ni sēmēk. si kuśala rama ni ṅḍanaḥ. si glo rama ni kulit. si bñal rama ni kalihan. ubhaya sanmata patūt ni wuwusnya sakwaihnya.*
6. *salmaḥ praśama umehakan nikananṅ lmaḥ muaṅ ikananṅ rama i taji kabaiḥ. ubhaya niścita kapua maṅayu bhāgyan sinusuk nikananṅ lmaḥ de rakryān. nāhan mataṅya*
7. *n sinusuk de rakryān ginawai kabikuan. naran nikananṅ kabikuan iṅ dewasabhā muaṅ sawaḥ i taji salamwit sīmā nikananṅ kabikuan. ...*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka yang telah beralu 823 (tahun), hari Rabu, paringkelan Wurukung, tanggal 2 paro gelap bulan Caita, Ādityastha, Nakṣatranya Anurādha, Dewatānya Mitra, Yoganya Warīyān
2. Karananya Taithila. Ketika Rakryān di Watutihang bernama Pu Saṅgrāma Dhurandara, membatasi tanah kebun kebun di Desa Taji yang masuk wilayah Dmung. Ukurannya batasnya di Timur
3. sampai ke Selatan 93 *ḍpa sihuā*, di Selatan sampai ke Barat 112 *ḍpa sihuā*, di Barat sampai ke Utara 93 *ḍpa sihuā*, di Utara sampai ke Timur 112 *ḍpa sihuā*. Adapun tanah yang dimaksud (adalah)

4. tanah dari penduduk desa di Taji. Nama dari yang mempunyai tanah (yaitu) Si Tukai bapak dari Tihang dan Si Padas ibu dari Sumĕg, Si Mĕᅇdut ibu dari Maᅇas, Si Kiᅇdayut bapak dari
5. Bĕrĕtĕk, Si Tawdak bapak dari Sĕmĕk, Si Kuśala bapak dari ᅇᅇanaᅇ, Si Glo bapak dari Kulit, Si Bengal bapak dari Kalihan. Semua yang mempunyai tanah ikut memberi persetujuan
6. bersama memberikan tanah itu dan kepada Rama di Taji semua, persetujuan yang sungguh-sungguh untuk kesejahteraan tanah yang dibatasi oleh Rakryān, itulah sebabnya lalu
7. dibatasi oleh Rakryān dijadikan Kabikuan, yaitu kabikuan Dewasabha dan sawah di Taji satu *lamwit* untuk dijadikan *sĕma* Kabikuan. ...

3. Prasasti Luitan

Tempat Ditemukan	: Desa Pesanggrahan, kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 1977.
Disimpan	: Museum Ronggowarsito, Semarang, Jawa Tengah.
No. Inventaris	: Tidak dicantumkan.
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: 1 lempeng.
Ukuran	: 45 cm x 23 cm.
Bagian yang Ditulisi	: Pada satu sisinya dan berjumlah 13 baris.
Aksara dan Bahasa	: JawaKuna.
Tahun Dikeluarkan	: 823 Śaka (901 M).
Raja	: (tidak disebutkan)
Jenis Prasasti	: Prasasti „sengketa pajak“.
Referensi	: Alih aksara dan terjemahan: Titi Surti Nastiti dkk. dalam <i>Tiga Prasasti Dari Masa Balitung</i> (1982: 12, 29, 69).

Alih aksara prasasti Luitan:

I.a

1. *swasti śakawarsātīta 823 caitra māsa tithi daśami kṛṣṇapakṣa. wā. ka. wṛ. wāra. śathabhisa nakṣatra. indra yoga. tatkāla anak wanua i luītan watak kapuṅ manamwah i ra*
2. *kryān mapatiḥ i hino umajarikan parṇaḥ nikananḥ sawaḥ kmitanya tan wnaḥ maṇisī uddhāra. saṅkā ri hōt nikananḥ sinaṅguḥ satampah kinonakanya ukuran de rakryān mapatiḥ*
3. *muaḥ rakryān i pagarwsi. anuḥ kinon maṇukura saṅ wahuta hyaṅ kudur muaḥ rowaḥ rakryān i pagarwsi. suṅguḥ pua ya an mahōt ikana tampahnya tan wnaḥ maṇisī ta ru*
4. *a tñah iḅ satampah muaḥ tan wnaḅnya makaṭik 6 inaṭaan sambaḥ nikananḥ rāma masawaha lamwit 1 tampah 7 muaḥ makaṭika 4 apan samaṅkana kirakiranyan sampun i*

Terjemahan:

I.a

1. Selamat! Telah lewat tahun Śaka 823 tahun, bulan Caitra tanggal 10 paro terang, pada hari Was (pariṅkelan), Kaliwuan (pasar), dan Hari Kamis (perhitungan 7 hari), bintang: Sathabisa, yoga: Indra. Pada waktu itu penduduk Desa Luītan yang termasuk wilayah Kapuṅ
2. berdatang sembah kepada Rakryān Mapatih i Hino, mengadukan bahwa sawah yang dikerjakannya tidak sanggup memenuhi bagian (yang diwajibkan), karena sempitnya yang dianggap satu *tampah*. (Maka) diperintahkan supaya diukur kembali oleh Rakryān Ma-
3. patih i Hino dan Rakryān i Pagarwsi. Yang diberi tugas mengukur (kembali) adalah *saṅ wahuta hyaṅ kudur* dan pembantu dari Rakryān Pagarwsi. Sesungguhnya bahwa sempit *tampahnya* tidak dapat memenuhi satu setengah
4. setiap satu *tampahnya*, dan tidak sanggup mempunyai enam budak. Maka dikabulkan permohonan dari kepala desa itu untuk mengerjakan sawah

(seluas) 1 lamwit 7 *tampah*, dan dapat mempunyai empat budak. Karena memang demikianlah perkiraannya setelah diukur kembali.

4. Prasasti Kayu Ara Hiwang

Tempat Ditemukan	: Desa Boro Tengah, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Disimpan	: Museum Nasional, Jakarta Pusat.
No. Inventaris	: D. 78.
Bahan	: Batu.
Jumlah	: 1 buah.
Bagian yang Ditulisi	: Ditulis secara berkeliling dari depan (21 baris), ke samping kanan (20 baris), lalu ke belakang (21 baris), kemudian ke samping kiri (22 baris).
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 823 Śaka.
Raja	: (tidak disebutkan)
Jenis Prasasti	: <i>Sīma</i>
Referensi	: Alih aksara dalam <i>OJO XXII: 27-28</i> ; terjemahan oleh penulis.

Alih aksara prasasti Kayu Ara Hiwang:

1. *swasti śakawarṣātita. 823. asuji māsa mañcami kṛṣṇapakṣa. wurukun pahin soma wāra a stha mṛgasira nakṣatra śiwa yoga tatkāla rake*
2. *wanua poḥ dyah śala wka saṅ ratu bajra anak wanua i pariwutan sumusuk ikanan wanua i kayu ara hiwan watak watu tihan ṣaguha [.....] kaṭika*
3. *kataganya [.....] gagānya ityewammādi sapinasuknikanan wanua i kayu ara hiwan sinusuk rake wanua poḥ.sīmani parhyaṅan*
4. *tan muan gumawaya ikanan nat i pariwutan Śakahalānya pahayūn. tan deyan [.....] hadyan*
5. *naṅ anakwanua i kayu ara hiwan matanyan sinīma de rake banua poḥ dyah sala. ...*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 823 (tahun), hari Senin Pahṇ, tanggal 5 paro gelap bulan Asuji, agneyastha, naksatranya margasira, yoganya śiwa ketika Rake
2. Wanua Poh (bernama) Dyah Śala, putra dari [wka] Sang Ratu Bajra penduduk desa di Pariwutan, membatasi desa di Kayu Ara Hiwang yang masuk wilayah Watutihang
3. itu semuanya yang termasuk desa di Kayu Ara Hiwang, dibatasi oleh Rake Wanua Poh, sebagai *sīmadari* Parhyangan
4. dan tidak menyebabkan dunia/alam di Pariwutan dari buruknya keinginan, tidak menghasilkan Hadyan
5. *nay* penduduk desa di Kayu Ara Hiwang, itulah sebabnya dijadikan *sīma* oleh Rake Wanua Poh Dyah Śala. ...

5. Prasasti Rongkab

- Tempat Ditemukan : Desa Kalipucanggading, Pati, Demak.
 Disimpan : Museum Nasional, Jakarta Pusat.
 No. Inventaris : E. 83.
 Bahan : Tembaga.
 Jumlah : 1 lempeng.
 Ukuran : 35,5 x 14,7 cm.
 Bagian yang Ditulisi : Sisi depan ditulis dengan 10 baris tulisan dan sisi belakang ditulis dengan 13 baris tulisan.
 Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
 Tahun Dikeluarkan : 823 Śaka.
 Raja : (tidak disebutkan)
 Jenis Prasasti : *Sīma*
 Referensi : Alih aksara oleh Boechari dalam *Prasasti Koleksi Museum Nasional I* 1985/1986: 171-172; terjemahan oleh Jones, 1984: 163-164.

Alih Aksara prasasti Rongkab:

I.a.

1. //o// swasti śakawarṣatita 823 kartika masa. tithi daśami suklapakṣa. wā.
wa a wara śatabhiśa nakṣatra bāru
2. na dewatā hasa yūga. tatkāla nikanan rāma i roṅkab winaiḥ mamuputta
kaṭik pra
3. ṇa 1 de san pamaggaṭ umanggit pu parwwatta. saṅkā ri nāśa ni wanwanya
maṅśa

Terjemahan:

1. // Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 823 (tahun), tanggal 10 bulan Karttika paro terang, hari Minggu Wagai, paringkelan was, naksatranya satabhisa
2. Dewanya Baruna, yoganya Hasa, ketika Kepala Desa di rongkab diijnkan mempunyai hamba
3. jumlahnya 1 orang oleh sang Pamegat Umanggit bernama Pu Parwatta, karena kehancuran desanya ...

6. Prasasti Watukura I

- Tempat Ditemukan : „Tidak diketahui“.
- Disimpan : The Royal Library, Copenhagen, Denmark.
- No. Inventaris : -
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 5 lempeng.
- Ukuran : 9,3 x 31,1 cm.
- Bagian yang Ditulisi : Ditulis pada kedua sisinya dengan lima baris tulisan kecuali lempeng terakhir, bertulisan hanya pada satu sisi dengan dua baris tulisan.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
- Tahun Dikeluarkan : 824 Śaka (27 Juli 902 M).

- Raja : Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituṅ Śrī
Iśwarakesawotsawatuṅga.
- Jenis Prasasti : *Sīma*.
- Referensi : Alih aksara oleh van Naerssen; Edhie Wurjantoro
dalam „bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara prasasti Watukura I:

1. *swasti śaka warṣātīta. 824. śrawaṇa māsa. tithi. pañcadaśi śuklapakṣa. pā. pa. aṅ. wāra*
2. *maḍaṅkuṅan. sapta kārana wiṣṭi. pūrwwasādhā nakṣatra. śiwa yoga. tatkāla mahārāja rake watukura*
3. *dyah balituṅ. śrī iśwarakesawotsawatuṅga. maweḥ pañīma. mā. kā 1. i rāmanta i watukura. parṇṇaḥ*
4. *dharma pañasthūlan ri sira. aṅkēn pūrṇṇama niṅ bhadravāda. kabhaktiyana de rāmanta i watukura.*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka 824 yang telah berlalu, hari Selasa Pahing paringkelan Paniruan tanggal 15 paro terang bulan Śrawaṇa
2. Wuku Maḍaṅkuṅan, Saptakārana Wiṣṭi, Nakṣatranya Pūrwwasādhā, Yoganya Śiwa. Ketika Mahārāja Rake Watukura
3. Dyah Balituṅ Śrī Iśwarakesawotsawatuṅga memberikan uang untuk melaksanakan upacara *sīmasebesar 1 kāti* uang emas kepada Rāmanta di Watukura, diperuntukkan bagi
4. Dharmma Pangasthūlan kepadanya, setiap bulan purnama di bulan Bhadravāda, kebaktiannya oleh Rāmanta di Watukura.

7. Prasasti Panggumulan I

- Tempat Ditemukan : Desa Kembang Arum, Kecamatan Klegung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- Disimpan : Museum Sono Budoyo, Yogyakarta.

- No. Inventaris : -
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 3 lempeng.
- Ukuran : a. Lempeng pertama berukuran 44,3 cm x 18 cm,;
b. Lempeng kedua berukuran 44 cm x 18,5 cm; dan
c. Lempeng ketiga berukuran 44, 5 cm x 18,5 cm.
- Bagian yang Ditulisi : Lempeng pertama bertuliskan 16 baris tulisan pada satu sisi;
Lempeng kedua bertuliskan 18 baris tulisan pada satu sisi; dan
lempeng ketiga bertuliskan pada kedua sisinya, sisi depan berjumlah 20 baris dan sisi belakang berjumlah 13 baris.
Prasasti Panggumulan I berakhir pada lempeng ke-3 baris ke-8.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
- Tahun Dikeluarkan : 824 Śaka.
- Raja : (tidak disebutkan)
- Jenis Prasasti : *Sīma*.
- Referensi : Alih aksara dan terjemahan: Titi Surti Nastiti dkk, *Tiga Prasasti dari Masa Balitung*, 1982:13-22, 30-35;

Alih aksara Prasasti Panggumulan I:

1. *swasti śakawarśātīta 824 poṣa masa tithi daśami kṛṣṇapakṣa. tuṅlai. kaliwuan. soma wāra. dakṣinastha. jaiṣṭha nakṣatra. mitra dewatā. sukarmmā yoga.. tatkāla rakryān*
2. *i wantil pu pālaka anakwanua i wuatan sugiḥ watak wulakan. muaṅ ṅanakwi nira dyaḥ prasāda. muaṅ anak sira katiga pu palaku. pu gowinda. pu wani tamuy manusuk śīma wanua i pa*
3. *ṅgumulan watak puluwatu hop ... kabikuanya gawai mā 4 sawaḥ kanayakān tampaḥ 7 katik 1 patilek niṅ alas pirak mā 1 paknānyan sinusuk punyā nira śīmā*
4. *bhaṭāra muaṅ bhaṭārī i kinawuhan. ...*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka telah berlangsung 824 tahun, bulan Poṣa, tanggal 10 paro gelap, pada hari tunlai (paringkelan), kaliwuan (pasar) dan hari Senin (menurut siklus 7 hari), kedudukan planet di Selatan, bintang Jaiṣṭa, (di bawah naungan): dewa Mitra, yoga: sukarmā. Pada waktu itu Rakryān
2. i Wantil pu Pālaka, penduduk desa Wuatan Sugiḥ yang termasuk wilayah Puluwatu, dengan istrinya Dyaḥ Prasāda, serta ketiga anaknya: pu Palaku, pu Gowinda, pu Waṇi Tamuy, membatasi *sīma* desa Pañ-
3. gumulan yang termasuk wilayah Puluwatu termasuk kabikuannya, yang mempunyai kewajiban kerja bakti 4 masā, sawah para nāyaka (seluas) 7 tampaḥ. 1 katik dan patilek dari hutan 1 māsā perak. Tujuannya membatasi *sīma* yaitu sebagai jasa mereka (bagi)
4. bhaṭāra dan bhaṭārī di Kinawuhan.

8. Prasasti Ketanen

Tempat Ditemukan	: Desa Ketanen, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Disimpan	: Balai Penyelamatan BP3 Jawa Timur, Trowulan.
No. Inventaris	: 63.
Bahan	: Batu berbentuk arca Ganesha.
Jumlah	: 1 buah.
Bagian yang Ditulisi	: Pada bagian belakang arca Ganesha.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 826 Śaka.
Raja	: (tidak disebutkan)
Jenis Prasasti	: <i>sīma</i> .
Referensi	: Alih aksara oleh Damais dalam EEI IV: 242; Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara prasasti Ketanen:

1. *swastī śakawarsātita 826 asuji māsa i rakryan*
2. *lañja ri inanahan wadwa rakryān pañamwah sawaha simājaran*
3. *diwadda sīmajñaya ikānañ kabikuan i simājaran*
4. *māryya ya umasö sañ hyañ dawuñhan i pamwatan parnahan tu*
5. *sīma irikanañ dharmma haji katañgaran muañ wyakāraña*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 826 (tahun) bulan Asuji kepada Rakryān
2. Lañja Wadwa Rakryān memperluas sawah *sīma* untuk Kabikuan di *sīma* untuk para ajar (pendeta)
3. ketika perintah untuk menjadikan *sīma* untuk Kabikuan di *sīma* untuk para ajar (*sīmajjaran*)
4. diperuntukkan bagi sang Hyang Dawuhan di pamwatan berkaitan dengan
5. *sīma* dari Dharmma Haji di Katangaran dan

9. Prasasti Rumwiga II

Tempat Ditemukan : Prasasti Rumwiga II ditemukan pada tahun 1981 bersama-sama dengan prasasti Rumwiga I oleh Bapak Ngadiman, di Desa Gedongan, Dukuh Payak, Kelurahan Srimulyo, kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Disimpan : Balai Penyelamatan dan Pelestarian Purbakala Yogyakarta, Bogem.

No. Inventaris : BG. 638 untuk lempeng pertama dan BG. 639 untuk lempeng kedua.

Bahan : Tembaga.

Jumlah : 2 lempeng.

Ukuran : Lempeng pertama berukuran 38,4 cm 16,9 cm dan lempeng kedua berukuran 39 cm x 21,5 cm.

Bagian yang Ditulisi : Masing-masing hanya bertulisan pada satu sisi, lempeng

pertama berjumlah 11 baris tulisan dan lempeng kedua berjumlah 14 baris.

- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
 Tahun Dikeluarkan : 827 Śaka (905 M)
 Raja : Śrī Mahārāja Dyah Balitung Śrī Dharmmodayamahāsambhu.
 Jenis Prasasti : „sengketa pajak“.
 Referensi : Alih aksara oleh Machi Suhadi Prasasti Rumwiga, dalam *Berkala Arkeologi* No. 1 Th. IV (hlm. 39-47). Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta; terjemahan oleh Kanya Suhita dalam Skripsi Sarjana „*Kajian Mengenai Masalah Perpajakan pada Abad ke-9 M: Studi Kasus Prasasti Rumwiga*“, 2010.

Alih Aksara prasasti Rumwiga II:

I.a.

1. // *swasti śakawarṣāṭīta 827 śrawaṇa māsa tithi pratipāda śuklapakṣa pa u śu wāra aśleṣa nakṣatra wariyān yoga ta*
2. *tkāla nikanan rāma ni rumwiga watak rumwiga mapuluṅ tandas muan pinakānak kabaiḥ manamwah i samgat mo*
3. *maḥ umah mamrati pu uttara muan rakryān wuṅkal tihan pu wirawikrama rakryān ri hino mahāmantrī śrī dakṣottama bāhuba*
4. *jrapratipakṣakṣaya maminta inanugrahān mapasaṅ gunuṅan pirak kā 4 muan pilih masnya sāmas ri saṅ tahil satahun ku*
- ...
9. ... *maṅkana parṇaḥha nikanan wanwa i rumwiga sinamwahakanya i rakryā*
10. *n mahāmantrī jari samwah nikanan rāma sinanmata saṅkā ri parikṣṇanya*
- ...

Terjemahan:

1. // Selamat! tahun Śaka yang telah berlalu 827, pada bulan Śrawaṇa tanggal 1 paroterang, paniruan, umanis, Sukra, kedudukan bintang bintangnya Aśleṣa, Yoganya Wariyān.
2. Itulah saatnya ketika tetua desa dari Wilayah Rumwiga bermusyawarah dengan mereka yang dianggap sebagai anak semua, kemudian menghadap kepada Samgat Mo-
3. maḥ Umah, Mamrati bernama Pu Uttara dan Rakryān Wuṅkal Tihaj Pu Wirawikrama, Rakryān ri Hino Mahāmantrī Śrī Dakṣottama Bāhuba-
4. jra Pratipakṣaksaya, memohon agar diberi anugerah mapasang gununga dengan biaya sebanyak perak 4 kati, serta pilih masnya samas (400) kepada Sang Tahil setiap tahun
- ...
9. .. Demikianlah seharusnya (pengaturan pajak) bagi penduduk Rumwiga yang dimohonkan kepada Rakryan
10. Mahāmantrī. Tentang permohonan majelis telah disetujui karena kemundurannya lalu diteguhkan anugerah Rakryan Mahamantri

10. Prasasti Poh

Tempat Ditemukan : Dukuh Plembon, Kelurahan Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Gondangwinangun, Klaten, Jawa Tengah.

Disimpan : -

No. Inventaris : -

Bahan : Tembaga.

Jumlah : 3 lempeng.

Ukuran : 20,5 x 50 cm.

Bagian yang Ditulisi : a. Lempeng pertama bertuliskan pada satu sisi dengan 19 baris tulisan,
b. lempeng kedua bertuliskan pada kedua sisinya dengan 19 baris tulisan,

c. dan lempeng ketiga bertuliskan pada satu sisi dengan 18 baris tulisan.

- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
 Tahun Dikeluarkan : 827 Śaka.
 Raja : Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyaḥ Balituḥ Śrī Dharmmodayamahāsambhu.
 Jenis Prasasti : *Sīma*.
 Referensi : Alih aksara oleh Damais dalam EEI IV: 42-45; terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara Prasasti Poh:

1. *swasti śakawarsātīta 827 śrawana māsa tithi trayodaśi śuklapakśa. paniruan. pon. budha wāra. aiśānya sthāna. pūrwwāsāda nakśatra aświdewatā. wiskambha yoga. tatkāla ājñā śrī mahā*
2. *rāja rakai watukura dyaḥ balituḥ śrī dharmmodayamahāsambhu. misor i rakryān mapatiḥ i hino. muaḥ i rakai wwatan. kumonnakan ikananḥ wanua i poh muaḥ nanaknya wanua ri rumasan. riḥ nyū. kapwa watak*
3. *kiniwanḥ. śuśukan. paṅguhanya mamulus mas su 4 tanpa wadwāyun. gawai ni wanwanya sāmas. paknānyan sinuśuk muaḥ kalaḥnya sīmā saḥ hyanḥ caitya mahaywa siluḥluḥ saḥ dewata saḥ lumāḥ pastika. ...*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 827 (tahun), hari Rabu Pon tanggal 13 paro terang bulan Śrawana, sthānanya Aiśānya, nakśatranya Pūrwwāsāda, dewatānya Aświ, yoganya Wiskambha ketika perintah Śrī Mahā
2. rāja Rakai Watukura Dyaḥ Balituḥ Śrī Dharmmodayamahāsambhu turun kepada Rakryān Mapatiḥ i Hino dan kepada Rakai Wwatan, memerintahkan kepada desa di Poh dan dusunnya (anak wanua) di Rumasan, di Nyū, semuanya termasuk wilayah

3. Kiniwang, untuk dibatasi dengan penghasilannya semua sebanyak 4 *suwarna* uang emas tidak dengan Wadwāyun, tugasnya menjaga ketentrangan tugasnya jika dibatasi dengan pejabat Kalangnya untuk dijadikan *sīmabagi* Sang Hyang Caitya untuk kesejahteraan Silunglung dari orang yang diperdewakan didharmakan di Pastika.

11. Prasasti Kubu-Kubu

- Tempat Ditemukan : Tidak diketahui, namun sebelumnya merupakan milik seseorang di Malang.
- Disimpan : Museum Nasional, Jakarta Pusat.
- No. Inventaris : E. 75.
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : Terdiri atas enam lempeng tembaga yang merupakan lempeng ke 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari sebuah prasasti.
- Ukuran : Masing-masing lempeng berukuran 35,5 cm x 6 cm.
- Bagian yang Ditulisi : a. Lempeng pertama ditulis 5 baris tulisan pada satu sisi;
 b. Lempeng ketiga dan keempat ditulis dengan 5 baris tulisan pada kedua belah sisinya;
 c. Lempeng kelima dan keenam ditulis dengan 4 baris tulisan pada kedua belah sisinya;
 d. Lempeng ketujuh ditulis dengan 4 baris tulisan pada satu sisi.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
- Tahun Dikeluarkan : 827 Śaka.
- Raja : Śrī Mahārāja Rakryan Watukura Dyah Balituṅ.
- Jenis Prasasti : *sīma*.
- Referensi : Terjemahan oleh Boechari dan A. S. Wibowo dalam *Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I*, 1985/1986:155-158.

Alih aksara prasasti Kubu-Kubu:

I.a

1. *swasti śakawarṣātīta 827 kartika māsa tithi pratipāda kṛṣṇapakṣa. ma. ka. wṛ. wāra. wariga. tākala daputa mañjala. mwaṅ saṅ maṅha*
2. *mbin saṅ diha. saṅ dhipa. dapu hyaṅ rupin. sumusuk iki tgal i kubu kubu bhadrī sīmai rakryān hujunṅ dyaḥ maṅarak. mwaṅ rakryān matu*
3. *ha rēkai majawuntan ...*

IV.a

4. *... ge ā nyāmbak rakryān hujunṅ mwaṅ rēka maja*
5. *wuntin. an dinulu sira maṅndona mare bantan. de saṅ mapatih. alah pwa ikaṅ bantan de nira. nāhan mataṅ nyār arpanadahakēnya*

IV.b

1. *anugraha i śrī mahārāja. ...*

Terjemahan:

I.a

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 827 (tahun), hari Kamis Kliwon paringkelan *Mawulu*, wuku Wariga tanggal satu paro gelap bulan *Kārttika*, ketika *Ḍapunta Mañjāla* dan sang *Mangha-*
2. mbin Sang *Diha*, sang *Dhipa* dan *Ḍapu Hyang Rupin* membatasi tegalan yang ada di Kubukubu sebagai *sīma* bagi *Rakryān Hujung Dyaḥ Mangarak* dan *Rakryān Matu-*
3. *ha Rakai Majawuntan ...*

IV.a

4. ... senanglah hati *Rakryān Hujung* dan *Rakai Maja*
5. wuntin melihat penyerangan ke *Bantan* oleh Sang *Mapatih*. Kalahlah daerah *Bantan* itu olehnya. Itulah sebabnya kemudian diturunkannya

IV.b

1. anugerah oleh Śrī Mahārāja. ...

12. Prasasti Palepangan

Tempat Ditemukan	: Berasal dari daerah Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Disimpan	: Museum Nasional.
No. Inventaris	: E. 66.
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: 1 lempeng.
Ukuran	: 36,5 cm x 17,3 cm.
Bagian yang Ditulisi	: Bertulisan pada satu sisi berjumlah 15 baris.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 828 Śaka.
Raja	: (tidak disebutkan)
Jenis Prasasti	: „Sengketa pajak“.
Referensi	: Alih aksara dan terjemahan oleh Riboet Darmosoetopo (1997: 389-393).

Alih aksara prasasti Palepangan:

1. //o// swasti śakawarṣātīta 828 punaḥ śrawaṇa māsa. tithi aṣṭami kṛṣṇapakṣa. ha. wa. śu. wāra. irikā diwasa rāmanta i palēpaṇan makabehan. i
2. nan[u]grahan wineḥ makmitana prasasti de rakryān mapatiḥ i hino pu dakṣottama bāhubajrapratipakṣakṣaya. samwandhanya saṅkā i tan patūt nikanan
3. rāma lawan saṅ nayaka bhagawanta jyotisa ikanan sawahnya sinaṅguh lamwit 2 kinon ta ya modharā. pirak dhā 6 i satampaḥ satampaḥ. kunan saṅkā ri

4. *hötnya tan wnañ modhāra samañkana ya ta matañyan panamwah rāmanṭa i rakryān mapatiḥ kinonakan sawahnya ukuran iḥ tampaḥ haji. sinañguḥ*

Terjemahan:

1. // o // Selamat tahun Śaka 828, bulan ... tanggal 8 paroterang, paringkelan Haryang, pasaran Wage, hari Jumat. Pada saat itu para *rāma* di Palēpañan
2. mendapat anugerah penetapan dengan prasasti dari Rakryān Mapatiḥ i Hino Pu Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣaksaya. Adapun sebabnya karena para *rāma* tidak setuju
3. terhadap sang Nayaka Bhagawanta Jyotisa bahwa sawahnya dihitung 2 lamwit luasnya dan dikenai pajak 6 dhārana uang perak setiap tampaḥ. Karena sempitnya maka para *rāma*
4. tidak sanggup membayar pajak. Para *rāma* menghadap kepada Rakryān Mapatiḥ, dan diperintah agar sawahnya diukur dengan tampaḥ haji

13. Prasasti Telang I

- Tempat Ditemukan : Desa Teleng, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- Disimpan : Saat ini menjadi koleksi Perpustakaan Mangkunegaran, Surakarta.
- No. Inventaris : -
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 1 lempeng.
- Ukuran : 44 x 18 cm.
- Bagian yang Ditulisi : Dituliskan pada kedua sisinya, dengan 13 baris tulisan.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuno.
- Tahun Dikeluarkan : 825 Śaka.
- Raja : Śri Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituy Śri Dharmmodaya Mahāsambhu.
- Jenis Prasasti : *sīma*.
- Referensi : Alih aksara oleh Damais dalam EEI IV: 42; terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan

epigrafi”.

Alih aksara prasasti Telang I:

1. (poṣa) māsa tithi ṣaṣṭi kṛṣṇa wu ka bu wāra hastā nakṣatra brahma yoga. tatkāla ni ājña śrī mahārāja rake watukura dyaḥ balituḥ śrī dharmmodaya mahāsambhu
2. śrī dakṣottama bāhubajrapratipakṣakṣaya. kumon rake wlar pu sudarśana sumiddhākna sot haji dewata lumāḥ iḥ śataśrṅga. magawaya kamalir mu ...
3. ... aḥ iḥ paparahuan ri huwus nikana[ḥ] gawai rakai wlar kamalir 1 kamulān 3 paṅliwattanya 1 tkan pasak 1 parahu 2 giliranya 2 tinañān nikananḥ rāma iḥ
4. jar ya tan wuara saṅgahan. inujaran saṅ huwusan pu waluh anakwanua i manḥahi. de rakryān mapatiḥ kinon umaparṅṅnākna ikananḥ wanua i tlanḥ muaḥ iḥ mahe
5. wusan makakmitan ikananḥ kamulān muaḥ parahu. umantassakna saṅ mahawān pratidina paṅguhanya mas mā 7 pasaṅ niḥ kalaḥ mā 2 piṅḍa mā 9 iḥ satahun. paknānya
6. muaḥ parāna i maṅkmit kamulān. buatthajya nikananḥ rāma umahāyua asīmananā rikananḥ dharma. ...

Terjemahan:

1. [...] tanggal 6 paro gelap bulan (Poṣa), hari Rabu Kliwon, paringkelan Wurukung, naksatranya Hasta, yoganya Brahma, ketika perintah Śri Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Balituḥ Śri Dharmmodaya Mahāsambhu
2. Śri Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣakṣaya, memerintahkan Rake Wlar Pu Sudarsana untuk melaksanakan nazar Raja yang diperdewakan di Śataśrṅga. Membuat bangunan keagamaan dan
3. ... di Paparahuan sesudah itu Rake Wlar membuat sebuah bangunan keagamaan (kamulan), 3 buah bangunan suci untuk nenek moyang, 1 buah alat menanak nasi, sebuah tempat menambatkan perahu, 2 buah perahu, 2 buah perahu cadangan, ditanyailah kepala desa di ...

4. ...*jar* tidak ada yang keberatan, diberi tahu Sang Huwusan bernama Pu Waluh penduduk desa di Manngahi. Oleh Rakryan Mapatoh disuruh memberi hadiah kepada desa di Tlang dan di Mahe ...
5. ...*wusan* memelihara bangunan suci dan Parahu, untuk menyeberangkan orang yang lewat setiap hari penghasilan pajaknya 7 *māsa* uang emas, Kalang yang ikut bergabung (sebanyak) 2 *māsa*, jumlahnya semua 9 *māsa* satu tahun. Digunakan untuk ...
6. ... dan diberikan kepada yang memelihara Kamulan, kerja bakti dari rama untuk kesejahteraan bagi keperluan *sīmadari* Dharmma.

14. Prasasti Kandangan

Tempat Ditemukan	: Gunung Kidul, Yogyakarta.
Disimpan	: Museum Nasional, Jakarta Pusat.
No. Inventaris	: D.17.
Bahan	: Batu Andesit.
Jumlah	: 1 buah.
Ukuran	: 44 cm x 9 cm x 82 cm.
Bagian yang Ditulisi	: Terdapat 13 baris tulisan pada sisi depan dan 16 baris pada sisi belakang.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 828 Śaka.
Raja	: (tidak disebutkan)
Jenis Prasasti	: <i>sīma</i> .
Referensi	: Alih aksara oleh Damais 1952: 81; terjemahan oleh penulis.

Alih aksara prasasti Kandangan:

a.

1. // o // *swasti śakawarṣātīta 828 bhadrawā*
2. *da māsa tithi pañcami kṛṣṇpakṣa was wa*
3. *gai wṛhaspati wara swatī nakṣatra byatipā*
4. *da yoga. tatkāla nikanan wanua i ka*

5. *ṅḍañan muanṅ anaknya ri wanua i er hijo*
6. *watu wuṅkal tpat śīmā ni parhyañan*
7. *prasāja watak patapān mañasö i*
8. *lumaku pinagēḥhakan ...*

Terjemahan:

a.

1. // o // Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 828 (tahun) bulan Bhadrawā
2. Tanggal 15 paro gelap hari Was
3. Hari Kamis Wage, Nakṣatra Swatī,
4. Yoganya Byatipā ketika itu desa di
5. Kaṅḍañan dan dusun di e(r)hijo
6. yang masuk wilayah Wungkal Tpat dijadikan *sīma* untuk Parhyañan di
7. Prasāda yang masuk wilayah Patāpan diberikan kepada
8. yang melaksanakan penetapan

15. Prasasti Mantyasih I

- Tempat Ditemukan : Kedu, Jawa Tengah.
- Disimpan : Saat ini menjadi koleksi Museum Radya Pustaka, Surakarta, Jawa Tengah.
- No. Inventaris : 293 dan 294.
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 2 lempeng.
- Ukuran : 49,3 cm x 22,2 cm.
- Bagian yang Ditulisi : Keduanya hanya ditulis pada satu sisi yang masing-masing berjumlah 23 baris.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
- Tahun Dikeluarkan : 829 Śaka.
- Raja : Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitūṅ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu.
- Jenis Prasasti : *sīma*.

Referensi : Alih aksara Stutterheim (1927). *Een Belangrijke oorkonde uit de Kedoe. TBG LXVII*; terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih Aksara Prasasti Mantyasih I:

1. // o // swasti śakawarṣātīta 829 caitra māsa. tithi ekādaśi kṛṣṇapakṣa. tu. u. śa. wāra. pūrwwabhadrawāda nakṣatra. ajamāda dewatā. indra yoga. tatkāla ājña śrī mahārāja rakai watukura dyah balituṅ śrī dha
2. [r]mmodaya mahāsambhu. umiṅsor i rakarayān mapatiḥ i hino. halu. sirikan. wka. halaran. tiruan. palarhyaṅ. maṅhūri. wadihati. makudur. kumonnakan nikanan wanua i mantyāsīḥ winiḥ ni sawahnya satū. muaṅ a
3. lasnya i muṅḍuan. i kayu paṅjaṅ. muaṅ pomahan iḅ kuniḅ wanua kagunturan pasawahanya ri wunut kwaiḥ ni winiḅnya satū hamat 18 hop sawah kanayakān. muaṅ alasnya i susuṅdara. i wukir sumwiṅ. kapua wa
4. tak patapān. sinusuk sīmā kapatihana. paknānya pagantyagantya nikanan patih mantyāsīḥ sānak lawasanya tluḅ tahun sawaṅ. kwaiḥ nikanan patih sapuṅduḅ pu sna rama ni ananta. pu kolā rama ni diṅ. pu puṅjēḅ
5. rama ni udal. pu karā rama ni labdha. pu sudraka rama ni kayut piṅḍa prāṅa 5 maṅkana kwaiḥ nikanan patih inanugrahān muaṅ kinon ta ya matūta sānak // samwandhanyan inanugrahān saṅkā yan makwaiḥ buatthaji
6. iniwōnya i śrī mahārāja. kāla ni waraṅan haji. lain saṅke kapūjān bhaṅāra i malaṅkuśeśwara. iḅ pūteśwara. i kutusan. i śilābhedeśwara. i tuleśwara. iḅ pratiwarṣa. muaṅ saṅkā yan antarālika kataku
7. tan ikanan wanua iḅ kuniḅ. sinarabhārānta ikanan patih rumakṣā ikanan hawān. nahan mataūyan inanugrahākan nikanan wanua kālih irikanan patih ...

Terjemahan:

1. // o // Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 829 (tahun) hari Sabtu Legi, paringkelan Tunglai, tanggal 11 paro gelap bulan Caitra, Nakṣatranya

Pūrwwabhadrawāda, dewatanya Ajapāda, yoganya Indra, ketika perintah Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitūṅ Śrī Dha-

2. rmmodaya Mahāsambhu, turun kepada Rakarayān Mapatiḥ i Hino, Halu, Sirikan, Wka, Halaran, Tiruan, Palarhyaṅ, Maṅhūri, Wadihati, Makudur, yang memerintahkan (agar) desa di Mantyāsih yang benih sawahnya sebanyak *tū*, dan
3. hutannya di Muṅḍuan, di Kayu Pañjaṅ, dan perumahannya di Kuniṅ Desa [wanua] Kagunturan, persawahannya di Wunut yang benihnya sebanyak satu *tū*, 18 *hamat* termasuk sawah milik Nāyaka, serta hutannya di Gunung Sindoro, di Gunung Sumbing semuanya masuk wilayah
4. Patāpan, dibatasi menjadi *sīmabagi* para Patih, dimaksudkan untuk digunakan bergantian oleh Patih di Mantyāsih dan keluarganya masing-masing tiga tahun lamanya. Banyaknya Patih yang barkaitan (dengan *sīmaitu*) yaitu Pu Sna bapak dari Ananta, Pu Kolā bapak dari Ḍiṅi, Pu Puñjēṅ
5. Bapak dari Udal, Pu Karā bapak dari Labdha, Pu Sudraka bapak dari Kayut jumlahnya 5 orang, demikianlah banyaknya Patih yang dianugerahi dan disuruhlah ia menyertakan keluarganya. Alasannya (mereka) dianugerahi karena mereka berenam banyak melakukan *buatthaji*
6. sebagai (tanda) kecintaan kepada Śrī Mahārāja ketika pesta pernikahan raja, selain itu juga melakukan pemujaan kepada *Bhaṭāra* di Malaṅkuśeśwara, di Pūteśwara, di Kutusan, di Śilābhédéswara, di Tuleśwara, setiap tahun dan karena ada perubahan menjadi rasa ketakutan penduduk desa
7. di Desa Kuniṅ, Patih itu dipercayai menjaga jalan, itulah sebabnya kedua desa tersebut dianugerahkan kepada Patih.

16. Prasasti Sangsang

- Tempat Ditemukan : -
 Disimpan : Royal Colonial Institute of Amsterdam.
 No. Inventaris : 856 Nos. 1 dan 2.

- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 2 lempeng.
- Ukuran : a. Lempeng pertama 365 x 175 mm.
b. Lempeng kedua 380 x 135 mm.
- Bagian yang Ditulisi : Lempeng pertama ditulisi 14 baris tulisan yang memanjang di sisi depan dan 15 baris di sisi belakang, lempeng kedua ditulisi 14 baris tulisan di sisi depan dan 11 baris di sisi belakang.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
- Tahun Dikeluarkan : 829 Śaka.
- Raja : Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitung Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu.
- Jenis Prasasti : *sīma*.
- Referensi : Alih aksara oleh F. H. Van Naerssen ; terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara prasasti Sangsang:

1. *swasti śakawarsātīta 829 baiśākhā māsa tithi caturthi kṛṣṇapakṣa mawulu wagai soma wāra uttarāpāda nakṣatra śukla yo*
2. *ga tatkāla anugraha śrī mahārāja rakai watukura dyah balitung śrī dharmmodaya mahāsambhu tumurun i rakryān mapatih i [hi]*
3. *no pu dakṣottama bāhubajrapratipakṣaksaya kumon samgat lamwa pu layan anak wanua i patapān tutugan niṅ taṇḍa*
4. *sumusuka ikanan wanua i saṅsan watak lamwa gawai ku 2 drwya hajinya mas su 7 mas kawahutān su 2 suwur hinawu ha*
5. *wu sambandhānya kinon sumusuka ikanan wanua wuara kuṭī i hujun galuḥ watak lamwa ya ta pinulih samgat lamwa pinahayu nira jina*
6. *yyakan nira wihāra ya sambandhānya rinanugrahān kinon sumusuka ikanan wanua i saṅsan simā punpunnana nikanan wihāra gawai*
7. *nira ...*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 829 (tahun), hari Senin Wage, paringkelan Mawulu, tanggal 4 paro gelap bulan Baiśākhā, Nakşatrunya Uttarāpāda, Yoganya Śukla,
2. ketika anugerah Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyaḥ Balituḥ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu turun kepada Rakryān Mapatih di Hino
3. Pu Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣakṣaya memerintahkan Samgat Lamwa yaitu Pu Layang penduduk desa di Patapān dengan tanda (batasnya) yang
4. membatasi desa di Saṅsaṅ yang masuk wilayah Lamwa penghasilannya sebanyak 2 kupang, pajaknya 7 suwarṇa uang emas, uang emas untuk wahuta 2 suwarṇa tersebar menjadi abu
5. alasan diperintah (agar) desa (Sangsang) dijadikan *sīma* ialah, adapun kuti yang terletak di Hujuḥ Galuḥ dari watak Lamwa diperbaiki oleh Samgat Lamwa (dan) ditambah dengan wihara agar megah.
6. Itulah sebabnya (ia) dianugerahi untuk menetapkan desa Sangsang menjadi *sīmapunpunan* bagi wihara yang dibuat
7. nya.

17. Prasasti Guntur

Tempat Ditemukan	: -
Disimpan	: Museum Maritim Rotterdam, Belanda.
No. Inventaris	: 24505.
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: 1 lempeng.
Ukuran	: 24 x 9,5 cm.
Bagian yang Ditulisi	: Pada bagian depan ditulisi 8 baris tulisan dan pada sisi belakang 5 baris tulisan.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 829 Śaka.

- Raja : (tidak disebutkan)
 Jenis Prasasti : Jayapatra.
 Referensi : Alih aksara oleh J.L.A Brandes/N.J. Krom, dalam *OJO CXXX*; terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih Aksara prasasti Guntur:

Sisi depan:

1. //o// swasti śakawarsātīta 829 śrawaṇa māsa tithi dwādaśi śukla, ma, po, bu, wāra tatkāla ni pu tabwēl
2. anagbanua iṅ guntur punpunaniṅ wihāra garuṅ pinariccheda guṇadoṣa nira de samggat pinapan
3. pu gawul muaṅ saṅ anakabwi pu gallam wanua i puluwatu. sambandha nikaṅ guṇadoṣa. hana saṅ dharma ṅara
4. nya bapa ni maṅhampig saṅkāri wurakuṅ ya ta tumagiḥ pu tabwēl tinagihakanya mas su 1, nda tan hutāṅ
5. pu tabwēl ya hutāṅ saṅ anakbwi. makaṅaran si campā. wuaṅ sānak saṅ dharma. pajjah pua si campā. tinagiḥ
6. ta pu tabwēl de saṅ dharma. ndā tan hanānak ni pu tabwēl muaṅ si campā. nuniweḥ yar wruha rikaṅ hutāṅ ya
7. ta mataṅyan tka ri samagat pinapan ndā tan tka saṅ dharma rikaṅ pasamayān ya mataṅyan inalaha
8. ka ta ya de samagat pinapan

Terjemahan:

1. // o // Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 829 (tahun), pada hari Rabu Pon, peringkelan Mawulu, tanggal 12 paroterang bulan Śrawaṇa ketika Pu Tabwēl
2. penduduk Desa Guntur milik bangunan suci di Garung diperkarakan oleh Samgat Pinapan yang bernama
3. Pu Gawul dan istrinya bernama Pu Gallan dari Desa Puluwatu, sebabnya ia diperkarakan, karena Sang Dharma namanya

4. bapak dari Manghapig dari Desa Wurakung yaitu menagih kepada Pu Tabwël hutangnya sebesar 1 suwarna uang emas.
5. Pu Tabwël tidak mempunyai hutang, hutang itu hutang istrinya yang bernama Si Campa, kepada saudaranya Sang Dharmma. Si Campa kemudian meninggal
6. ditagihlah Pu Tabwël oleh Sang Dharma, apalagi Pu Tabwël tidak mempunyai anak dengan Si Campa, lebih-lebih ia tidak mengetahui mengenai hutang istrinya,
7. itulah sebabnya datang tuntutan dari Samgat Pinapan. Dalam persidangan Sang Dharma tidak hadir, itulah sebabnya ia
8. dikalahkan oleh Samgat Pinapan

18. Prasasti Bhatari

Tempat Ditemukan	: Tempat temuannya tidak diketahui dengan pasti hanya disebutkan berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
Disimpan	: Saat ini menjadi milik seorang kolektor yang tidak mau diketahui identitasnya.
No. Inventaris	: -
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: Tidak diketahui karena sudah tidak utuh lagi.
Ukuran	: Berukuran panjang atas 21,8 cm, bagian terpanjang 29,5 cm, panjang bawah 27,5 cm, dan lebar 22 cm.
Bagian yang Ditulisi	: Ditulis pada satu sisi.
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 829 Śaka.
Raja	: „Tidak disebutkan“.
Jenis Prasasti	: <i>Sīma</i> .
Referensi	: Boechari.

Alih Aksara prasasti Bhatari:

1.b

1. // *swasti śakawarsatātīta 829. asuji māsa tithi dwādaśi kṛṣṇapakṣa ma. ka. bu. wāra.*
2. *dakṣottama bāhubajra pratipakṣakṣaya kumona wasa*
3. *knanyan sinusuk sīmā bhatārī ta ... pa ri –īnanira sa*

Terjemahan:

1. Selamat! tahun Śaka telah lewat 829, pada bulan Asuji, tanggal 12 paro gelap, pada hari-hari Mawulu, Kaliwuan, Rabu,
2. Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣakṣaya memerintahkan
3. Tujuan pembatasan (tanah itu) ialah untuk dijadikan *sīmabagi* (bangunan suci) untuk Bhatārī

19. Prasasti Rukam

- Tempat Ditemukan : Sungai Ngasinan, Desa Petarongan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
- Disimpan : Balai Penyelamatan dan Pelestarian Benda-benda Purbakala (BP3) Prambanan, Provinsi Jawa Tengah.
- No. Inventaris : 301 dan 302.
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 2 lempeng.
- Ukuran : Lempeng pertama berukuran 43,2 cm x 22,7 cm dan lempeng kedua berukuran 43 cm x 22,1 cm.
- Keadaan Prasasti : -
- Bagian yang Ditulisi : Lempeng pertama ditulis pada satu sisi dengan 28 baris tulisan dan lempeng kedua ditulis pada satu sisi dengan 23 baris tulisan.
- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
- Tahun Dikeluarkan : 829 Śaka.

- Raja : Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Balitung Śrī Dahrmodaya Mahāsambhu.
- Jenis Prasasti : *Sīma*.
- Referensi : Titi Surti Nastiti dkk (1982) dalam *Tiga Prasasti Masa Balitung*.

Alih aksara:

1. *swasti śakawarṣātīta 829 kārttika māsa tīthi daśami śuklapakṣa. ma. pa. so. wāra satabhiṣa nakṣatra baruṇa dewata wṛddhi yoga. tatkāla ajña śrī mahārāja rake watukura dyah balitung śrī dahrmodaya mahāsambhu miṅ*
2. *sor i māhamantrī śrī dakṣottama bāhubajra pratipakṣakṣaya kumonnakan ikanan wanua i rukam wanua i dro saṅkā yan hilan de niṅ guntur sīmān rakryān sañjīwana nini haji maṅasīa i dharmma nira i limwuṅ muan pagawa*
3. *yana kamulān paṅguhannya pirak dhā 5 pilih mas mā 5 marā i parhyānan i limwuṅ buñcaṅ hajya nya umiwia ikanan kamulān samahala ya sarabhāra i ri ya riṅ samahala kabaiḥ parṇaḥhannya ...*

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka telah berjalan 829 tahun, bulan Kārttika, tanggal 10 paro terang, pada hari: Mawulu (paringkelan), Pahing (pasar), hari Senin (menurut siklus 7 hari), bintang Śatabhiṣa, (di bawah naungan): dewa Baruṇa, yoga: Wṛddhi. Pada waktu itu perintah Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Balitung Śrī Dahrmodaya Mahāsambhu
2. turun kepada (Rakryān) Māhamantrī Śrī Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣakṣaya, memerintahkan agar desa Rukam yang termasuk wilayah *kutagara* atau *negeri ageng*, yang telah hancur oleh letusan gunung dijadikan daerah perdikan bagi neneknya raja yaitu Rakryān Sañjīwana. Dan hendaknya dipersembahkan kepada dharmmanya (Rakryān Sañjīwana) di Limwuṅ dan hendaknya mem-
3. buat *kamulān* (di Rukam). Pendapatan (daerah Rukam yang berjumlah) 5 dharana perak dan 5 māsa pilih mas, (supaya) diberikan pada *parhyānan*

yang terletak di Limwuṅ: sebagai buñcaṅ hajinya adalah (kewajiban) memelihara kamulān (tersebut). Kemudian seluruh petani di desa Rukam memohon perlindungan kepadanya terhadap orang-orang yang semula sering mengganggu keamanan di daerah itu. ...

20. Prasasti Kinwu

Tempat Ditemukan	: Asal temuan tidak diketahui karena laporan dari pertengahan abad ke-19 menyebutkan arca tersebut telah ada di situ. Pada tahun 1956, di Dukuh Klampok, Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, ditemukan sambungannya yang dipahatkan pada batu segib empat yang merupakan lapik arca Ganeśa.
Disimpan	: Di halaman gedung Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
No. Inventaris	: -
Bahan	: Batu berbentuk Arca Ganesha.
Jumlah	: 1 buah.
Ukuran	: -
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 829 Śaka (20 November 907).
Raja	: Śrī Mahārāja Watukura Dyah Balituṅ Śrī Išwara Keśawasamarotuṅga.
Jenis Prasasti	: „Sengketa pajak“.
Referensi	: Alih aksara dalam <i>OJO XXVI</i> ; terjemahan sementara oleh Edhi Wurjantoro dalam „bahan perkuliahan epigrafi“ dan penulis.

Alih aksara prasasti Kinwu:

I.a

1. *swasti śakawarṣātīta 829 mārgasira māsa tithi dwā*
2. *daśi śuklapakṣa ha wa śu wara bharaṅī nakṣatra siddha yoga yama dewata*

3. *tatkāla nikanan rāma i kinwu watak ranḍaman inanugrahān de śrī mahārāja*
4. *watukura dyaḥ ba[l]ituḥ śrī iśwara keśawasamarotunḡa mwan mahāmantri śrī dakṣo*
5. *ttama wajrabāhupratipakṣakṣaya sambhandhanyann-inanugrahān mūla sawaḥ katajyanan kmi*
6. *takan nikanan rāma lamwit 6 tampaḥ 3 kaḍik 28 gawai 8 kunaḥ saṅkāri durbbala nikanan rāma*
7. *i kinwu tan wnaḥ umijilakan drabya haji nikaḥ samaḅkana jarīya manambah i rakryān ni randaman pu*
8. *wāma mamalaku maṅlēbiha sawaḥ tlas wyayanya tumama mās pagēḥ ka 3 su 1 [.....] ha*
9. *ḍaṅan 1 māsuya su 1 maparaḥ i saḥ juru mas su 2 kinabaihan nira pjaḥ pwa rakryān ni ranḍaman lumāḥ i*
10. *tambla tapwan linapih sawaḥ nikanan rāma jarīya maṅabarat manamākan ya mās ka 5 i śrī mahārāja mwan ra*
11. *kryān mahāmantri muaḥ rakryanta gaṅsal wuḅkal tihan wka sirikan kaluḥ watak tiru ranu ḍumata*
12. *ṅakan sambahnya samgat momahumaḥ i pamrata puttara muaḥ saḥ pratyaya i ranḍaman rake hampran*
13. *mwan pu watabwan rowaḥ rakryān paṅjiwasa pamilihan mwan saḥ dumba nāhan kwaiḥ nira dumataṅṅakan ṣambaḥ rā*
14. *manta i kinwu yā ta sambandhanyanninanugrahān masawaha lambit 6 katik 12 gawai ma 6 tatra*

Terjemahan:

I.a

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 829 (tahun), hari Jumat Wage, paringkelan Haryang, tanggal 12 paro terang
2. Bulan Mārgasira, Naksatranya Bharanī, Yoganya Siddha, Dewanya Yama
3. ketika kepala Desa Kinwu yang masuk wilayah Ranḍaman dianugerahi oleh Śrī Mahārāja

4. Watukura Dyah Balituh Śrī Išwara Keśawasamarotunga dan Mahāmantri Śrī Dakṣo
5. ttama Wajrabāhupratipakṣakṣaya alasan penganugerahan mūla sawah Katjyanan
6. yang dilindungi oleh kepala desa seluas 6 lamwit, 3 tampah, 28 katik, 8 gawai karena menyebabkan kesulitan bagi kepala desa
7. di Kinwu tidak bisa membayar pajak karenanya (ia) menghadap kepada rarkyan di Raṇḍaman yaitu Pu
8. Wāma mamalaku maṅlĕbiha sawah tlas wyayanya tumama mās ketetapanya 3 kati dan 1 suwarṇa
9. seekor kerbau, 1 suwarṇa diberikan kepada sang juru semuanya suwarṇa (uang) emas, matilah Rakryān di Raṇḍaman dicandikan di
10. tambla tapwan linapih sawah nikananṅ rāma jarīya maṅabarat manamākan ya, 5 kati emas kepada Śrī Mahārāja dan
11. Rakryān Mahāmantri dan Rakryān berlima yaitu Wungkal Tihang, Wka, Sirikan, Kalungwara, Tiruraṇu
12. kedatangannya menghadap ke Samgat Momahumaḅ di Pamrata yaitu Pu Uttara dan Sang Pataya di Raṇḍaman yaitu Rake Hamparan
13. dan Pu Watabwang wakilnya Rakryān Pañjiwasa Pamilihan dan Sang Dumba kemudian banyaknya yang datang menghadap yaitu
14. kepala desa di Kinwu, itulah alasannya ia dianugerahi masawaha 6 lambit, 12 katik, 6 gawai

21. Prasasti Wanua Tengah III

Tempat Ditemukan	: -
Disimpan	: Balai Pelestarian dan Penyelamatan Arkeologi Jawa Tengah.
No. Inventaris	: 1118 dan 1119.
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: 2 lempeng.
Ukuran	: Lempeng pertama berukuran: 52,5 cm x 23,5 cm.

Lempeng kedua berukuran 55,5 cm x 265,5cm.

Bagian yang Ditulisi : Lempeng pertama yang ditulis 17 baris tulisan pada satu sisi. Lempeng kedua yang ditulis pada kedua sisi, sisi depan berjumlah 26 baris dan sisi belakang 18 baris.

Aksara dan Bahasa : Secara keseluruhan prasasti Wanua Tengah III ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa Kuno, meskipun di dalamnya terdapat kutipan prasasti lain yang memakai bahasa Sansekerta.

Tahun Dikeluarkan : 830 Śaka.

Raja : Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Balitung Śrī Iswarakesawotsawatunggarudramūrti.

Jenis Prasasti : *Sīma*.

Referensi : Alih aksara dan terjemahan oleh Riboet Darmosoetopo (1997).

Alih aksara prasasti Wanua Tengah III:

8. ... *in śaka 830 asuji māsa padmanābha de*
9. *watā. tithi daśami śuklapakṣa tuṅ pa wr. wāra. karmmeśa dewa. wālawā karaṇa. uttarapādha nakṣatra. wiśwa dewa. śukla yoga karmuka lagna. yama deśa. irikā diwasa nikanan sawah sīmai pikatan ninuwahakan i san hyan wihāra i pikatan. anuṅ kinon śrī mahārāja muan rakryān mahāmantri umuwaha*
10. *kna ikanan sawah i wihāra i pikatan rakryān limwa yan dyah guna muan danācāryya in tūk dhāneśwara umyāpāra ta susukana nikanan wuṅkal.*

Terjemahan:

8. Pada tahun Śaka bulan Asuji, Padmanabha de-
9. wata, tanggal 10 paro terang, hari Kamis Pahing Tungalai, Karmmesa dewa. Walawa karena, Uttarapada naksatra. Wiswadewa sukla yoga, Karmuka lagna, Yama desa, adalah saat sawah *sīmadi* Pikatan diberikan kepada sang hyang wihara di Pikatan. Adapun yang diperintah oleh Sri maharaja dan Rakryan Mahamantri memberikan

10. sawah tersebut (menjadi *sīma*) kepada bihara di Pikatan adalah Rakryan Limwayan Dyah Guna dan Dang Acaryya di Tuk bernama Dhaneswara dengan mengusahakan batu batasnya.

22. Prasasti Kaladi

- Tempat Ditemukan : Gunung Penanggungan, Jawa Timur.
 Disimpan : Museum Nasional, Jakarta Pusat.
 No. Inventaris : E 71.
 Bahan : Tembaga.
 Jumlah : Terdiri atas delapan lempeng tembaga. Prasasti ini seharusnya terdiri dari 10 lempeng, akan tetapi lempeng 3 dan 5 telah hilang.
 Ukuran : Masing-masing berukuran 43 cm x 11 cm.
 Bagian yang Ditulisi : Prasasti ini bertulisan pada kedua belah sisinya. Setiap sisi bertulisan 6 baris, kecuali lempeng terakhir sisi belakangnya hanya 5 baris.
 Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
 Tahun Dikeluarkan : 831 Śaka.
 Raja : Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituṅ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu.
 Jenis Prasasti : *sīma*.
 Referensi : Boechari, *Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I*, 1985/1986:147-153. Terjemahan oleh Edhie Wurjantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara prasasti Kaladi:

I.a

1. // o // śrir-astu jagaddhitāya // o // swasti śakawarṣatīta. 831. āsāda masa
2. tithi aṣṭami śuklapkṣa. ba. wa. aṅ. wāra mahatal utara granā rasta.
nakṣatra. dinā

3. *kṣabdeto śiwayoga. kuwera parwweśa. bayabya maṇḍala. swetā muhurttā wistikara*
4. *na. nya rawi tatkāla nyānugraha śrī mahārāja rake watukura dyah balituṅ śrī dharmmodaya mahāsambhu*
5. *tinadaḥ rakryān mapatiḥ i hino pu dakṣottama bahubajrapratipakṣākṣaya turun i rakryān*
6. *bawaṅ dyah śraḥwaṇa. sambandha. ikaṇaṅ lmaḥ iṅ kaladi. i gayam. mwaṅ-iṅ pyapya. watēk*

I.b

1. *bawaṅ sinēmbahankēn dampunta suddhara muaṅ dampunta dampi. śima pananamāna kambaṅ panikēlana su*
2. *sur. sampun pūaya winehakēn śimān. sambandha ikaṇaṅ lmaḥ iṅ gayām. muaṅ iṅ pyapya.*
3. *hlat gūnanta kamulanya. alas araṇan katakutan. tamolaḥ pahabētan de niṅ mari*
4. *wuṅ, dhurmurbalākēn ikaṅ banyāga muaṅ hilirān riṅ rahina riṅ kulēm. kunēṅ yathānyan ubhayaguna i*
5. *kanaṅ alas dadyā sawaḥ lāwan māryya katakutan mari watēk bawaṅ pārṅnaḥnya swatantra tan kata*

Terjemahan:

I.a

1. // o // Semoga seluruh dunia sejahtera // o // Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 831 (tahun), hari Selasa Wage Paringkelan Wās, tanggal 8 paroterang, bulan Āṣāḍa
2. Wukunya Mahatal, kedudukan bintang di Utara, Naksatryanya Hasta
3. Yoganya Śiwa, Parwweśanya Kuwera. Maṇḍala di Barat Laut, Muhurttanya Swetā, Karananya Wiṣṭi
4. Rawinya [Ka]nya. Pada waktu anugerah Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituṅ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu

5. diterima oleh Rakryān Mapatih i Hino Pu Dakṣottama Bahubajrapratipakṣāksaya turun kepada Rakryān
6. Bawaṅ Dyah Śraḥwaṇa. Alasannya tanah di Kaladi, di Gayam, dan di Pyapya, yang masuk wilayah

I.b

1. Bawang, menghadap sembah kepada Ḍapunta Suddhara dan Ḍapunta Dampi agar pemujaan bunga di *sīma* dilipat-gandakan
2. dan juga sudah diberi (anugerah) agar dijadikan *sīma*. Alasannya tanah di Gayam dan di Pyapya terhalang untuk tempat pemujaan
3. karena hutan Larangan menyebabkan ketakutan, desa terpukul karena ulah Mari-
4. wuṅ, menyebarkan kecemasan diantara perdagangan dan penangkap ikan pada siang dan malam hari. Oleh karena itu disusahakan agar
5. hutan itu dijadikan sawah dan hilanglah rasa ketakutan

23. Prasasti Tulangan

Tempat Ditemukan	: Jedung, Mojokerto, Jawa Timur.
Disimpan	: Prasastinya telah hilang, namun kopiannya disimpan di Rijksmuseum, Leiden.
No. Inventaris	: -
Bahan	: Tembaga.
Jumlah	: -
Ukuran	: -
Aksara dan Bahasa	: Jawa Kuna.
Tahun Dikeluarkan	: 832 Śaka.
Raja	: Śrī Mahārāja Rakai Galuḥ Dyah Garuda Mukha Śri Dharmmodaya Mahāsambu.
Jenis Prasasti	: <i>Sīma</i> (?)
Referensi	: Alih aksara dalam <i>OJO</i> . XXVIII: 36-37, terjemahan oleh Edhie Wuryantoro dalam „Bahan perkuliahan epigrafi“.

Alih aksara prasasti Tulangan:

1. // swasti śaka warṣatīta 832, bhadravāda māsa tīthi pancami śu
2. kla pakṣa, tu u śu wāra maḍaṅkuṇan rudradewatā harmmaṇa yo
3. ga. irika siwaśa nyaḥ wurut, manambah i śrī mahārāja raka galuḥ dya
4. garuda muka śrī dharmmodaya mahāsambu muaṅ rakryan mahāmantri iṅ
5. hino, dyaḥ dakṣottama bāhubajrā prapakṣakṣaya, prayojananira ma
6. tanyan panambah uminta ikanaṅ lmaḥ tulaṅan pin--nikaṅ alas la
7. mwaṅ kulon naranya iṅ nūpāsūla hlat katakotanā sambantaya kṛ

Terjemahan:

1. Selamat tahun Śaka yang telah berlalu 832 (tahun), hari Jumat Legi peringkelan Tungalai wuku Maḍaṅkuṇan
2. tanggal 5 paroterang bulan Bhadravāda tahun dewanya Indra yoganya Hārmmaṇa
3. ketika Dyaḥ Wurut menghadap Śrī Mahārāja Rakai Galuḥ Dyaḥ
4. Garuda Mukha Śrī Dharmmodaya Mahāsambu dan Rakryan Mahāmantri
5. Di Hino (bernama) Dyaḥ Dakṣottama Bāhubajrā Prapakṣakṣaya, adapun maksud/ sebabnya
6. menghadap yaitu meminta tanah di Tulaṅan ... berupa hutan
7. dan barat namanya di Ūpāsūla berbatasan yang menjadikan sebab ketakutannya.

24. Prasasti Wukajana

- Tempat Ditemukan : -
- Disimpan : -
- No. Inventaris : -
- Bahan : Tembaga.
- Jumlah : 1 lempeng.
- Ukuran : -
- Bagian yang Ditulisi : Ditulis pada kedua sisinya, sisi depan bertulisan 14 baris dan sisi belakang bertulisan 11 baris.

- Aksara dan Bahasa : Jawa Kuna.
 Tahun Dikeluarkan : -
 Raja : Śrī Mahārāja Rakai Watukura.
 Jenis Prasasti : *sīma*.
 Referensi : F.H. van Naerssen, *Twee koperen oorkonden van Balitung in het Koloniaal Instituut te Amsterdam, BKI* 95, 1937:441-446. Terjemahan oleh penulis.

Alih aksara prasasti Wukajana:

7. ... *ajña haji pañanugraha śrī mahārā*
8. *ja rakai watukura i samgat kalañ wuṅkal pu layañ sumusuka ikanañ wanua i wukajana i tumpang i wuru tlu sīmā punpunana nikanañ bihāra i dalinan gawai nira*
9. *makaphalā swasthā ...*

Terjemahan:

7. perintah raja penganugerahnya adalah Śrī Mahārā-
8. ja Rakai Watukura kepada Samgat Kalañ Wuṅkal bernama Pu Layañ membatasi desa tersebut yang di Wukajana, di Tumpang, di Wuruk. 3 *sīmā punpunan* untuk bihara di Dalinan
9. yang dibuatnya ..

BAB 3

ANALISIS *SAMBANDHA*

Pada bab sebelumnya telah disertakan prasasti-prasasti masa Balitung (820-832 Ś) yang dijadikan data penelitian beserta kutipan-kutipan alih aksara dan terjemahan pada bagian *sambandha*. Pada bab ini data *sambandha* prasasti akan dianalisis dengan cara dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis prasasti dan isinya, kemudian diuraikan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang terlihat di dalamnya.

3.1 *Sambandha* dalam Penyebutannya

Sambandha berasal dari kata benda „*sambandha*“ dalam bahasa Sansekerta yang berarti hubungan, pertalian, hubungan kepada, hubungan pribadi, sebab, alasan, peristiwa, di dalam prasasti *sambandha* mengantar bagian yang mendeskripsikan alasan mengapa surat keputusan tersebut dianugerahkan (Zoetmulder, 2006: 1000). Dalam prasasti terkadang penulisannya ditambahkan akhiran *-nya* atau *-nyan*, menjadi *sambandhanya* atau *sambhandannyan*. Penambahan *-nya* dan *-nyan* berfungsi sama dengan *-nya* dalam bahasa Indonesia saat ini, merupakan kata penunjuk benda yang diikutinya. Sehingga *sambandhanya* atau *sambandhannyan* berarti „alasannya“ atau „sebabnya“.

Di dalam prasasti-prasasti yang menyebutkan unsur *sambandha*, pada kenyataannya *sambandha* tidak selalu ditulis dengan istilah *sambandha* itu sendiri. Istilah lain yang sama seringnya dijumpai saat penyebutan bagian prasasti yang menjelaskan alasan sebuah keputusan ditetapkan adalah *matanyan* yang berasal dari kata *matan*. Kata *matan* memiliki arti yang sama persis dengan arti yang dimiliki oleh *sambandha* yaitu „sebab“ atau „karena“ (Zoetmulder, 2006: 659). Oleh karena kata *sambandha* dan *matan* sama-sama memiliki arti „sebab“, „karena“ dan „alasan“, berarti kata *matan* juga mengantarkan bagian alasan dalam sebuah prasasti.

Di bawah ini adalah tabel dari prasasti-prasasti yang menyebutkan istilah *sambandha* dan *matan* dalam menjelaskan alasan dikeluarkannya keputusan yang diabadikan dalam prasasti.

Tabel 1 Istilah Yang Digunakan Dalam Penyebutan Bagian Alasan Pada Prasasti

Penyebutan		Prasasti	Jml.
Sambandha	Sambandha	Guntur: <i>sambandha nikaṅ guṇadoṣa</i> Kaladi: <i>sambandha ikaṅ lmaḥ iṅ kaladi i gayam mwaṅ-ing pyapya</i>	6
	Sambandhānya	Sangsang: <i>sambandhānya rinanugrahān kinon sumusuka ikaṅ wanua</i>	
	Samwandhanya	Palepangan: <i>samwandhanya saṅkā i tan patūt nikaṅ rāma</i>	
	Samwandhanyan	Mantyasih I: <i>samwandhanyan inanugrahān saṅkā yan makwaiḥ buathaji</i> Kinewu: <i>sambhandhanyann-inanugrahān mūla sawaḥ katajyanan</i>	
Matan	Mataṅyan	Taji: <i>nāhan mataṅyan sinusuk de rakryān ginawai kabikuan</i> Tulangan: <i>prayojananira mataṅyan panambaḥ uminta ikaṅ lmaḥ tulaṅan</i>	4
	Mataṅyan	Kayu Ara Hiwang: <i>matanṅyan sinīma de rake banua poḥ dyaḥ sala</i>	
	Matan	Kubu-Kubu: <i>nāhan matan nyār arpanaḍahakēnya</i>	

Prasasti-prasasti yang terdapat pada tabel di atas hanyalah prasasti-prasasti dari masa Balitung yang dengan jelas menyebutkan bagian alasan atau *sambandha*. Dari 10 prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian prasasti yang menyebutkan alasan dari sebuah keputusan tidak hanya diwakili dengan

menggunakan kata *sambandha*. Kata *matan* yang memiliki arti yang sama dengan *sambandha* rupanya juga banyak ditemukan. Tabel di atas menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki fungsi yang sama dalam sebuah prasasti, yaitu menjelaskan latar belakang atau alasan sebuah keputusan ditetapkan dan diabadikan dalam sebuah prasasti.

3.2 *Sambandha* dalam Jenis-Jenis Prasasti

Seperti yang telah disinggung sebelumnya pada Bab I bahwa istilah *sambandha* tidak hanya terdapat pada prasasti *sīma* saja, namun juga terdapat pada prasasti jenis lain. Diantaranya adalah pada prasasti jayapatra dan prasasti yang isinya mengenai persengketaan pajak--yang selanjutnya akan digunakan istilah prasasti pajak pada tulisan ini. Hal tersebut terbukti dengan terdapatnya kata *sambandha* pada prasasti Guntur yang merupakan prasasti jayapatra yaitu *sambandha nikan gunadoṣa* (sebabnya ia diperkarakan). Kutipan prasasti Guntur tersebut menunjukkan bahwa unsur *sambandha* bahkan dimiliki oleh prasasti jayapatra.

Tabel 2 Jenis-Jenis Prasasti Yang Memiliki Unsur *Sambandha*

Jenis-Jenis Prasasti	Jumlah
<i>Sīma</i>	19
Jayapatra	1
Pajak	4

Tabel 1 di atas mewakili jenis-jenis *sambandha* berdasarkan dari jenis-jenis prasastinya. Dari 24 data prasasti yang digunakan pada penelitian ini dapat terlihat bahwa *sambandha* lebih banyak ditemukan pada prasasti *sīma*, karena memang prasasti *sīma* adalah prasasti yang paling banyak dari masa Balitung.

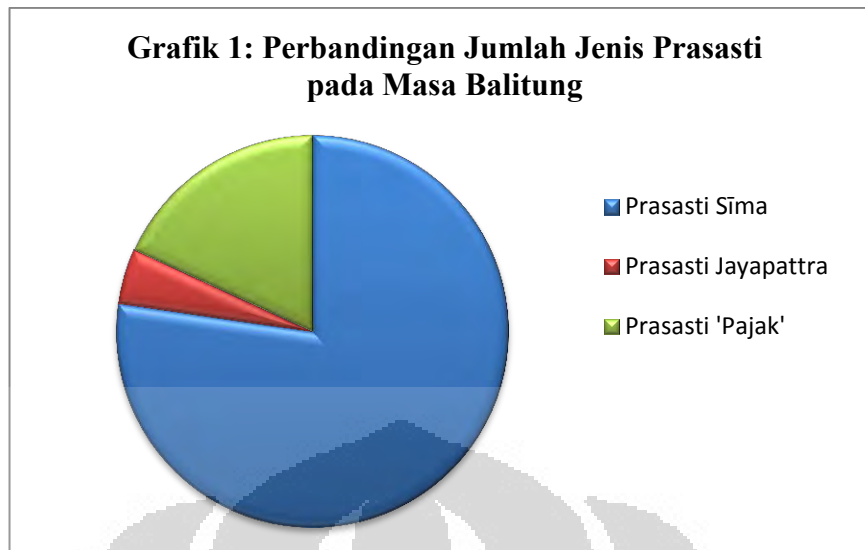
Jenis *sambandha* prasasti *sīma* berjumlah 19 buah, kemudian prasasti pajak sebanyak empat buah dan yang paling sedikit dan satu-satunya adalah prasasti jayapatra.

Jenis *sambandha* prasasti *sīma* adalah prasasti Ayam Těas I, Taji, Kayu Ara Hiwang, Rongkab, Watukura I, Panggumulan I, Telang, Ketanen, Poh, Kubu Kubu, Kandangan, Mantyasih I, Sangsang, Bhatari, Rukam, Wanua Tengah III, Kaladi, dan Wukajana. Jenis *sambandha* prasasti pajak adalah prasasti Luitan, Rumwiga II, Palepangan, dan Kinewu. Prasasti jayapatra satu-satunya di masa Balitung adalah prasasti Guntur yang juga memiliki *sambandha*.

Tabel 2 merangkum *sambandha* berdasarkan prasasti-prasasti yang dapat diidentifikasi jenisnya. Hasilnya sebanyak 23 buah prasasti dapat diidentifikasi, sedangkan satu sisanya tidak jelas apa jenisnya. Prasasti tersebut adalah prasasti Tulangan (832 Śaka). Prasasti Tulangan tidak menunjukkan ciri-ciri satupun dari ketiga prasasti tersebut. Pada prasasti *sīma*, biasanya selalu menyebutkan kata *sīma* di dalamnya, begitu juga prasasti Tulangan tidak cocok apabila diklasifikasikan ke dalam prasasti jayapatra maupun prasasti pajak karena peristiwa di dalamnya bukan peristiwa masalah pajak maupun keputusan hukum. Akan tetapi hal tersebut tidak pasti karena prasasti Tulangan diduga merupakan awal dari suatu prasasti yang tidak utuh yang saat ini di simpan di Museum di Leiden, Belanda. Mungkin sekali keterangan yang memuat mengenai peristiwa yang lebih penting terdapat pada bagian yang telah hilang.

3.3 Perbedaan Antarjenis *Sambandha*

Berdasarkan Tabel 2 yang terdapat pada subbab sebelumnya, terlihat bahwa prasasti-prasasti yang memiliki unsur *sambandha* banyak terdapat pada prasasti *sīma*, meskipun di samping itu *sambandha* ternyata ditemukan pula pada prasasti lain. Grafik di bawah memperlihatkan kuantitas dari masing-masing jenis prasasti, untuk melihat perbandingan dari jumlah prasasti-prasasti tersebut dengan lebih jelas.



Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antar masing-masing jenis prasasti. Terlihat bahwa prasasti *sīma* memiliki jumlah yang jauh lebih banyak yaitu sebanyak 79%, disusul kemudian prasasti pajak dengan jumlah 17%, dan prasasti jayapattra hanya 4%. *Sambandha* yang terdapat pada prasasti *sīma*, *jayapattra*, dan prasasti „sengketa pajak“ selanjutnya akan dilihat perbedaannya berdasarkan ragam aspek, sifat dan fungsinya.

3.3.1 Perbedaan dalam Hal Fungsi *Sambandha*

Meskipun *sambandha* dari ketiga jenis prasasti sama-sama mengantarkan alasan dikeluarkannya suatu keputusan, namun belum diketahui fungsi yang lebih spesifik dari *sambandha* apabila ia berada pada prasasti *sīma*, prasasti jayapattra, maupun prasasti pajak. Adanya perbedaan fungsi sangat mungkin terjadi karena tiap prasasti memiliki perbedaan satu sama lain. Untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tersebut, pertama-tama ketiga prasasti tersebut akan diuraikan formula atau unsur-unsur di dalamnya.

Prasasti pajak merupakan prasasti yang memperingati sebuah keputusan atas suatu perkara yang menyangkut perpajakan pada masa itu. Prasasti ini tidak menyebut istilah khusus yang dapat menjadikan ciri dari prasasti itu sendiri. Berbeda dengan prasasti *sīma* yang identik dengan kata-kata manusuk *sīma*, dan prasasti jayapattra dengan kata-kata jayapattra di dalamnya. Prasasti pajak

menjelaskan sebuah perkara pajak mulai dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut hingga ditetapkannya keputusan.

Pada penelitian ini prasasti-prasasti mengenai persengketaan pajak telah coba disusun formulasinya. Hasilnya adalah ada beberapa aspek yang ditemukan pada prasasti-prasasti jenis ini namun tidak ditemukan pada prasasti jenis *sīma*. Misalnya selalu menyebutkan nama pemohon yang berarti prasasti ini dikeluarkan karena ada permohonan atau pengaduan terlebih dahulu. Akan tetapi meskipun hampir semua prasasti ini memiliki unsur yang sama, namun urutan formulanya tidak sama antara satu prasasti dengan prasasti yang lain. Tidak seperti formula pada prasasti *sīma* yang hampir selalu sama. Berikut adalah tabel perbandingan formula prasasti-prasasti „sengketa pajak“ dari masa Balitung:

Tabel 3 Formula Prasasti ‘Sengketa Pajak’

No.	Unsur	Luitan	Rum-wiga I ¹	Rum-wiga II	Palepa-ngan	Kinewu
1	Pertanggalan	√	√	√	√	√
2	Nama pemohon	√		√	√	√
3	Nama pejabat yang diajukan permohonan	√		√		√
4	Permohonan	√		√		
5	<i>Sambandha</i> / alasan permohonan	√		√	√	√
6	Nama petugas peninjau	√			√	
7	Nama pejabat yang memberi keputusan	√	√		√	√
8	Hasil keputusan	√	√	√		
9	Nama-nama pejabat dan saksi yang hadir	√	√	√	√	√
10	Pasek-pasek	√	√	√	√	

¹ Prasasti Rumwiga I dimasukkan dalam tabel dengan tujuan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih variatif mengenai unsur-unsur prasasti pajak, karena prasasti Rumwiga I merupakan prasasti pajak namun tidak digunakan sebagai data dalam penelitian ini karena tidak memiliki unsur *sambandha* baik secara jelas maupun tersirat.

Urutan unsur prasasti Luitan pada tabel di atas bukan merupakan suatu ketentuan yang baku, namun urutan yang dimiliki oleh prasasti Luitan memiliki alur yang lebih lengkap dan teratur menurut penulis sehingga dijadikan patokan bagi prasasti-prasasti pajak lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa unsur pertanggalan yang diwakili oleh angka 1 dan daftar saksi-saksi yang diwakili oleh angka 9 adalah yang paling banyak dan terdapat pada semua prasasti pajak. Selebihnya merupakan kombinasi antara unsur 2 hingga 10.

Unsur yang dimiliki oleh prasasti Luitan berurut dari unsur pertanggalan hingga pasek-pasek. Sedangkan keempat prasasti lainnya memiliki urutan yang tidak teratur. Prasasti Rumwiga I memiliki urutan yaitu pertanggalan, hasil keputusan, nama pejabat yang memberi keputusan, nama pejabat dan saksi yang hadir, terakhir adalah pasek-pasek. Prasasti Rumwiga II yang memiliki unsur terlengkap setelah Luitan memiliki urutan yaitu pertanggalan, nama pemohon, nama pejabat yang diajukan permohonan, permohonan, hasil keputusan, *sambandha*, nama pejabat dan saksi yang hadir, dan pasek-pasek. Prasasti Palepangan memiliki urutan yaitu pertanggalan, nama pejabat yang memberi keputusan, *sambandha*, nama pemohon, nama petugas peninjau, pasek-pasek, dan nama pejabat serta saksi yang hadir. Sementara prasasti Kinewu memiliki urutan unsur pertanggalan, nama pejabat yang memberi keputusan, *sambandha*, nama pemohon, nama pejabat yang diajukan permohonan, dan terakhir adalah nama pejabat dan saksi yang hadir.

Biasanya prasasti *sīma* memiliki unsur-unsur yang berpola dan sama. Hal tersebut juga yang membuat banyak para ahli yang membahas dan menguraikan unsur-unsur tersebut. Formula prasasti *sīma* belum tentu sama dengan formula prasasti lainnya. Hal tersebut karena belum pernah ada yang menyusun dan mengurutkan formula atau unsur-unsurnya. Berikut adalah formula dari tiga jenis prasasti; yaitu prasasti *sīma* yang menggunakan formulasi yang dibuat oleh Hasan Djafar, prasasti *jayapatra* yang hanya menggunakan satu prasasti yaitu prasasti guntur, dan prasasti pajak yang menggunakan empat prasasti pajak dari masa Balitung yaitu Palepangan, Kinwu, Rumwiga II, dan Luitan.

Tabel 4 Formulasi 3 Jenis Prasasti

Prasasti <i>Sīma</i>	Prasasti <i>Jayapatra</i>	Prasasti ‘sengketa pajak’
1. Seruan pembuka, 2. Unsur pertanggalan, 3. Nama raja atau pejabat pemberi perintah, 4. Nama pejabat penerima perintah, 5. Peristiwa pokok atau isi perintah, 6. <i>Sambandha</i> , 7. Upacara, 8. Para saksi, 9. Sumpah atau kutukan, 10. Penutup. (Djafar, 1990: 31)	1. Pertanggalan, 2. Nama pihak penuntut, 3. Nama pihak yang dituntut, 4. <i>Sambandha</i> 5. Persidangan, 6. Hasil keputusan, 7. Saksi-saksi, 8. Penutup.	1. Pertanggalan 2. Nama pemohon 3. Nama pejabat yang diajukan permohonan 4. Permohonan 5. <i>Sambandha</i> / alasan permohonan 6. Nama petugas peninjau 7. Nama pejabat yang memberi keputusan 8. Hasil keputusan 9. Nama-nama pejabat dan saksi-saksi yang hadir 10. Pasek-pasek.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa unsur-unsur yang dimiliki oleh prasasti *sīma* dan prasasti pajak memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh prasasti *jayapatra*. Unsur yang dimiliki oleh prasasti *sīma* terlihat lebih sakral karena secara umum merupakan rangkaian dari jalannya suatu upacara *sīma*. Meskipun unsur yang dimiliki oleh prasasti pajak berjumlah sama dengan yang dimiliki oleh prasasti *sīma*, namun prasasti pajak hanya menyebutkan pejabat-pejabat birokrasi yang terlibat.

Formula prasasti *sīma* hampir selalu ada dan sama pada setiap prasasti *sīma*. Prasasti *jayapatra* pada tabel di atas hanya menggunakan satu data yaitu prasasti Guntur sehingga tidak terlihat perbandingannya dengan prasasti *jayapatra* yang lain. Pada prasasti „sengketa pajak“, perbandingan dilakukan terhadap prasasti sejenis yaitu prasasti Kinewu, prasasti Palepangan, prasasti Luitan, dan prasasti Rumwiga. Formula yang ditemukan pada prasasti „sengketa pajak“ rupanya sama namun urutannya tidak seragam antara satu dengan yang lain.

Dari ketiga jenis prasasti yaitu prasasti *sīma*, *jayapatra*, dan prasasti „sengketa pajak“ ketiganya memiliki persamaan yaitu mengantarkan „alasan“ dari sebuah peristiwa yang diabadikan dalam sebuah prasasti. Akan tetapi *sambandha* yang terdapat dalam prasasti *jayaptra* dan „sengketa pajak“ memiliki sedikit perbedaan fungsi dengan *sambandha* yang terdapat dalam prasasti *sīma*. *Sambandha* pada prasasti *sīma* mengantarkan alasan mengapa suatu daerah ditetapkan menjadi sebuah daerah perdikan. *Sambandha* pada prasasti *jayapattra* mengantarkan alasan suatu perkara dibawa ke pengadilan, sedangkan *sambandha* pada prasasti „sengketa pajak“ mengantarkan alasan dibalik permohonan pajak yang dilakukan oleh para pemohon.

3.3.2 Perbedaan dalam Jumlah Ragam *Sambandha*

Prasasti *sīma*, *jayapattra*, dan „sengketa pajak“ berbeda jenis satu sama lain, karena peristiwa yang diabadikan juga berbeda. Pada prasasti *sīma*, bagian *sambandha* merupakan inti dari prasasti tersebut, karena pada bagian *sambandha* berisi latar belakang peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Djafar, 1990: 31). Hal tersebut memiliki arti bahwa pada prasasti *sīma* ada banyak aspek yang dapat terlihat hanya dari bagian *sambandha*, namun apakah hal yang sama juga berlaku bagi prasasti selain *sīma*, yaitu prasasti *jayapattra* dan „sengketa pajak“. Berikut merupakan tabel yang menguraikan aspek-aspek yang terlihat dari masing-masing jenis prasasti.

Tabel 5 Jenis Prasasti dan Aspeknya

No.	Nama Prasasti	Tahun Śaka	Jenis Prasasti	Aspek dalam <i>Sambandha</i>
1.	Ayam Tēas I	822	<i>Sīma</i>	Ekonomi
2.	Taji	823	<i>Sīma</i>	Agama
3.	Luitan	823	„sengketa pajak“	Ekonomi
4.	Kayu Ara Hiwang	823	<i>Sīma</i>	Agama
5.	Rongkab	823	<i>Sīma</i>	Lingkungan
6.	Watukura I	824	<i>Sīma</i>	Agama
7.	Panggumulan I	824	<i>Sīma</i>	Agama
8.	Telang I	825	<i>Sīma</i>	Agama dan Lingkungan
9.	Ketanen	826	<i>Sīma</i>	Agama

10	Rumwiga II	827	„sengketa pajak“	Ekonomi
11	Poh	827	<i>Sīma</i>	Agama
12	Kubu Kubu	827	<i>Sīma</i>	Politik
13	Palepangan	828	„sengketa pajak“	Ekonomi
14	Kandangan	828	<i>Sīma</i>	Agama
15	Mantyasih I	829	<i>Sīma</i>	Politik, Keamanan, dan Agama
16	Sangsang	829	<i>Sīma</i>	Agama
17	Guntur	829	<i>Jayapattra</i>	Hukum
18	Bhaṭārī	829	<i>Sīma</i>	Agama
19	Rukam	829	<i>Sīma</i>	Agama, Lingkungan, dan Keamanan
20	Kinēwu	829	„sengketa pajak“	Ekonomi
21	Wanua Tengah III	830	<i>Sīma</i>	Agama dan Politik
22	Kaladi	831	<i>Sīma</i>	Keamanan
23	Tulañan	832	?	Keamanan
24	Wukajana	-	<i>Sīma</i>	Agama

Berdasarkan klasifikasi pada tabel di atas, *sambandha* yang terdapat pada prasasti *sīma* lebih banyak ragamnya dibanding dengan *sambandha* yang terdapat pada prasasti *jayapattra* maupun prasasti „sengketa pajak“. Aspek yang terlihat pada prasasti *sīma* lebih bermacam-macam. Pada prasasti *sīma*, *sambandha* ditemukan dalam 5 aspek yaitu aspek keagamaan, aspek politik, aspek lingkungan, aspek keamanan, dan aspek ekonomi. Pada *sambandha* prasasti pajak, hanya aspek ekonomi yang dapat terlihat. Begitu juga dengan prasasti *jayapattra*, aspek hukum menjadi satu-satunya aspek yang terlihat.

Hal tersebut mungkin karena perbedaan kepentingan dan tujuan dari tiap-tiap jenis prasasti itu diturunkan, tergantung dari peristiwa yang melatarbelakanginya. Penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Sementara itu, hal lain yang dapat terlihat dari tabel 4 adalah, adanya prasasti-prasasti yang mempunyai lebih dari satu aspek dalam *sambandhanya*. Prasasti-prasasti tersebut adalah: Prasasti Telang I, Mantyasih I, Rukam, dan Wanua Tengah III.

3.3.3 Perbedaan dalam Hal Penganugerahan Prasasti

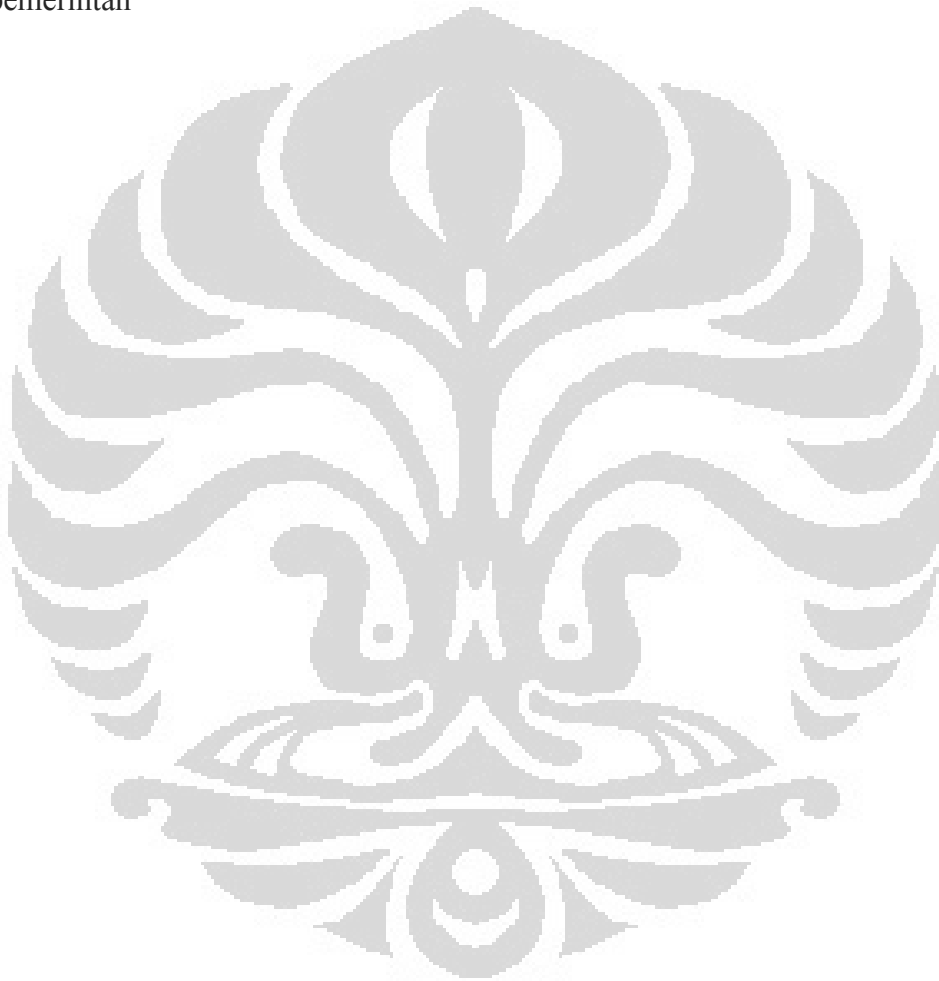
Prasasti merupakan anugerah yang diberikan oleh Raja atau seorang pejabat kerajaan. Dari *sambandha* yang ada juga dapat terlihat cara penganugerahan prasasti, misalnya dianugerahkan langsung oleh raja atau melalui pengajuan permohonan. Tabel 6 dan 7 menunjukkan bahwa status *sīma* tidak dapat diminta oleh seseorang. Memberikan status *sīma* atas sebuah wilayah sepertinya merupakan hak prerogatif seorang raja atau pejabat-pejabat tinggi kerajaan saja. Dari semua prasasti-prasasti Balitung khususnya *sīma*, tercatat satu prasasti yang dikeluarkan oleh seorang *pamegat*, empat prasasti dikeluarkan oleh *rakai*, dan selebihnya dikeluarkan oleh raja. Beberapa diantaranya raja mengeluarkan perintah bersama-sama dengan pejabat hino-nya yaitu Daksa.

Tabel 6 dan 7 masing-masing menunjukkan alur proses suatu keputusan berjalan hingga sampai ke tangan penerima. Tabel 6 menggambarkan birokrasi yang semakin lama semakin rendah, menunjukkan suatu perintah atas anugerah yang ingin diberikan. Tabel 7 menggambarkan sebaliknya yaitu suatu permohonan yang disampaikan kemudian diteruskan hingga ke hirarki yang paling tinggi. Tabel 6 merupakan alur proses prasasti *sīma*, sedangkan semua prasasti selain *sīma* yaitu *jayapatra* dan „sengketa pajak“ melalui proses yang terdapat pada Tabel 7.

Permohonan yang diajukan sangat jarang mendapatkan solusi berupa perubahan status tanah menjadi perdikan, seringnya hanya pengurangan pajak atas wilayah tersebut. Akan tetapi apabila rakyat mengajukan suatu permohonan, pemerintah memfasilitasi keinginan mereka dengan cara meninjau masalah mereka misalnya dengan cara melakukan pengukuran ulang terhadap lahan wajib pajak. Selain itu apabila keputusan telah diperoleh sesuai dengan keinginan pemohon, ternyata dapat diminta untuk ditarik kembali seperti kasus yang terjadi pada prasasti Rumwiga. Pejabat Desa Rumwiga memohon untuk pajak desanya dikurangi akan tetapi setengah tahun kemudian memohon untuk dikembalikan seperti sebelumnya, kedua permohonan tersebut dikabulkan oleh raja.

Hal yang menarik adalah pada masa sebelum pemerintahan Balitung, yaitu masa pemerintahan raja Kayuwangi, kekuasaan masih bersifat desentralisasi. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Andriyati Rahayu dalam skripsi sarjananya.

Pejabat daerah masih memiliki kekuasaan yang besar untuk dapat mengeluarkan keputusan yang pada akhirnya diabadikan dalam prasasti. Hal tersebut ditunjukkan dengan hampir semua prasasti yang dikeluarkan pada masa Kayuwangi adalah atas perintah seorang penguasa watak. Semakin muda masanya pemerintahan mulai bersifat sentralisasi, dan penelitian ini mendukung pendapat tersebut karena pada tabel menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Balitung yang lebih umum dijumpai adalah keputusan yang dibuat oleh raja dan pemerintah pusat.



Tabel 6 Struktur Birokrasi Ketika Perintah Diturunkan

No.	Prasasti	Th. Śaka	Pemberi Perintah/ Anugerah	Penerima Perintah	Pelaksana Perintah	Penerima Anugerah
1.	Ayam Tēas I	822	Śri Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Dharmmodaya Mahāsambhu	Rakryān Mapatiḥ i Hino Pu Bāhubajra Pratipakṣakṣaya, Rake Halu Pu Saṅgramadurandhara, Rake Sirikan Pu Marawikranta, Rake Wka Pu Bhaswara, Rake Pagarwsi Pu Wirawikrama, Rake Bawaṅ Pu Manglawan, Samgat Tiruan Pu Śiwāstra, Maṅhuri Pu Cakra, Wadihati Pu Dapit, Makudur Pu Sāmwrda.		Tanah-tanah sima di Ayam Teas.
2.	Taji	823	Śri Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Balituṅ.	Rakryān di Watutihang bernama Pu Saṅgrāma Dhurandara.	Rakryān di Watutihang.	Kebun-kebun di Desa Taji.

3.	Kayu Ara Hiwang	823	Rake Wanua Poḥ bernama Dyah Śala putra dari [wka] Sang Ratu Bajra penduduk desa di Pariwutan.	-	-	Desa di Kayu Ara Hiwang.
4.	Rongkab	823	Pamegat Umanggit bernama Pu Parwatta.			Kepala Desa di Rongkab.
5.	Watukura I	824	Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituḥ Śrī Iśwarakeṣawotsawatuṅga.	Rāmanta di Watukura.	Rāmanta di Watukura	-
6.	Panggumulan I	824	Rakryān di Wantil bernama Pu Pālaka, penduduk desa Wuatan Sugih yang termasuk wilayah Puluwatu.	-	-	Bhaṭāra dan Bhaṭārī di Kinawuhan.
7.	Ketanen	826	Rakryān Lañja.	-	-	Kabikuan di <i>simajaran</i> .
8.	Poh	827	Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balituḥ Śrī Dharmmodayamahāsambhu.	Rakryān Mapatih i Hino dan Rakai Wwatan.	-	Sang Hyang Caitya untuk kesejahteraan Silunglung.
9.	Kubu kubu	827	Śrī Mahārāja Rakryan Watukura Dyah Balituḥ.	Ḍapunta Mañjāla dan sang Manghambin, Sang Diha, sang Dhipa, dan Ḍapu Hyang Rupin.	Ḍapunta Mañjāla dan sang Manghambin, Sang Diha, sang Dhipa, dan Ḍapu	Rakryān Hujung Dyah Mangarak dan Rakryān Matuha Rakai Majawuntan.
10.	Telang	825	Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituḥ Śrī	Rake Wlar Pu Sudarsana.		Desa di Telang dan di Mahe...

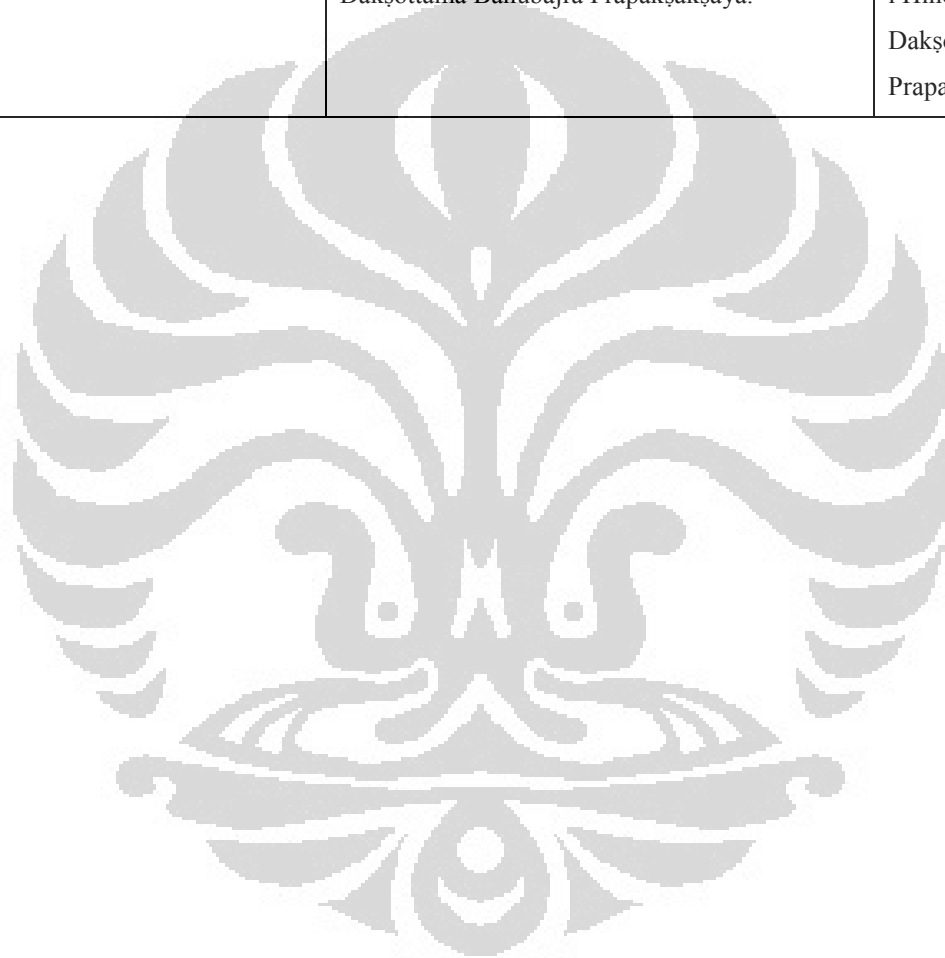
			Dharmmodaya Mahāsambhu Śrī Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣakṣaya.			
11.	Kandangan	828	Rakryān di Wungkal Tihang bernama Pu Wirawikrama.	-		-
12.	Mantyasih I	829	Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyaḥ Balituṅ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu.	Rakarayān Mapatih i Hino, Halu, Sirikan, Wka, Halaran, Tiruan, Palarhyaṅ, Maṅhūri, Wadihati, Makudur.		5 orang Patih.
13.	Sangsang	829	Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyaḥ Balituṅ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu.	Rakryān Mapatih di Hino Pu Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣakṣaya.		Samgat Lamwa bernama Pu Layang untuk kepentingan Wihara.
14.	Bhaṭārī	829	Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣakṣaya.	-		Bangunan suci.
15.	Rukam	829	Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Balituṅ Śrī Dahrmmodaya Mahāsambhu.	Māhamantrī Śrī Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣakṣaya.		Desa Rukam.
16.	Wanua Tengah III	830	Sri Maharaja dan Rakryan Mahamantri.	Rakryān Limwayan bernama Dyaḥ Guṇa dan Ḍaṅ Ācāryya di Tūk	Rakryān Limwayan bernama Dyaḥ Guṇa dan Ḍaṅ Ācāryya di Tūk	Bihara di Pikatan.

				bernama Dhāneśwara.	bernama Dhāneśwara.	
17.	Kaladi	831	Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Balituḅ Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu.	Rakryān Mapatiḥ i Hino Pu Dakṣottama Bahubajrapratipakṣāksaya.	Rakryān Bawaḅ Dyaḥ Śraḥwāṇa.	
18.	Wukajana	-	Śrī Mahārāja Rakai Watukura.	-	-	Bihara di Dalinan.

Tabel 7 Struktur Birokrasi Ketika Permohonan Diajukan

No.	Prasasti	Th. Śaka	Pelapor/ Penerima Anugerah	Pihak yang Menerima Pengaduan	Pemberi Anugerah/ Keputusan
1.	Luitan	823	Penduduk Desa Luitan	Rakryān Mapatih i Hino.	Rakryān Mapatih i Hino.
2.	Rumwiga II	827	Kepala Desa Rumwiga seluruh penduduk.	Samgat Momahumah, (yaitu Samgat) Mamrati yang bernama Pu Uttara dan Rakryān Wuṅkaltihaj Pu Wirawikrama, Rakryān ri Hino Mahāmantri Śrī Dakṣottama Bāhubajra Pratipakṣaksaya.	
3.	Palepangan	828	Para <i>rāma</i> di Palēpaṅan	Rakryān Mapatih i Hino Pu Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣaksaya.	Rakryān Mapatih i Hino Pu Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣaksaya
4.	Guntur	829	-	-	Samgat Pinapan.
5.	Kinwu	829	Kepala Desa Kinwu.	1. Rakryan i Randaman bernama Pu Wama. 2. Samgat Momahumah.	Śrī Mahārāja Watukura Dyah Balitun Śrī Išwara Keśawasamarotunga dan Mahāmantri Śrī Dakṣottama Wajrabāhupratipakṣaksaya
6.	Tulangan	832	Dyah Wurut	Śrī Mahārāja Rakai Galuh Dyah Mukha Śrī Dharmmodaya Mahāsambu dan Rakryan Mahāmantri i Hino Dyah	Śrī Mahārāja Rakai Galuh Dyah Mukha Śrī Dharmmodaya Mahāsambu dan Rakryan Mahāmantri

			Dakṣottama Bāhubajrā Prapakṣakṣaya.	i Hino Dyaḥ Dakṣottama Bāhubajrā Prapakṣakṣaya.
--	--	--	-------------------------------------	---



3.4 Isi *Sambandha*

Seperti yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya bahwa *sambandha* memiliki banyak sekali ragamnya. Pada bagian ini akan diuraikan apa saja isi *sambandha* yang ditemukan pada prasasti-prasasti masa Balitung.

3.4.1 Pembuatan Bangunan Suci

Sambandha yang memiliki isi seputar pembuatan bangunan suci pada masa Balitung terdapat pada tiga prasasti. Prasasti-prasasti tersebut adalah prasasti Taji, Watukura I, dan Telang I.

Prasasti Taji yang berangka tahun 823 Śaka memberikan keterangan bahwa pada bulan Caitya hari Rabu tanggal 2 paro gelap, sebuah bangunan suci telah dibangun di atas lahan milik tujuh orang penduduk yang bersama-sama memberikan tanah mereka kepada Rama di Taji bernama Pu Saṅgrāma Dhurandara. Pembangunan bangunan suci ini dilakukan di atas sebuah tanah kebun-kebun milik tujuh orang penduduk setempat. Mereka bersama-sama memberikan tanah mereka kepada Rama di Taji sebagai wakaf untuk membangun bangunan suci. Bangunan suci yang dibangun adalah Kabikuan Dewasabha.

nāhan mataṅya sinusuk de rakryān ginawai kabikuan. naran nikanan kabikuan ing dewasabhā (Taji: 6-7)

Artinya:

itulah sebabnya lalu dibatasi oleh Rakryān dijadikan Kabikuan, yaitu Kabikuan Dewasabha.

Luas tanah hasil wakaf dari tujuh orang penduduk Desa Taji tersebut adalah seluas $112 \times 93 \text{ } \dot{d}pa \text{ sihuā}^2$.

ukurnya lamwēan waitan paṅidulnya. ḍpa sihuā 93 kidul paṅabaratnya ḍpa sihuā 112 kabarat paṅalornya ḍpa sihuā 93 lor paṅawetanya ḍpa sihuā 112. (Taji: 2-3)

² *ḍpa* adalah nama satuan panjang. Satu *ḍpa* = jangkauan saat kedua belah tangan direntangkan. *ḍpa sihuā* = jarak antara telapak kaki hingga ujung jari kiri atau kanan bila diangkat ke atas. Perbandingan antara *ḍpa* : *ḍpa sihuā* = 1,5 : 1. (Zoetmulder, 2006: 210; Darmosoetopo, 1997: 433)

Artinya:

Ukurannya batasnya di Timur sampai ke Selatan 93 *dpa sihuā*, di Selatan sampai ke Barat 112 *dpa sihuā*, di Barat sampai ke Utara 93 *dpa sihuā*, di Utara sampai ke Timur 112 *dpa sihuā*.

Menurut Boechari 1 *dpa* sama dengan 1,6 meter masa sekarang (Boechari, 1981: 78). Perbandingan antara *dpa* : *dpa sihuā* adalah 1,5 : 1 (Darmosoetopo, 1997: 433). Berdasarkan ukuran dan perbandingan tersebut, maka 1 *dpa sihuā* setara dengan 1,1 meter. Dengan begitu total luas tanah yang digunakan untuk pembangunan Kabikuan Dewasabha adalah 12.603,36 m² atau 12,6 km². Dari luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun bangunan suci tersebut, dapat dibayangkan besarnya bangunan suci yang akan dibangun. Dengan luas tersebut memungkinkan dugaan bahwa bangunan suci yang akan dibangun adalah sebuah candi. Paling tidak merupakan bangunan suci untuk umum yang mampu menampung banyak umat pada saat beribadah.

Prasasti Watukura I yang berangka tahun 824 Śaka menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 paroterang bulan Srawana, raja memberikan sejumlah uang secara langsung kepada Ramānta di Watukura untuk melaksanakan upacara *sīma*. Upacara *sīma* tersebut dimaksudkan sebagai upacara untuk pembangunan *Dharmma Pañasthūlan*³.

tatkāla mahārāja rake watukura dyah balituṅ. Śrī iswarakesawotsawatuṅga. maweḥ pañīma. mā. kā 1. i rāmanta i watukura. parṇnaḥ dharmma pañasthūlan ri sira. (Watukura I lempeng Ib: 2-4)

Artinya:

Ketika Mahārāja Rake Watukura Dyah Balituṅ Śrī Iswarakesawotsawatuṅga memberikan uang untuk melaksanakan upacara *sīmasebesar* 1 *kāti* uang emas kepada Rāmanta di Watukura, diperuntukkan bagi Dharmma Pangasthūlan kepadanya.

Kemudian prasasti Telang yang berangka tahun 827 Śaka, peristiwa yang termuat pada prasasti Telang adalah bahwa raja Balitung kembali membangun

³ *Pañasthūlan* : tempat turunnya dewa dan tempat pemujaan kepada dewa (Zoetmulder, 2006: 1127).

bangunan suci dengan memerintahkan Rake Wlar Pu Sudarsana, tujuannya adalah melaksanakan nazar raja yang telah meninggal dan diperdewakan di Śataśrṅga.

kumon rake wlar pu sudarśana sumiddhākna sot haji dewata lumāḥ ing śataśrṅga. magawaya kamalir mu [...] aḥ [...]ij paparahuan ri huwus nikananḡ gawai rakai wlar kamalir 1 kamulān 3. (Telang I: 2-3)

Terjemahan:

Memerintahkan Rake Wlar Pu Sudarsana untuk melaksanakan nazar raja yang diperdewakan di Śataśrṅga membuat bangunan suci dan [...] di Paparahuan sesudah itu Rake Wlar membuat sebuah bangunan suci, 3 buah *kamulān*.

Sayangnya hingga saat ini siapa tokoh yang dimaksud yang juga terdapat pada prasasti Poh tahun 827 Śaka „*maharaja sang lumah ij śataśrṅga*“ belum dapat diidentifikasi (Soemadio, ed., 2009: 171).

Dari ketiga prasasti tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa pada masa Balitung pernah dilakukan pembuatan bangunan suci sebanyak tiga buah bangunan suci. Bangunan suci tersebut yaitu Kabikuan Dewasabha yang dibangun di Desa Taji, Dharmma Pañasthūlan, dan sebuah bangunan suci yang tidak diketahui namanya hanya disebut dengan kata *kamalir* sebagai nazar raja yang telah disemayamkan di Śataśrṅga.

Berdasarkan bangunan suci yang telah dijelaskan di atas, diketahui bahwa satu bangunan suci berlatarkan agama Buddha yaitu Kabikuan Dewasabha. *Kabikuan* adalah tempat suci umat agama Buddha, asal katanya adalah *biku* yaitu pendeta agama Buddha. Sedangkan *dharmma pañasthūlan* yang disebut pada prasasti Watukura I belum diketahui apa nafas keagamaan yang melatarbelakanginya. Istilah *dharmma pañasthūlan* merupakan istilah yang masih umum dan tidak menunjuk pada salah satu agama. Istilah *pañasthūlan* berasal dari kata dasar *sthū* yang artinya dewa, *pañasthūlan* berarti tempat turunya dewa dan tempat pemujaan kepada dewa (Zoetmulder, 2006: 1127). Demikian juga dengan *kamalir* yang dalam kamus bahasa Jawa Kuna hanya diartikan sebagai bangunan suci namun tidak menyebutkan bangunan suci untuk umat agama apa.

3.4.2 Pemeliharaan Bangunan Suci

Suatu bangunan suci memerlukan biaya pemeliharaan, biaya untuk keperluan pemujaan dan biaya rutin lainnya. Sebuah bangunan suci biasanya mempunyai sumber dana pokok dan sumber dana tambahan, sumber dana pokok ialah *sawah dharmma* sedangkan sumber dana tambahan berasal dari tanah *sīma* (Darmosoetopo, 1997: 313). Dalam suatu keberlangsungan bangunan suci seperti halnya dana pokok saja tidak mampu mencukupi biaya perawatan dan pemeliharaan, oleh karena itu kemudian banyak dari bangunan suci yang diahugerahi tanah *sīma* sebagai sumber dana penunjangnya. Ada kalanya penetapan *sīma* untuk pembangunan bangunan suci sekaligus menetapkan sebuah desa lain agar menjadi sumber pemeliharaannya, seperti pada prasasti Taji yang memperingati sebuah pembangunan Kabikuan Dewasabha sekaligus menetapkan sawah seluas 1 *lamwit*⁴ sebagai *sīma kabikuan*⁵.

Pada masa Balitung rupanya banyak bangunan suci yang semula tidak memiliki tanah *sīma* sebagai dana tambahan namun pada akhirnya dianugerahi dikemudian hari. Oleh karena pemberian tanah *sīma* baru dilakukan kemudian, maka letak tanah *sīma* dan bangunan suci yang dianugerahi biasanya terletak tidak dalam satu desa. Lain halnya dengan Kabikuan Dewasabha dan *sīmakabikuan*-nya yang sama-sama terletak di desa Taji.

Terdapat sembilan anugerah *sīma* yang dikeluarkan atas alasan pemeliharaan bangunan suci, yaitu dengan cara mempersembahkan sebidang tanah yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bangunan suci tersebut. Apabila diketahui dari subbab sebelumnya bahwa prasasti Balitung hanya mencatat tiga pembuatan bangunan suci selama masanya, maka mungkin pemeliharaan bangunan-bangunan suci yang dilakukan adalah kepada bangunan suci warisan dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bangunan-bangunan suci yang kemudian mendapat tanah *sīma* adalah bangunan suci yang sebelumnya tidak berdiri di atas tanah *sīma*, oleh

⁴ *Lamwit* adalah satuan luas tanah.

⁵ *Sīma kabikuan* berarti *sīma* milik *kabikuan* atau bangunan keagamaan. Hasil dari tanah *sīma* tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan kesejahteraan *kabikuan* tersebut.

karena itu kemudian diberikan *sīma* punpunan atau tanah penunjang di kemudian hari.

Bangunan-bangunan suci yang mendapatkan anugerah *sīma* dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis berikut ini:

Tabel 8 Bangunan Suci yang Diberikan Tanah *Sīma*

Jenis Bangunan Suci	Nama Bangunan Suci	Jumlah
Bangunan Pendharmaan	Silunglung	1
Bangunan Peribadatan	Bhatara/ Bhatari	2
	Wihara	3
	Parhyangan	3

Pada tabel tersebut terlihat bahwa bangunan suci yang diberikan tanah *sīma* sebagai tanah penunjangnya secara keseluruhan berjumlah sembilan buah. Satu bangunan suci pendharmaan dan yang paling banyak adalah bangunan suci untuk peribadatan yaitu sebanyak delapan buah.

a. Bangunan Pendharmaan Nenek Moyang

Raja sekali lagi memberikan perhatian terhadap orang yang telah meninggal, bila sebelumnya raja melaksanakan nazar raja terdahulu dengan membangun bangunan suci, kali ini ia menetapkan 3 daerah berupa satu desa dan dua dusunnya untuk dijadikan *sīma* bagi kesejahteraan *silunglung* dari orang yang telah meninggal dan didharmakan di Pastika.

kumonnakan ikanan wanua i poh muan nanaknya wanua ri rumasan. ring nyū. kapwa watak kiniwan. sūsukan. ... paknānyan sinusuk muan kalaanya sīmā san hyan caitya mahaywa silunluṅ san dewata san lumāh pastika.
(Poh: 2-3)

Artinya:

Memerintahkannya kepada desa di Poh dan dusunnya (anak wanua) di Rumasan, di Nyū, semuanya termasuk wilayah Kiniwang, untuk dibatasi ... jika dibatasi dengan pejabat Kalangnya untuk dijadikan *sīmabagi* Sang Hyang Caitya untuk kesejahteraan Silunglung dari orang yang diperdewakan di Pastika.

Orang yang telah meninggal dan diperdewakan di Pastika '*saṅ dewata saṅ lumāḥ pastika*' juga sering dijumpai dalam prasasti-prasasti masa Kayuwangi. Terdapat sebuah asumsi bahwa orang tersebut diperkirakan merupakan kakek dari permaisuri raja Balitung. Nini Haji Rakai Wwatan pu Tamer disebut bersama dengan Rakryan Mapatih i Hino pu Daksa pada prasasti Poh pada saat ingin menetapkan desa Poh sebagai *sīma* untuk mengelola bangunan silunglung bagi '*saṅ dewata saṅ lumāḥ pastika*'. Mungkin sekali Rakai Wwatan pu tamer adalah nenek dari pu Daksa, dan karena pu Daksa juga diperkirakan adalah adik ipar dari Balitung, maka orang yang diperdewakan di Pastika merupakan kakek dari pu Daksa sekaligus dari permaisuri raja. (Soemadio, ed., 2009: 172)

b. Bangunan Peribadatan

Perintah agar suatu daerah dijadikan *sīma* agar menunjang kesejahteraan bangunan suci diturunkan baik oleh raja maupun pejabat daerah. Pada prasasti Panggumulan I yang berangka tahun 824 Śaka, pembatasan *sīma* dilakukan oleh satu keluarga yaitu seorang Rakai bernama pu Palaka beserta istri dan ketiga orang anaknya.

tatkāla rakryān i wantil pu pālaka anakwanua i wwatan sugiḥ watak wulakan. muaṅ nānakwi nira dyah prasāda. muaṅ anak sira katiga pu palaku. pu gowinda. pu waṅi tamuy manusuk śīmā wanua i paṅgumulan watak puluwatu hop kabikuanya ... paknānyan sinusuk punyā nira śīmā bhaṭāra muaṅ bhaṭārī i kinawuhan. (Panggumulan I: 1-4)

Artinya:

Pada waktu itu Rakryān di Wantil pu Pālaka, penduduk desa Wwatan Sugiḥ yang termasuk wilayah Wulakan, dengan istrinya Dyah Prasāda, serta ketiga anaknya: pu Palaku, pu Gowinda, pu Waṅi Tamuy, membatasi *sīma* desa Paṅgumulan yang termasuk wilayah Puluwatu termasuk

kabikuannya... Tujuannya membatasi *sīma* yaitu sebagai jasa mereka (bagi) *bhaṭāra* dan *bhaṭārī* di Kinawuhan.

Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai *bhatara* dan *bhatari* di Kinawuhan, namun sepertinya ada kaitannya dengan Kabikuan yang terletak di wilayah Puluwatu yang dijadikan *sīma*. Keluarga Pu Palaka tampaknya adalah penganut agama Buddha, karena mereka ingin menunjukkan bakti mereka kepada dewa-dewi yang ada di Kinawuhan dengan cara memberikan status *sīma* pada sebuah desa yang di dalamnya berdiri sebuah Kabikuan.

Anugerah *sīma* untuk pemeliharaan bangunan suci juga terdapat pada prasasti Sangsang yang berangka tahun 829 Śaka. Prasasti Sangsang menceritakan bahwa raja menganugerahkan desa Sangsang sebagai *sīma punpunan* dari sebuah wihara di Hujung Galuh.

sambandhānya kinon sumusuka ikananṅ wanua wuara kuṭi i hujung galuh watak lamwa ya ta pinuliḥ samgat lamwa pinahayu nira jina yyakan nira wihāra ya sambandhānya rinanugrahān kinon sumusuka ikananṅ wanua i saṅsan simā punpunnana nikananṅ wihāra gawai nira. (Sangsang: 1-6)

Artinya:

Alasan diperintah (agar) desa (Sangsang) dijadikan *sīma* ialah, adapun kuti yang terletak di Hujung Galuh dari watak Lamwa diperbaiki oleh Samgat Lamwa (dan) ditambah dengan wihara agar megah. Itulah sebabnya (ia) dianugerahi untuk menetapkan desa Sangsang menjadi *sīma punpunan* bagi wihara yang dibuatnya.

Wihara tersebut dibangun oleh Samgat Lamwa yang bernama Pu Layang untuk memperbesar sebuah Kutu yang terletak di wilayah kekuasaannya yaitu Hujung Galuh. Sepertinya raja merasa senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Pu Layang oleh sebab itu raja menghadihkannya dengan sebuah desa berstatus *sīma* untuk menunjang keberlangsungan wihara tersebut.

Bangunan suci lain yang juga mendapatkan tanah *sīma* adalah sebuah bihara di Pikatan. Peristiwa tersebut diceritakan dalam Prasasti Wanua Tengah III yang berangka tahun 830 Śaka.

umuwahakna ikananṅ sawah i wihāra i pikatan (Wanua Tengah III: 9-10)

Artinya:

Memberikan sawah tersebut (menjadi *sīma*) kepada bihara di Pikatan.

Sawah *sīma* yang diperuntukkan bagi bihara di Pikatan rupanya pernah dicabut dan diteguhkan berulang kali pada masa sebelum Balitung. Bihara tersebut sebenarnya dibangun pada masa pemerintahan raja Panangkaran (668-706Ś) oleh Rahyangta i Hara. Bihara tersebut kemudian diberi sawah *sīma* yang terletak di desa Wanua Tengah yang masih termasuk dalam watak Pikatan. Pada waktu Rakai Warak Dyah Manara (725-729 Ś) status *sīma* terhadap sawah di Wanua Tengah tersebut dicabut. 39 tahun kemudian yaitu pada saat pemerintahan Rakai Garung (750-768 Ś) sawah tersebut kembali diteguhkan menjadi sawah *sīma* untuk bihara di Pikatan. Akan tetapi ditahun yang sama rupanya terjadi pergantian kepemimpinan oleh Rakai Pikatan Dyah Saladū (768-777 Ś) dan sawah *sīma* di Wanua Tengah III untuk kedua kalinya kembali dicabut. Sejak itu sawah *sīma* di Wanua Tengah tersebut tidak pernah dikukuhkan lagi hingga lima kali pergantian kekuasaan yaitu pemerintahan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala (naik pada tahun 777 Ś), Dyah Tagwas (naik pada tahun 806 Ś), Rakai Panumbangan Dyah Dawendra (naik pada tahun 807 Ś), Rakai Gurunwangi Dyah Badra (naik pada tahun 808 Ś), dan Rakai Wungkal Humalang (naik pada tahun 816 Ś). Hingga akhirnya Balitung menjadi raja, sawah *sīma* di Wanua Tengah ditetapkan lagi untuk bihara yang ada di Pikatan. (Darmosoetopo, 1997: 185-187)

Satu lagi bihara yang mendapatkan tanah *sīma* terdapat dalam prasasti Wukajana yang sayangnya tidak diketahui angka tahunnya. Bihara yang dimaksud terletak di Dalinan, dan tidak hanya mendapatkan satu tanah *sīma* saja melainkan tiga tanah yang ada di tiga desa. Tiga desa tersebut yaitu Wukajana, Tumpang dan Wuru yang dibatasi untuk menjadi *sīma punpunan* bagi bihara yang berada di Dalinan.

ajña haji pañanugraha śrī mahārāja rakai watukura i samgat kalañ wuñkal pu layañ sumusuka ikanañ wanua i wukajana i tumpang i wuru tlu sīmā punpunana nikanañ bihāra i dalinan gawai nira (Wukajana: 7-8)

Artinya:

Perintah raja pemberi anugerah adalah Śrī Mahārāja Rakai Watukura kepada Samgat Kalaj Wuṅkal bernama Pu Layaṅ membatasi desa tersebut yang di Wukajana, di Tumpang, di Wuru 3 *sīmā punpunan* untuk bihara di Dalinan yang dibuatnya.

Selain bihara, bangunan suci berupa parhyangan juga pernah diberikan tanah *sīma* pada masa Balitung. Keterangan tersebut diperoleh dari prasasti Kayu Ara Hiwang yang berangka tahun 823 Śaka, prasasti Kandangan yang berangka tahun 828 Śaka, dan prasasti Rukam yang berangka tahun 829 Śaka.

Sebuah *parhyangan* pada tahun 833 Śaka dianugerahi sebuah daerah *sīma* oleh Rake Wanua Poh yang bernama Dyah Sala, yaitu desa Kayu Ara Hiwang yang termasuk ke dalam watak Watutihang.

Rake wanua poh dyah śala wka saṅ ratu bajra anak wanua i pariwutan sumusuk ikanan wanua i kayu ara hiwan watak watu tihan ṣaguha ... katika kataganya ... gagānya ityewammādi sapinasuknikanan wanua i kayu ara hiwan sinusuk rake wanua poh sīmāni parhyaṅan (Kayu Ara Hiwang: 1-3)

Terjemahan:

Rake Wanua Poh (bernama) Dyah Śala, putra dari [wka] Sang Ratu Bajra penduduk desa di Pariwutan, membatasi desa di Kayu Ara Hiwang yang masuk wilayah Watutihang itu semuanya yang termasuk desa di Kayu Ara Hiwang, dibatasi oleh Rake Wanua Poh, sebagai *sīmā* dari Parhyangan.

Prasasti Kandangan memuat keterangan bahwa Desa Kandangan dan sebuah dusun di Er Hijo yang masuk wilayah Wungkal Tpat dijadikan *sīma* untuk *Parhyaṅan* di Prasāda yang masuk wilayah Patāpan.

tatkāla nikanan wanua i kaṅḍanan muan anaknya ri wanua i e hijo watu wuṅkal tpat śīmā ni parhyaṅan prasāja watak patapān (Kandangan: 4-7)

Artinya:

Ketika itu desa di Kaṅḍanan dan dusun di er hijo yang masuk wilayah Wungkal Tpat dijadikan *sīma* untuk *Parhyaṅan* di Prasāda yang masuk wilayah Patāpan.

Sedangkan parhyangan yang disebutkan oleh prasasti Rukam adalah sebuah parhyangan yang berada di Limwuṅ. Desa yang dijadikan *sīma* adalah

desa Rukam, pendapatan Desa Rukam diberikan untuk pemeliharaan parhyangan yang ada di Limwuṅ.

paṅguḥhannya pirak dhā 5 pilih mas mā 5 marā i parhyaṅan i limwuṅ
(Rukam: 3)

Artinya:

Pendapatan daerah Rukam yang berjumlah 5 dharana perak dan 5 māsa pilih mas, supaya diberikan pada *parhyaṅan* yang terletak di Limwuṅ.

Ada lagi satu prasasti yang memberikan keterangan mengenai pembatasan suatu wilayah untuk menjadi tanah *sīma* bagi bangunan suci yaitu prasasti Bhatari tahun 829 Śaka.

knanyan sinusuk sīmā bhatārī ta ... pa ri -īnanira sa (Bhatari: 3)

Artinya:

Tujuan pembatasan (tanah itu) ialah untuk dijadikan *sīmabagi* (bangunan suci) untuk Bhatārī.

Pada prasasti tersebut sayangnya kurang jelas apa jenis bangunan suci yang dimaksudkan.

3.4.3 Penghormatan terhadap Agamawan

Tidak hanya bangunan suci yang selalu menjadi perhatian saat penganugerahan status *sīma* diberikan, rupanya orang-orang yang berkecimpung dalam urusan keagamaan pun juga turut diperhatikan. Pada prasasti Ketanen yang berangka tahun 826 Śaka, perhatian tersebut ditunjukkan dalam bentuk memperluas sawah *sīma* di daerah *sīma* milik para pendeta. Prasasti ini memberikan keterangan kepada kita bahwa pada tanggal 826 Śaka bulan Asuji, sawah *sīmajaran* dari sebuah Kabikuan diperluas oleh Rakryān Lañja. Kutipan dari prasasti Ketanen yang menyebut bagian *sambandha* tersebut adalah sebagai berikut:

rakryan lañja ri inanan wadwa rakryān paṅamwah sawaha simājaran diwadda simajñaya ikānaṅ kabikuan i simājaran māryya ya umasō saṅ

hyang dawuḥhan i pamwatan parnahan tu śīma irikananḥ dharmma haji kataḡaran muanḥ wyakāraḥa (Ketanen: 1-4)

Artinya:

Rakryān Laḡja wadwa rakryān memperluas sawah *śīma* untuk Kabikuan di *śīmajaran* (pendeta) ketika perintah untuk menjadikan *śīma* untuk Kabikuan di *śīmajaran* (pendeta) diperuntukkan bagi sang Hyang Dawuhan di pamwatan berkaitan dengan *śīma* dari *Dharmma Haji* di Katanggaran dan Wyakāraḥa.

Istilah *śīmajaran* pembentukan yang sama seperti *śīma kajurugusalyan* yang berarti “*śīma* dari pemimpin para pandai besi atau pandai logam pada umumnya”. Kata ajaran dalam hal ini berasal dari kata ajar yang sebagai kata kerja dapat berarti „bertekun mengenai sesuatu” atau „belajar”, sedangkan kata bendanya berarti „guru” dan sudah pasti guru pada masa itu berkaitan dengan masalah keagamaan. (Sedyawati, 1985: 436-437)

Tampaknya kabikuan yang disebutkan dalam prasasti Ketanen selain berfungsi sebagai tempat peribadatan juga merupakan tempat untuk menuntut ilmu agama. Kabikuan tersebut mempunyai sawah yang difungsikan sebagai penunjang kehidupan, dan kemudian prasasti Ketanen memperingati sawah tersebut diperluas. Meskipun hasil dari perluasan sawah tersebut tetap dipergunakan untuk kabikuan, namun pemilihan istilah *śīmajaran* daripada *śīma kabikuan* dalam prasasti Ketanen, menimbulkan kesimpulan bahwa para ajar atau pendeta yang bersangkutan dengan kabikuan tersebut yang mendapatkan perhatian.

Perhatian yang diterima oleh para pendeta bisa saja dalam bentuk kehidupan yang semakin sejahtera ataupun tempat tinggal yang semakin nyaman. Kabikuan dapat berarti juga „tempat tinggal para wiku” yang memusatkan perhatian kepada hal-hal kejiwaan setelah meninggalkan dunia ramai, dan disana mereka dapat langsung menjadi contoh bagi orang-orang yang ingin belajar (Sedyawati, 1985: 437). Ketika sawah *śīma* untuk kabikuan diperluas, maka kabikuan mendapatkan sumber dana yang lebih banyak, dan pendeta juga ikut merasakan manfaatnya karena pendeta-pendeta tersebut tinggal di kabikuan tersebut.

3.4.4 Penghargaan terhadap Hal yang Berkaitan dengan Ibadah

Prasasti Mantyasih I memiliki *sambandha* lebih dari satu, salah satunya merupakan aspek keagamaan yaitu raja menganugerahi tanah *sīma* bagi kelima patih karena mereka tidak pernah lalai dalam melakukan pemujaan kepada Bhatara setiap tahun.

lain sañke kapūjān bhaṭāra i malaṅkuśeśwara. ing pūteśwara. i kutusan. i śilābhédéswara. i tuleśwara. ing pratiwarṣa (Mantyasih I: 6)

Terjemahan:

Selain itu juga melakukan pemujaan kepada *Bhaṭāra* di Malaṅkuśeśwara, di Pūteśwara, di Kutusan, di Śilābhédéswara, di Tuleśwara, setiap tahun.

Patih merupakan pejabat tinggi kerajaan yang biasanya membawahi beberapa pejabat yang lebih rendah. Pemujaan yang dilakukannya mungkin dengan cara ikut mengerahkan bawahan-bawahan serta rakyat agar beribadah bersama di Malaṅkuśeśwara, Pūteśwara, Kutusan, Śilābhédéswara, dan Tuleśwara. Sehingga tempat-tempat ibadah di Malaṅkuśeśwara, Pūteśwara, Kutusan, Śilābhédéswara, dan Tuleśwara menjadi ramai tiap tahunnya oleh umat dan membuat raja menjadi senang melihatnya.

3.4.5 Pernikahan Raja

Prasasti Mantyasih I menyebutkan tentang adanya pernikahan raja. Prasasti ini merupakan prasasti *sīma* yang memperingati anugerah Śrī Mahārāja kepada 5 orang patih atas beberapa jasa yang telah mereka lakukan dan salah satunya adalah melakukan *buatthaji* pada saat pesta pernikahan raja berlangsung.

samwandhayan inanugrahān sañkā yan makwaiḥ buatthaji iniwōnya i śrī mahārāja. kāla ni warānan haji. (Mantyasih I: 5-6)

Artinya:

Alasannya (mereka) dianugerahi karena mereka berlima telah banyak melakukan *buatthaji* sebagai (tanda) kecintaan kepada Śrī Mahārāja ketika pesta pernikahan raja.

Dalam karangannya yang berjudul “De naam Dharmawangsa”, Poerbatjaraka mengatakan bahwa raja yang memiliki gelar *abhiseka* yang mengandung unsur *dharmma* berarti naik tahta karena perkawinan dengan

seorang putri raja. Kalau pendapat itu benar maka seharusnya Balitung tidak berhak atas tahta kerajaan, yang berhak adalah Daksa, sedangkan ia baru berkuasa setelah Balitung. (Wurjantoro, 2003)

Sayangnya tidak disebutkan di dalam prasasti dengan siapa raja menikah, sehingga sampai saat ini masih menjadi dugaan apakah wanita yang dinikahinya adalah yang mengantarkan ia menduduki tahta kerajaan Mataram Kuno. Meskipun demikian, adanya berita pernikahan raja dalam prasasti tetap merupakan data penting karena tidak pernah dijumpai sebelumnya ada raja yang menyinggung mengenai pernikahannya pada sebuah prasasti.

3.4.6 Perang

Pada saat Balitung naik memimpin Mataram Kuno, rupanya pernah terjadi peperangan dengan Bantan sebagai pihak lawan. Hal ini terungkap dalam prasasti Kubu-Kubu tahun 827 Śaka Perang melibatkan dua orang pejabat kerajaan sebagai eksekutornya atas perintah Sang Mapatih. Penyerangan tersebut berakhir pada kemenangan di pihak sendiri. Atas keberhasilan mengalahkan Bantan, tanah tegalan milik kedua pejabat yang telah membawa kemenangan tersebut yaitu Rakryān Hujung Dyah Mangarak dan Rakryān Matuha rakai Majawuntan dianugerahi status *sīma* oleh raja.

*alah pwa ikaj bantan de nira. nāhan mataj nyār arpanaḍahakēnya.
anugraha i śrī mahārāja.* (Kubu Kubu: IVa: 5 & IVb: 1)

Artinya:

Kalahlah Bantan itu olehnya. Itulah sebabnya kemudian diturunkannya anugerah oleh Śrī Mahārāja.

Meskipun masih belum dapat diketahui apa dan dimana letak Bantan, akan tetapi dari perang yang dimenangkan mungkin saja kerajaan sedang ingin meluaskan kekuasaan. Kerajaan Mataram Kuno berkembang sejak permulaan abad ke-8 sampai awal abad ke-10, dengan pusatnya di daerah Mdang di wilayah Poh Pitu, dan pada masa itu Balitung Mataram Kuno mencapai puncak kejayaannya, dan pengaruh kekuasaannya meliputi daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur (Wurjantoro, 2003: 1). Saat ditemukan, prasasti Kubu-Kubu sudah

menjadi koleksi seseorang yang tinggal di Malang, Jawa Timur, sehingga tidak diketahui tempat asal penemuannya.

Apabila pemiliknya yang semula memang mendapatkannya dari daerah di sekitar Malang, maka besar kemungkinan prasasti tersebut memang berasal dari daerah Jawa Timur saat ini. Sehingga pada saat prasasti Kubu-Kubu dikeluarkan, kerajaan Mataram Kuna sudah meluas hingga Jawa Timur dan Bantan adalah daerah yang ada di Jawa Timur.

3.4.7 Silsiah

Prasasti Wanua Tengah III, berisi keterangan tentang status *sīma* yang berkali-kali dicabut dan diberikan kembali, namun tidak pernah diubah lagi pada masa raja-raja sesudah Dyah Gula. Hanya saja pada tahun 830 Śaka pada masa Balitung, kedudukan *sawah haji* sabagai *sīma* untuk kepentingan *bihara* di pikatan diperkuat lagi (Soesanti: 1992/1993: 12). Hal ini dilakukan tampaknya agar sri maharaja tetap teguh berkedudukan di keratonnya. Seperti yang ter kutip pada lempeng II.b baris ke-8 prasasti tersebut: „*yathānyan mapagēha paluṅguh śrī mahārāja ing kaḍatwan*“ artinya: hal ini dimaksudkan supaya kedudukan Śrī Mahārāja di keraton menjadi kokoh⁶.

Pada prasasti Wanua Tengah III dan prasasti Mantyasih I keduanya menyebutkan nama-nama tokoh sebelum Balitung. Penyebutan nama-nama tokoh ini mungkin bertujuan sebagai perwujudan legitimasi terhadap kedudukannya atas kerajaan Mataram Kuna. Akan tetapi perwujudan legitimasi ini ditunjukkan melalui cara yang berbeda. Di dalam prasasti Mantyasih I ditunjukkan melalui penghormatannya kepada leluhur yang pernah memerintah di kerajaan Mataram, sehingga bersifat pengesahan terhadap keturunan, sedangkan Wanua Tengah III ditunjukkan dengan penghormatannya kepada bihara di Pikatan, sehingga bersifat agamis atau religius (Dwiyanto, 1986: 107-108).

3.4.8 Pembuatan Sarana Penyeberangan

Salah satu nazar dari raja yang dimakamkan di Śataśrngga adalah pembuatan tempat penyeberangan, pasak atau tiang untuk menambatkan perahu,

⁶ Alihaksara oleh Riboet Darmosoetopo, 1997: 395-417.

perahu dan perahu cadangan. Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitung Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu kemudian melaksanakan nazar itu dan memerintahkan agar Desa Tlang, Mahe, dan Desa Paparahuan dijadikan *sīma*. Mungkin tempat yang dimaksud adalah tempat tambatan bagi perahu yang menghubungkan kedua tepi sungai untuk menaikkan atau menurunkan penumpang setiap hari tanpa dipungut biaya, maka sebagai gantinya ketiga desa tersebut dijadikan daerah perdikan.

*kinon umaparṇnākna ikaṇaṅ wanua i tlaṅ muaṅ ing mahewusan
makakmitan ikaṇaṅ kamulān muaṅ parahu. umantassakna saṅ mahawān
pratidina (Telang I: 4- 5)*

Terjemahan:

Disuruh memberi hadiah kepada desa di Tlang dan di Mahewusan memelihara bangunan suci dan Parahu, untuk menyeberangkan orang yang lewat setiap hari.

Pembuatan sarana penyeberangan tersebut bisa dikatakan merupakan salah satu perhatian pemerintah dalam bidang ekonomi. Orang yang menyeberang pastilah orang yang berkepentingan untuk datang ke daerah-daerah di seberang sungai, sehingga sangat mungkin mayoritas yang menggunakan sarana penyeberangan adalah para pedagang. Kegiatan perdagangan didukung oleh raja dengan membebaskan pajak penyeberangan kepada 3 desa yaitu Desa Telang, Mahe, dan Paparahuan. Para pedagang yang membawa barang dagangan dari satu desa ke desa lain yang terletak berseberangan dapat memakai jasa tersebut untuk dapat menjangkau desa yang terletak di seberang sungai⁷. Pembuatan penyeberangan tersebut juga merupakan upaya memajukan pendapatan regional dengan cara mendatangi desa-desa yang sebelumnya mungkin sulit untuk dijangkau.

3.4.9 Penghidupan Lahan Hancur

⁷ Titi Surti Nastiti dalam sebuah seminar yang berjudul „DAS Bengawan Solo, Wonogiri: Hubungannya dengan Prasasti Tēlaṅ (904 M)“.

Desa Rukam pernah hancur oleh letusan gunung berapi. Desa yang hancur tersebut kemudian dijadikan daerah perdikan bagi neneknya raja yaitu Rakryān Sañjīwana.

kumonnakan ikanan wanua i rukam wanua wanua i jro sanjā yan hilanj de ning guntur simān rakryān sañjīwana nini haji (Rukam: 2)

Artinya:

Memerintah agar desa Rukam yang termasuk *wanua i jro*, yang telah hancur oleh letusan gunung dijadikan *simā* bagi neneknya raja yaitu Rakryān Sañjīwana.

Desa yang telah hancur tersebut kemudian dihidupkan kembali atas perintah raja karena nantinya apabila Desa Rukam telah pulih dan memberi hasil, raja memerintahkan agar hasil tersebut supaya diberikan untuk bangunan suci yang ada di Limwuṅ. “*paṅguhannya pirak dhā 5 pilih mas mā 5 marā i parhyaṅan i limwuṅ buñcaṅ hajya nya umiwia ikanan kamulān*” (Pendapatan daerah Rukam yang berjumlah 5 dharana perak dan 5 māsa pilih mas, supaya diberikan pada *parhyaṅan* yang terletak di Limwuṅ: sebagai *buñcaṅ hajinya* adalah kewajiban memelihara *kamulān*).

Prasasti lain yang juga memuat keterangan mengenai desa yang hancur adalah prasasti Rongkab. Pada tahun 823 Śaka sang Pamegat Umanggit yang bernama Pu Parwatta mengabulkan permohonan kepala desa di Rongkab untuk memiliki seorang hamba (*katik*).

tatkāla nikanan rāma i roṅkab winaiḥ mamuputta katik praṅa 1 de san pamagat umanggit pu parwatta. sanjā ri nāsa ni wanwanya maṅsa.
(Rongkab: 2-3)

Terjemahan:

Ketika Kepala Desa di rongkab diijinkan mempunyai hamba jumlahnya 1 orang oleh sang Pamegat Umanggit bernama Pu Parwatta, karena kehancuran desanya.

Permohonan tersebut sepertinya diajukan karena desa Rongkab sedang mengalami kehancuran karena suatu alasan dan desa tersebut membutuhkan tenaga dalam bentuk *katik* untuk membangun kembali desanya yang telah hancur.

3.4.10 Keresahan Penduduk

Pada prasasti Mantyasih I raja menganugerahkan status *sīmapada* kelima patihnya karena mereka telah mengamankan jalan di Desa Kuning karena penduduk di desa tersebut ketakutan.

muaṅ saṅkā yan antarālika katakutan ikaṅaṅ wanua ing kuning. sinarabhārānta ikaṅaṅ patih rumakṣā ikaṅaṅ hawān. nahan mataīyan iṅanugrahākan nikaṅaṅ wanua kālih irikaṅaṅ patih. (Mantyasih I: 6-7)

Terjemahan:

Dan karena ada perubahan menjadi rasa ketakutan penduduk desa di Desa Kuning, Patih itu dipercayai menjaga jalan, itulah sebabnya kedua desa tersebut dianugerahkan kepada Patih.

3.4.11 Pengalihfungsian Lahan

Sebuah hutan menimbulkan keresahan kepada masyarakat baik siang maupun malam hari karena adanya gangguan Mariwuṅ. Hutan tersebut kemudian dirubah fungsinya menjadi sawah agar penduduk tidak merasa ketakutan lagi.

sambandha ikaṅaṅ Imah ing gayām. muaṅ ing pyapya. hlat gūnanta kamulanya. alas arāṅaṅ katakutan. tamolaḥ pahabētan de ning mariwuṅ, dhurmurbalākēn ikaṅ banyāga muaṅ hilirān ring rahina ring kulēm. kunēḅ yathānyan ubhayaguna ikaṅaṅ alas dadyā sawah lāwan māryya katakutan (Kaladi Ib: 2-5)

Artinya:

Alasannya tanah di Gayam dan di Pyapya terhalang untuk tempat pemujaan karena hutan Arangan menyebabkan ketakutan, desa terpukul karena ulah Mariwuṅ, menyebabkan kecemasan diantara perdagangan dan penangkap ikan pada siang dan malam hari. Oleh karena itu diusahakan agar hutan itu dijadikan sawah dan hilanglah rasa ketakutan.

3.4.12 Masalah Seputar Pajak

Prasasti Luitan, Rumwiga II, Palepangan, Kinwu, dan Ayam Tëas I dikeluarkan dengan alasan yang berkaitan dengan ekonomi khususnya pajak. Prasasti Luitan, Palepangan, dan Kinwu menceritakan peristiwa yang hampir sama, yaitu kesulitan membayar pajak yang dialami oleh rakyat karena luas tanah mereka tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang seharusnya. Pada prasasti Luitan, para pejabat Desa Luitan menghadap Rakryan Mapatih i Hino untuk mengadukan masalah mereka bahwa mereka tidak sanggup membayar pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka kemudian memohon kepada Rakryan Mapatih i Hino dan Rakryan Pagarwesi untuk melakukan pengukuran kembali sawah-sawah mereka. Setelah diukur dengan menggunakan tampah standar, apa yang semula dianggap 1 tampah ternyata memang lebih sempit dari ukuran tampah yang seharusnya. Maka permohonan para pejabat Desa Luitan dikabulkan yaitu agar sawah mereka ditetapkan seluas 1 lamwit dan 7 tampah serta katik 4 orang, dengan demikian petugas pajak daerah Kapung telah mencari keuntungan dari pajak yang semestinya dibayar oleh penduduk. (Boechari, 1981: 74-75)

*anak wanua i luītan watak kapuḥ manamwah i rakryān mapatih i hino
umajarakan parḥaḥ nikananḥ sawah kmitanya tan wnaḥ maḥisī uddhāra.
saṅkā ri hōt nikananḥ sināṅguh satampah* (Luitan: 1-2)

Terjemahan:

Pada waktu itu penduduk Desa Luītan yang termasuk wilayah Kapuḥ berdatang sembah kepada Rakryān Mapatih i Hino, mengadukan bahwa sawah yang dikerjakannya tidak sanggup memenuhi bagian (yang diwajibkan), karena sempitnya yang dianggap satu *tampah*.

Pada Rumwiga II memuat keterangan bahwa pada tahun 827 Śaka, hari Jumat Legi tanggal 1 paro terang bulan Śrawana, para rama di Desa Rumwiga bersama-sama dengan seluruh penduduk Desa Rumwiga memohon agar pajaknya dikembalikan kepada keadaan semula sebelum dikurangi yaitu perak 4 *kati* 6 *dharana* dan 14 *masa* dalam setahun. Hal yang terjadi adalah pada sekitar setengah tahun yang lalu atau tepatnya 7 bulan yang lalu, bulan Posya tahun 826 Śaka, para ramanta di Desa memohon agar pajak di Desa Rumwiga dikurangi menjadi 4 kati perak dalam setahun. Seperti yang termuat pada prasasti Rumwiga

II, permohonan tersebut dikabulkan oleh raja⁸. Akan tetapi hanya berlangsung 7 bulan (Posya-Śrawana), pejabat dan para penduduk di Desa Rumwiga memohon agar pajak desanya dikembalikan seperti semula.

Hanya dalam kurun waktu 7 bulan warga desa tersebut sudah menghadap pemerintah lagi untuk mengajukan permohonan. Meskipun mereka mendapat pengurangan pajak sebesar 265,32 perak, namun mereka harus membayar kepada pejabat-pejabat lebih besar dari pajak itu sendiri.

maminta inanugrahān mapasaṅ gunuṅan pirak kā 4 muanṅ pilih masnya sāmas ring satahil satahun ku ... jari samwah nikanan rāma sinanmata sankā ri parikṣṇanya (Rumwiga II: 4 & 10)

Artinya:

Mohon dianugerahi ketentuan membayar pajak setahunnya 4 kāti perak dan pilih masnya 400 māsa setiap kali membayar pajak ... maka permohonan para pejabat desa itu dikabulkan, karena kemunduran desanya.

Kasus pada prasasti Palepangan serupa dengan apa yang terjadi pada prasasti Luitan, para pejabat desa di Desa Palepangan berselisih paham dengan Bhagawanta Jyotisa yang merupakan seorang Nayaka pada waktu itu. Perselisihan mereka karena sang nayaka menghitung sawah mereka sebagai 2 lamwit dan mereka diwajibkan membayar pajak sebanyak 6 dharana perak untuk tiap tampahnya. Padahal sebenarnya sawah mereka kurang dari 2 lamwit, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan oleh sang Nayaka. Kemudian mereka mengadukan masalah mereka kepada Rakryan Mapatih i Hino agar sawah mereka diukur dengan satuan tampah kerajaan. Setelah diukur ulang ternyata sawah para pejabat desa Palepangan hanya 27,5 tampah yang semula seluas 40 tampah. Hal itu berarti sebelumnya sang Nayaka

⁸ *tatkāla rāmanta i rumwiga umandēh paṅguhha nni wanua nira. umāri ta yan hinanyan mamuat awaknya. ring māgha saṅ saṅnan wtua ni pamuatnya piṅḍa pamuatnya ri satahun pirak kāti 4.* (Rumwiga I: 1-3)

Artinya:

Ketika pejabat-pejabat di desa Rumwiga mengurangi pendapatan dari desanya. Mereka tidak lagi dinilai setiap menyerahkan pajak mereka yang dikeluarkan setiap bulan Magha dan sangsan. Jumlah pajaknya setahun 4 kati perak. (Alih aksara dan alih bahasa oleh Kanya Suhita dalam Skripsi sarjana)

akan memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebanyak 75 dharana. (Boechari, 1981: 74)

samwandhanya saṅkā i tan patūt nikananṅ rāma lawan saṅ nayaka bhagawanta jyotisa ikananṅ sawahṅnya sinaṅguḥ lamwit 2 kinon ta ya modharā. pirak dhā 6 i satampah satampah. kunanṅ saṅkā rihötnya tan wnanṅ modhāra (Palepangan: 2-4)

Terjemahan:

Adapun sebabnya karena para rāma tidak setuju terhadap sang Nayaka Bhagawanta Jyotisa bahwa sawahnya dihitung 2 lamwit luasnya dan dikenai pajak 6 dhāraṅna uang perak setiap tampah. Karena sempitnya maka para rāma tidak sanggup membayar pajak.

Masalah pajak juga terdapat pada prasasti Kinwu, akan tetapi penyelesaiannya berbeda dengan yang terjadi pada prasasti Luitan dan Palepangan. Para rama di Desa Kinwu yang termasuk wilayah Randaman tidak sanggup membayar pajak sebanyak pajak yang telah ditetapkan yaitu katik 28 orang dan gawai 8 masa, karena sawah mereka dihitung seluas 6 lamwit dan 3 tampah. Kemudian merek menghadap Rakryan i Randaman Pu Wama ntuk memohon izin memperluas sawah mereka. Setelah melalui birokrasi yang panjang, akhirnya permohonan mereka dikabulkan oleh raja yang menetapkan bahwa para rama di Kinwu memiliki sawah 6 lamwit dan harus menyerahkan katik 12 orang dan gawai 6 masa. (Boechari, 1981: 75)

sambhandhanyann-inanugrahān mūla sawah katajyanan kmitakan nikananṅ rāma lamwit 6 tampah 3 kadik 28 gawai 8 kunanṅ saṅkāri durbbala nikananṅ rāma i kinwu tan wnanṅ umijilakan drabya haji (Kinwu Ia: 5-7)

Terjemahan:

Alasan penganugerahan mūla sawah Katjyanan yang dilindungi oleh kepala desa seluas 6 lamwit, 3 tampah, 28 katik, 8 gawai karena menyebabkan kesulitan bagi kepala desa di Kinwu tidak bisa membayar pajak.

Pada dasarnya setiap kali status *sīma* dikeluarkan, secara otomatis akan berdampak terhadap pajak bagi kerajaan maupun bagi daerah yang dianugerahi *sīma* tersebut. Dengan kata lain setiap prasasti *sīma* pasti menyangkut aspek

ekonomi di dalamnya, yaitu pengalokasian dana yang semula harus disetorkan kepada kerajaan menjadi dialokasikan untuk hal yang berbeda-beda. Umum ditemui dalam prasasti *sīma* keterangan tentang desa yang akan ditetapkan menjadi daerah *sīma* disebutkan penghasilannya sekian dan gawainya (kerja bakti) sekian⁹. Pada kasus prasasti *sīma* yang dianugerahkan untuk bangunan suci, biasanya dana tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan bangunan suci, perbaikan, upacara dan lain sebagainya. Meskipun tidak seluruhnya terbebas dari pajak, akan tetapi setiap kali ada penambahan status *sīma* maka akan mengurangi pemasukan kerajaan.

Ada sebuah prasasti dari masa Balitung yang isinya mengatur ulang ketentuan pajak terhadap tanah *sīma* sebelumnya. Prasasti Ayam Teas I berisi perintah raja yang memerintahkan agar seluruh desa *sīma* di Ayam Teas membatasi usaha perdagangan di tempat itu.

kumonnakan soāra ning wanua sīma i ayam tēas hinghingnana ikanay masamyawahāra hanaṅkāna anuṅ tan knā de saṅ manilala (Ayam Tēas: 6-7)

Terjemahan:

Memerintahkan seluruh desa *sīmadi* Ayam Tēas batasanya usaha perdagangan di tempat itu yang tidak dipungut oleh pejabat yang memungut pajak untuk raja.

Usaha-usaha yang dibatasi yang disebutkan pada prasasti Ayam Teas antara lain perdagangan atau *masamyawahara* dan usaha kerajinan atau *misra* berikut ini:

1. Pemimpin dari kelompok para pedagang tidak melebihi 3 *tuhān*.
2. Para pedagang ternak dibatasi jumlah hewan ternaknya, yaitu kerbau 20 ekor, sapi 40 ekor, kambing 80 ekor, dan itik 1 kandang.
3. Para pengusaha gerobak atau pedati jumlahnya dibatasi hanya 3 *pasang*.
4. Para pembuat perhiasan jumlahnya dibatasi hanya 3 *lumpang*.

⁹ Misalnya pada Prasasti Panggumulan I: ... *manusuk sīma wanua i paṅgumulan watak puluwatu hop kabikuanya gawai mā 4 sawah kanayakān tampah 7 katik 1 patilek niṅ alas pirak mā 1...* (membatasi *sīma* desa Paṅgumulan yang termasuk wilayah Puluwatu termasuk kabikuannya, yang mempunyai kewajiban kerja bakti 4 *masā*, sawah para *nāyaka* (seluas) 7 *tampah* 1 *katik* dan *patilek* dari hutan 1 *māsa* perak)

5. Para pedagang yang membawa barang-barang dagangan dengan cara dipikul maksīmal hanya boleh 5 *bantal* dalam satu pikulnya.
6. Para pandai emas, tembaga, perunggu dan besi hanya dibatasi 1 *ububan* saja.
7. Para pengusaha kain tenun, jumlah alat tenun yang diperbolehkan hanya 4 buah saja.
8. Perahu yang digunakan untuk mengangkut barang dagangan dibatasi 3 *sunghara*, dan perahu yang memakai geladak 1 tingkat dibatasi 2 *sunghara*.

Apabila semua usaha tersebut berjumlah lebih dari ketentuan diatas maka akan dikenai pajak.

3.4.13 Persidangan

Prasasti Guntur merupakan satu-satunya prasasti pada masa Balitung yang diketahui satu-satunya memperingati hasil keputusan atas masalah hukum yang terjadi pada masa itu. Pada prasasti Guntur diceritakan pada tahun 829 Śaka hari Rabu Pon tanggal 12 paro terang, pu Tabwel yang merupakan penduduk Desa Guntur diinterogasi oleh Samgat Pinapan pu Gawul dan istrinya yang bernama pu Gallam karena ada pengaduan dari seseorang yang bernama Sang Dharmma penduduk Desa Wurakung. Sang Dharmma menagih hutang kepada pu Tabwel sebanyak 1 suwarna emas, namun ternyata hutang tersebut bukan hutangnya melainkan hutang istri pu tabwl yang bernama Si Campa. Si Campa telah meninggal dunia, oleh karena itu Sang Dharmma menagihnya kepada pu Tabwel. Hasil dari persidangan menyatakan bahwa Pu Tabwēl tidak bersalah karena ia tidak mengetahui perihal hutang istrinya, dan sang Dharmma sebagai pihak penuntut tidak hadir pada saat persidangan.

tatkāla ni pu tabwēl anagbanua ing guntur punpunaning wihāra garuṇ pinariccheda guṇadoṣa nira de samggat pinapanpu gawul muaṇ saṇ anakabwi pu gallam wanua i puluwatu. sambandha nikaṇ guṇadoṣa. hana saṇ dharmma nara nya bapa ni maṇhampig saṇkāri wurakuṇ ya ta tumagiḥ pu tabwēl tinagihakanya mas su 1, nda tan hutāṇ pu tabwēl ya hutāṇ saṇ anakbwi. makaṇaran si campā. wuaṇ sānak saṇ dharmma. pajjaḥ pua si campā. tinagiḥ ta pu tabwēl de saṇ dharmma. ndā tan hanānak ni pu tabwēl muaṇ si campā. nuniweḥ yar wruha rikaṇ hutāṇ ya ta mataṇyan tka ri samagat

pinapan ndā tan tka saṅ dharma rikaṅ pasamayān ya matānyan inalaha ka ta ya de samagat pinapan (Guntur: 1-8)

Terjemahan:

Ketika Pu Tabwël penduduk Desa Guntur milik bangunan suci di Garung diperkarakan oleh Samgat Pinapan yang bernama Pu Gawul dan istrinya bernama Pu Gallan dari Desa Puluwatu, sebabnya ia diperkarakan, karena Sang Dharma namanya bapak dari Manghapig dari Desa Wurakung yaitu menagih kepada Pu Tabwël hutangnya sebesar 1 suwarna uang emas. Pu Tabwël tidak mempunyai hutang, hutang itu hutang istrinya yang bernama Si Campa, kepada saudaranya Sang Dharmma. Si Campa kemudian meninggal ditagihlah Pu Tabwël oleh Sang Dharma, apalagi Pu Tabwël tidak mempunyai anak dengan Si Campa, lebih-lebih ia tidak mengetahui mengenai hutang istrinya, itulah sebabnya datang tuntutan dari Samgat Pinapan. Dalam persidangan Sang Dharma tidak hadir, itulah sebabnya ia dikalahkan oleh Samgat Pinapan.

Hingga saat ini belum ditemukan naskah hukum yang berasal dari zaman Mataram Kuna, namun tidak berarti Kerajaan Mataram Kuna tidak menggunakan kitab-kitab hukum dalam menangani persoalan hukum pada saat itu. Dari prasasti tersebut setidaknya dapat diketahui gambaran persidangan dan kinerja hukum yang berlaku pada zaman Mataram Kuna. Hasil keputusan yang serupa dengan prasasti Guntur juga ditemukan dalam prasasti *jayapatra* dari masa sesudah Balitung yaitu prasasti Wurudu Kidul (844 Śaka). Dalam prasasti Wurudu Kidul, Sang Pamariwa digugat oleh Sang Dhanadi namun Sang Pamariwa tidak datang dalam persidangan meskipun sudah diperintahkan untuk datang hingga dua kali. Akhirnya Sang Pamariwa juga dikalahkan dalam persidangan. (Soemadio, ed., 2009: 259)

3.5 Aspek-Aspek dalam *Sambandha*

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada subbab 3.3, isi dari *sambandha-sambandha* yang ada dalam prasasti-prasasti masa Balitung dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek yang tergambar di dalamnya.

Tabel 9 Aspek-Aspek yang Terdapat dalam *Sambandha*

No.	<i>Sambandha</i>	Banyaknya	Aspek	Jumlah
1.	Pembuatan Bangunan Suci	3	Agama	14
2.	Pemeliharaan Bangunan Suci	9		
3.	Penghormatan thd. Agamawan	1		
4.	Apresiasi thd. Hal Ibadah	1		
5.	Sengketa Pajak	4	Ekonomi	6
6.	Kebijakan Pajak	1		
7.	Pembuatan Penyeberangan	1		
8.	Perang	1	Politik	3
9.	Pernikahan Raja	1		
10.	Silsilah	1		
11.	Penanggulangan Kejahatan	2	Keamanan	3
12.	Pengalihfungsian Lahan	1		
13.	Penghidupan Lahan Hancur	2	Lingkungan	2
14.	Persidangan	1	Hukum	1

Berdasarkan tabel di atas, aspek yang paling sering dijumpai adalah aspek agama sebanyak 14 peristiwa, kemudian aspek ekonomi sebanyak enam peristiwa, aspek politik sebanyak tiga peristiwa, aspek keamanan sebanyak dua peristiwa, serta aspek lingkungan dan hukum yang masing-masing hanya sebanyak satu peristiwa.

BAB 4

DINAMIKA SOSIAL-BUDAYA PADA MASA BALITUNG

Berdasarkan prasasti, Balitung naik tahta memimpin Kerajaan Mataram Kuna pada tahun 820 Śaka. Keterangan tersebut justru bukan didapat dari prasasti pertamanya yang berangka tahun sama, melainkan dari prasasti Wanua Tengah III yang baru raja Balitung keluarkan pada tahun 830 Śaka¹⁰. Prasasti paling tua pada periode ini yang dapat memberikan informasi peristiwa pada masa pemerintahan Balitung adalah prasasti Ayam Teas I yang berangka tahun 822 Śaka. Sebelum tahun 822 Śaka hanya dijumpai prasasti Telahap (820 Śaka) yang diduga merupakan prasasti pertama dari masa pemerintahan Balitung, namun prasasti ini telah hilang dan dari acuan kertasnya yang berumur sudah sangat tua hanya didapat informasi mengenai unsur penanggalannya saja oleh Damais (Wibowo, 1964:150).

Pada Bab III, *sambandha* dari prasasti-prasasti Balitung telah diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang terlihat di dalamnya. Pada bab ini, kurun waktu pemerintahan Balitung yang berlangsung selama sekitar 13 tahun akan dibagi menjadi tiga periode untuk melihat dinamika yang terjadi selama pemerintahannya. Periode pertama yaitu dari tahun 820- 824 Ś, periode kedua dari tahun 825- 828 Ś, dan periode terakhir dari tahun 829- 832 Ś. Pertama, tiap periode akan dibicarakan berdaŚakan masing-masing aspek untuk melihat bagaimana perkembangan setiap aspek tersebut pada setiap periode. Kedua, masing-masing dari semua aspek yang ada akan disusun berdasarkan kronologi atau angka tahunnya dan dikelompokkan dalam tiga periode Balitung.

¹⁰ *iṅ śaka 820 jyeṣṭha māsa tithi pratipāda kṛṣṇa. tu po bu. wāra. irikā paṅḍiri śrī mahārāja rake watukura dyaḥ balituṅ śrī iswarakeśawotsawatuṅga rudramūrti. mahāmantrī nira rakryān i hino śrī dakṣottama bāhubajrapratipakṣakṣaya wiṣṇumūrti. (Wanua Tengah III, lempeng II.a: 5-6)*

Terjemahan:

Pada tahun 820 Śaka, bulan Jyeṣṭha, tanggal 1 paro gelap, hari Rabu Pon Tuglai, adalah saat ketika Śrī Mahārāja Rake Watukura Dyaḥ Balituṅ Śrī Iswarakeśawotsawatuṅga Rudramūrti naik tahta, Mahāmantrīnya adalah Rakryān I Hino Śrī Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣakṣaya Wiṣṇumūrti. (Darmosoetopo, 1997: 409-410)

4.1. Dinamika Tiap Aspek dalam tiap Periode

Dari *sambandha-sambandha* prasasti-prasasti masa Balitung, telah didapat setidaknya enam aspek yang menggambarkan peristiwa kesejarahan di dalamnya. Meskipun telah diperoleh hasil jumlah dari masing-masing aspek, namun belum diketahui bagaimanakah aspek tersebut terlihat dari tiga periode masa Balitung. Berikut akan masing-masing aspek tersebut akan dibagi ke dalam tiga periode untuk melihat dinamikanya selama 13 tahun masa pemerintahan Balitung.

4.1.1 Aspek Agama

Aspek agama merupakan aspek yang paling banyak dijumpai dalam isi *sambandha*, dari 24 prasasti Balitung yang dijadikan sumber data pada penelitian ini, sebanyak 14 prasasti menceritakan peristiwa keagamaan di dalamnya.

Tabel 10 Persentase Aspek Agama dalam Tiap Periode

Periode	Jumlah Aspek Agama	Persentase
Periode Awal (820-824 Ś)	4 dari 7 prasasti	57%
Periode Pertengahan (825-828 Ś)	4 dari 7 prasasti	57%
Periode Akhir (829-832 Ś)	6 dari 10 prasasti	60%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa aspek agama dijumpai pada tiap periode. Dari ketiga periode tersebut, persentase peristiwa keagamaan yang muncul sama-sama sebanyak 57%, yaitu empat dari jumlah prasasti yang sama yaitu tujuh prasasti. Sedangkan pada periode terakhir kita dapat melihat jumlah yang lebih besar dari jumlah kedua periode pertama, yaitu 60% atau enam aspek keagamaan dari 10 prasasti yang dikeluarkan. Tabel di atas memberikan kesimpulan bahwa dari awal hingga akhir masalah agama dan kehidupan religius selalu menjadi perhatian Balitung. Dari setiap periode, masalah keagamaan selalu

menempati lebih dari setengah keputusan yang diabadikan dalam prasasti dan bahkan jumlahnya meningkat pada tahun-tahun terakhir.

4.1.2 Aspek Ekonomi

Pada masa Balitung, aspek ekonomi menempati urutan kedua terbanyak yang muncul dalam *sambandha*, meskipun tidak mencapai setengah dari jumlah aspek agama. Aspek ekonomi berjumlah enam dari 24 prasasti yang diteliti.

Tabel 11 Persentase Aspek Ekonomi dalam Tiap Periode

Periode	Jumlah Aspek Ekonomi	Persentase
Periode Awal (820-824 Ś)	2 dari 7 prasasti	29%
Periode Pertengahan (825-828 Ś)	3 dari 7 prasasti	43%
Periode Akhir (829-832 Ś)	1 dari 10 prasasti	10%

Dari tabel di atas terlihat bahwa aspek ekonomi tidak muncul sebanyak aspek agama. Akan tetapi aspek ekonomi tetap muncul di setiap periode dan dengan fluktuasi yang berbeda-beda. Pada periode awal, aspek ekonomi muncul sebanyak 29% atau dua dari tujuh prasasti yang ada pada periode pertama. Jumlah bertambah pada periode pertengahan meskipun hanya sebanyak 43% atau tiga dari tujuh prasasti. Sedangkan periode terakhir justru berkurang menjadi hanya 10% atau satu dari 10 prasasti yang dikeluarkan pada akhir pemerintahan.

Apabila kembali kepada tabel klasifikasi yang ada pada Bab III, aspek ekonomi yang ada pada masa Balitung adalah satu mengenai ketetapan pajak, sedangkan lima lainnya adalah mengenai persengketaan pajak. *Sambandha* yang berisi peristiwa mengenai penetapan pajak terdapat pada periode pertama, setelah itu muncul satu peristiwa mengenai sengketa pajak. Peristiwa mengenai

persengketaan pajak muncul lagi dua kali pada periode pertengahan, dan satu kali pada periode terakhir. Hal tersebut memberikan

4.1.3 Aspek Politik

Aspek politik tidak banyak terlihat, hanya muncul sebanyak tiga kali dari 24 prasasti yang diteliti.

Tabel 12 Persentase Aspek Politik dalam Tiap Periode

Periode	Jumlah Aspek Politik	Persentase
Periode Awal (820-824 Ś)	0 dari 7 prasasti	0%
Periode Pertengahan (825-828 Ś)	1 dari 7 prasasti	14%
Periode Akhir (829-832 Ś)	2 dari 10 prasasti	20%

Dari tabel di atas terlihat bahwa aspek politik memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada aspek agama yaitu jumlah yang meningkat. Akan tetapi aspek politik tidak ditemukan pada setiap periode, pada periode pertama aspek politik tidak ditemukan dan baru ditemukan pada periode pertengahan meskipun hanya satu dari tujuh prasasti yang dikeluarkan. Jumlah tersebut bertambah pada periode terakhir yaitu sebanyak dua dari 10 prasasti yang dikeluarkan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kehidupan politik berjalan tenang pada awalnya, namun mulai bergejolak pada periode-periode selanjutnya. Hal tersebut memberikan asumsi bahwa adanya isu-isu politik yang cukup meresahkan Balitung sebagai raja. Karena pada dua prasastinya di periode terakhir adalah mengenai usaha-usaha legitimasinya sebagai raja.

4.1.4 Aspek Keamanan

Aspek keamanan berjumlah lebih sedikit dari jumlah aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Hanya tiga peristiwa yang menyangkut masalah keamanan dari 24 prasasti yang diteliti.

Tabel 13 Persentase Aspek Keamanan dalam Tiap Periode

Periode	Jumlah Aspek Keamanan	Persentase
Periode Awal (820-824 Ś)	0 dari 7 prasasti	0%
Periode Pertengahan (825-828 Ś)	0 dari 7 prasasti	0%
Periode Akhir (829-832 Ś)	3 dari 10 prasasti	30%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan hanya muncul di periode terakhir dengan jumlah tiga peristiwa dari 10 prasasti yang dikeluarkan pada periode tersebut. Sedangkan periode awal dan pertengahan, aspek keamanan belum muncul.

Aspek keamanan mungkin sekali berhubungan dengan aspek politik. Dilihat dari jumlahnya, keduanya sama-sama banyak muncul pada periode terakhir. Asumsinya adalah mungkin sudah terjadi semacam ketidakpercayaan dari rakyat. Masalah keamanan menjadi tidak stabil dengan banyaknya penjahat-penjahat yang mengancam kehidupan rakyat kecil. Banyaknya keluhan-keluhan seputar keamanan. Pemerintah dianggap tidak mampu menjaga keamanan bagi rakyatnya.

4.1.5 Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan muncul dengan jumlah yang lebih sedikit dari aspek keamanan yaitu sebanyak dua peristiwa dari 24 prasasti yang diteliti.

Tabel 14 Persentase Aspek Lingkungan dalam Tiap Periode

Periode	Jumlah Aspek Keamanan	Persentase
Periode Awal (820-824 Ś)	1 dari 7 prasasti	14%
Periode Pertengahan (825-828 Ś)	0 dari 7 prasasti	0%
Periode Akhir (829-832 Ś)	1 dari 10 prasasti	10%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang menyangkut masalah lingkungan muncul pada periode pertama dan terakhir dengan jumlah masing-masing satu dari tujuh prasasti pada periode pertama, dan satu dari 10 prasasti pada periode terakhir. Pada periode pertengahan tidak ditemukan adanya peristiwa yang membicarakan masalah lingkungan di dalamnya.

Dari peristiwa-peristiwa yang menyangkut masalah lingkungan yang ada, memberikan gambaran bahwa Balitung sangat peduli dengan alam dan lingkungannya. Ia membangun kembali desa-desa yang hancur karena bencana alam dan bahkan menganugerahi status *sīma*, dan juga mengabdikan permohonan kepemilikan seorang budak pada seorang kepala desa yang desanya hancur karena bencana.

4.1.6 Aspek Hukum

Jumlah yang mewakili aspek hukum merupakan jumlah yang paling sedikit dari semua aspek yang ada, yaitu hanya satu peristiwa yang muncul dari 24 prasasti.

Tabel 15 Persentase Aspek Hukum dalam Tiap Periode

Periode	Jumlah Aspek Hukum	Persentase
Periode Awal (820-824 Ś)	0 dari 7 prasasti	0%
Periode Pertengahan (825-828 Ś)	0 dari 7 prasasti	0%
Periode Akhir (829-832 Ś)	1 dari 10 prasasti	10%

Seperti yang terlihat pada tabel di atas bahwa aspek hukum merupakan satu-satunya aspek yang hanya muncul sekali sepanjang 13 tahun masa pemerintahan Balitung. Peristiwa yang menyangkut aspek hukum muncul pada periode terakhir. Periode awal dan pertengahan sama sekali tidak ada peristiwa yang menyangkut masalah hukum di dalamnya. Aspek tersebut merupakan peristiwa yang terdapat pada prasasti jayapatra, yaitu prasasti yang berisi keputusan hukum atau pengadilan.

Jumlah tersebut merupakan bukti kuat bahwa hal-hal persengketaan atau yang berbau hukum selalu dapat diselesaikan di tingkat watak tanpa harus membawanya ke persidangan. Hanya satu peristiwa yang membutuhkan media pengadilan sebagai jalan penyelesaiannya, dan hal tersebut terdapat pada prasasti Guntur yang merupakan satu-satunya prasasti *jayapatra* pada masa Balitung.

4.2 Dinamika Sosial-Budaya Masa Balitung

Berdasarkan jumlah prasasti dan aspek yang terkandung dalam *sambandha*, tiap periode memiliki perbedaannya masing-masing. Secara garis besar, prasasti paling banyak dikeluarkan pada periode terakhir. Selama masa pemerintahannya Balitung menganugerahkan status *sīma* disetiap tahun sejak tahun 822 hingga tahun 832 Śaka. Berdasarkan periode yang dibagi ke dalam tiga masa, masing-masing periode rata-rata mengeluarkan prasasti *sīma* dengan jumlah hampir sama.

Tabel 16 Prasasti yang Dikeluarkan berdasarkan Periode Pemerintahan

13 Tahun Masa Pemerintahan Balitung (820-832 Śaka)		
Periode Awal 820-824 Ś	Periode Pertengahan 825-828 Ś	Periode Terakhir 829-832 Ś
1. Ayam Teas I*	1. Telang*	1. Mantyasih I*
2. Taji*	2. Ketanen*	2. Sangsang*
3. Luitan	3. Rumwiga II	3. Guntur
4. Kayu Ara Hiwang*	4. Poh*	4. Bhaṭārī*
5. Rongkab	5. Kubu-Kubu*	5. Rukam*
6. Watukura I*	6. Palepangan	6. Kinwu
7. Panggumulan I*	7. Kandañan*	7. Wanua Tengah III*
		8. Kaladi*
		9. Tulanan
		10. Wukajana

Keterangan:

- * Prasasti *sīma*

Dari Tabel 17 terlihat bahwa secara umum prasasti banyak dikeluarkan pada periode terakhir pemerintahan Balitung, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan dua periode pertama. Kenyataan tersebut mendorong keingintahuan terhadap dinamika sosial-budaya yang terjadi pada masa Balitung. Hal tersebut tentu saja dengan melihat perkembangan alur tahun demi tahun berdasarkan prasasti yang dikeluarkan.

4.1 Periode Awal (820-824 Ś)

Dari kurun waktu 820 hingga 824 Śaka, anugerah paling banyak diberikan pada tahun 823 dan 824 Śaka. Berdasarkan *sambandha* yang dapat ditelaah, pada periode awal ini Balitung tercatat mengeluarkan tujuh prasasti dengan enam diantaranya merupakan prasasti *sīma*. Dari keenam prasasti yang memperingati penetapan status *sīma* atas sebuah daerah, pada periode awal ini daerah *sīma* paling banyak diperuntukkan bagi bangunan keagamaan. Hanya satu prasasti yang berupa prasasti „sengketa pajak“.

Pada tahun 822 Śaka bulan Posya tanggal delapan paro terang, dalam sebuah prasasti pertama yang menyebutkan Balitung sebagai raja, Balitung mengeluarkan perintah kepada 10 pejabatnya untuk membatasi ulang usaha-usaha di daerah-daerah *sīma* di Ayam Teas. Prasasti tersebut dikenal dengan nama prasasti Ayam Teas. Isinya berkaitan dengan ekonomi, karena tujuan dari pembatasan ulang usaha-usaha tersebut pada dasarnya adalah ingin menarik pajak terhadap usaha-usaha yang melebihi jumlah yang telah ditentukan. Ketetapan tersebut tidak hanya diberlakukan bagi satu daerah saja, melainkan semua daerah *sīma* yang terdapat di wilayah Ayam Teas. Para pedagang yang melewati daerah *sīma* di Ayam Teas dibatasi jumlahnya sekian tergantung dari jenis usahanya, apabila jumlahnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai pajak perdagangan atau *masamyawahara* maupun pajak kerajinan atau *misra*.

Terdapat dua kemungkinan yang terlihat dari keterangan tersebut. Pertama, di awal pemerintahannya Balitung ingin memperkokoh ekonomi kerajaan dengan menetapkan ulang pajak usaha di daerah-daerah *sīma* di Ayam Teas yang mungkin sebelumnya batas usaha di daerah tersebut tidak terlalu ketat. Kerajaan-kerajaan kuna mendapatkan penghasilan kerajaan salah satunya adalah dari penarikan pajak-pajak hasil bumi dan pajak usaha, meskipun suatu daerah telah dijadikan *sīma* kerajaan tetap memperoleh 1/3 dari hasil tersebut (Boechari, 1981: 67-71).

Landasan perekonomian yang kuat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi tahun-tahun ke depan pemerintahannya, atau karena ingin mengalihkan sumber pendapatan dari daerah lain untuk keperluan lainnya. Hal tersebut terlihat pada setiap tahun sesudahnya, yaitu penganugerahan status *sīma* dengan berbagai macam alasan. Kemungkinan kedua, pada saat itu kondisi kerajaan dan masyarakat dalam keadaan makmur, hasil pertanian melimpah, ternak-ternak berkembang biak dengan baik, dan hasil usaha kerajinan meningkat sehingga pajak usaha dinaikkan.

Dalam prasasti *sīma* biasanya menyebutkan mengenai ketentuan jenis barang dagangan dan kerajinan yang dibebaskan dari pajak dengan jumlah tertentu, sehingga apabila melebihi jumlah yang telah ditetapkan akan dikenakan pajak. Pendapat lain mengatakan bahwa pembatasan tersebut bertujuan untuk

mencegah berkumpulnya para pedagang di daerah *sīma* dan meninggalkan desa-desa biasanya untuk menghindari pajak. (Susanti, 1991: 104)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa saat sebuah daerah berubah status menjadi *sīma* maka pajak yang harus disetorkan kepada kerajaan menjadi berkurang dan dialihkan untuk hal lain yang menjadi alasan mengapa daerah tersebut dijadikan *sīma*. Pada periode awal ini ada empat desa yang mempengaruhi pemasukan kerajaan menjadi sedikit berkurang karena ditetapkannya empat desa tersebut menjadi daerah *sīma*. Desa-desa yang berubah status menjadi daerah *sīma* tersebut adalah Desa Taji di watek Dmung, Desa Kayu Ara Hiwang di watek Watutihang, Desa Panggumulan di Watek Puluwatu, dan Watukura. Kesemua daerah tersebut dibatasi karena alasan bangunan keagamaan.

Pada tahun 823 Śaka, dua desa dibatasi menjadi *sīma* yaitu Desa Taji dan Desa Kayu Ara Hiwang. Desa Taji yang masuk ke dalam watek Dmung dijadikan *sīma* karena akan dibangun Kabikuan Dewasabha dan sebuah sawah satu lamwit sebagai *sīma* punpunannya, sedangkan Desa Kayu Ara Hiwang yang berada di dalam watek Watutihang dibatasi menjadi *sīma* untuk bangunan suci (*parhyāṇan*).

Satu tahun kemudian yaitu pada tahun 824 Śaka, dua daerah kembali dibatasi untuk pembuatan bangunan suci. Satu diantaranya adalah bangunan suci yang didirikan di Watukura. Pada bulan Śrawana, hari Selasa tanggal 15 paro terang, raja sendiri yang memerintahkan Ramanta di Watukura untuk melaksanakan upacara *sīma* tersebut. Lima bulan kemudian yaitu pada bulan Pauṣa, hari Senin tanggal 10 paro gelap, Desa Panggumulan dijadikan *sīma* untuk bhatara dan bhatari yang berada di Kinawuhan, pembatasan tersebut dilakukan oleh Rakryan di wantil yang bernama Pu Palaka bersama istri dan ketiga anaknya.

Hal yang menarik pada periode ini adalah dijumpainya keterangan bahwa sebuah kabikuan dibangun di atas lahan yang sangat luas hingga mencapai 12,6 km²(Taji 823 Ś). Tampaknya seluruh lahan tersebut digunakan seluruhnya untuk kawasan bangunan suci, karena pemeliharaannya diserahkan kepada penghasilan sawah yang luasnya lebih besar dari luas lahan yang akan dijadikan kabikuan, yaitu 1 *lamwit* atau sekitar 135.000 m² atau 13,5 km²¹¹.

¹¹ 1 *lamwit* sama dengan 20 *tampah*. 1 *tampah* minimal seluas 6.750 m². (Boechari, 1981: 78)

Di awal pemerintahan ini juga telah ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh petugas pajak. Hanya satu kasus kecurangan yang terjadi yaitu pada tahun 823 Śaka. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak dari daerah Kapung yang ingin mencari keuntungan dengan salah menetapkan pajak Desa Luitan. Akan tetapi setelah diukur ulang dengan permohonan yang diajukan para pejabat Desa Luitan, akhirnya masalah tersebut selesai dengan menetapkan pajak kepada Desa Luitan seperti yang seharusnya dan menggagalkan tindakan korupsi petugas pajak.

Penjelasn di atas memberi kesimpulan bahwa pada periode awal pemerintahan, Balitung lebih banyak tampil untuk menganugerahkan sebuah daerah menjadi *sīma*. Aspek agama lebih banyak muncul dalam penetapan status *sīma* di periode ini. Daksa selaku Rakryan Mapatih i Hino muncul satu kali pada saat menyelesaikan kasus penyelewengan pajak yang sempat terjadi pada tahun 823 Śaka di Desa Luitan. Tidak hanya raja dan rakai hino yang selalu dalam menentukan keputusan, pada periode ini seorang *samgat* mengizinkan seorang Kepala Desa di Rongkab untuk memiliki 1 orang *katik* atau budak karena desanya hancur.

4.2 Periode Pertengahan (825-828 Ś)

Beranjak memasuki periode kedua, prasasti yang dikeluarkan secara umum masih merupakan penetapan suatu daerah menjadi *sīma*, namun prasasti yang memberi keterangan tentang masalah penyelewengan pajak lebih banyak ditemukan pada periode pertengahan dibandingkan dengan periode awal. Prasasti *sīma* yang ditemukan juga lebih beragam, tidak hanya berpusat pada masalah sekitar keagamaan saja. Masalah sosial-lingkungan lebih diperhatikan, kemudian aspek politik juga mulai dijumpai pada periode ini.

Pada periode pertengahan ini, kondisi interen kerajaan sepertinya semakin baik dari periode awal. Raja mulai memberi perhatian untuk hal-hal yang dapat membuat eksistensi kerajaan Mataram Kuna semakin berkembang. Dua hal yang menarik pada periode ini adalah aspek ekonomi dan militer yang terlihat sangat diperhatikan oleh raja.

Kerajaan Mataram Kuna merupakan kerajaan agraris dengan bentang geografi yang mencakup gunung dan sungai, hal tersebut terbukti dengan disinggungnya bencana letusan gunung pada prasasti Rukam dan penyeberangan sungai pada prasasti Telang. Dengan daerah-daerah yang dipisahkan oleh batas-batas alam seperti itu, maka orang-orang yang ingin ke desa seberang sungai harus melawati jalan yang sulit atau melalui sarana penyeberangan yang ditarik bayaran. Balitung selaku raja rupanya memperhatikan pula masalah tersebut, karena pada prasasti Telang disebutkan bahwa Desa Telang, Mahe, dan Paparahuan dijadikan *sīma* oleh raja, namun sebagai gantinya mereka harus menyeberangkan orang yang lewat tanpa memungut bayaran.

Orang yang menyeberang pastilah orang yang berkepentingan untuk datang ke daerah-daerah di seberang sungai, sehingga sangat mungkin mayoritas yang menggunakan sarana penyeberangan adalah para pedagang. Kegiatan perdagangan didukung oleh raja dengan membebaskan pajak penyeberangan kepada 3 desa yaitu Desa Telang, Mahe, dan Paparahuan. Para pedagang yang membawa barang dagangan dari satu desa ke desa lain yang terletak berseberangan dapat memakai jasa tersebut untuk dapat menjangkau desa yang terletak di seberang sungai¹². Pembuatan penyeberangan tersebut juga merupakan upaya memajukan pendapatan regional dengan cara mendatangi desa-desa yang sebelumnya mungkin sulit untuk dijangkau.

Sebuah kerajaan membutuhkan ketahanan yang kuat untuk dapat bertahan dari serangan kerajaan-kerajaan lain yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pasukan militer dalam hal ketahanan tersebut tentunya akan berfungsi dengan baik apabila diberi pengayoman dan perhatian dari sang penguasa. Kualitas tersebut ditunjukkan oleh pasukan perang Mataram Kuna pada sebuah perang yang disebutkan dalam prasasti Kubu-Kubu. Prasasti Kubu-Kubu yang dikeluarkan tahun 827 Śaka memuat kisah kemenangan Mataram Kuna dalam peperangan melawan Bantan.

Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas militer kerajaan Mataram Kuna pada masa pemerintahan Balitung cukup baik. Bahkan setelah memenangkan perang, perhatian masih tetap diberikan oleh Balitung dengan cara

¹² Titi Surti Nastiti dalam sebuah seminar yang berjudul „DAS Bengawan Solo, Wonogiri: Hubungannya dengan Prasasti Tēlang (904 M)“.

tanah tegalan milik kedua pejabat yang telah membawa kemenangan tersebut yaitu Rakryān Hujung Dyah Mangarak dan Rakryān Matuha rakai Majawuntan dianugerahi status *sīma*. Aspek politik yang tergambar dalam prasasti Kubu-Kubu tersebut mengindikasikan bahwa pada periode ini kerajaan Mataram Kuna di bawah pemerintahan Balitung mulai ingin meluaskan kekuasaan. Pada kasus yang terdapat pada prasasti Kubu-Kubu, Balitung meluaskan kekuasaannya ke timur. (Soemadio, ed., 1993: 139)

Dilihat dari perdagangan dan militer yang semakin maju, menunjukkan bahwa kerajaan pusat sedang berada dalam kondisi yang terkontrol. Akan tetapi sepertinya tidak demikian di tingkat watèk, karena pada periode ini laporan tentang penyelewengan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak semakin banyak dijumpai, yaitu pada tahun 827 dan 828 Śaka. Apabila pada periode pertama raja yang lebih banyak tampil untuk menganugerahkan prasasti, pada periode kedua ini Daksa yang menjabat sebagai Rakai Hino yang lebih terlihat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Misalnya masalah-masalah pajak yang diadukan oleh penduduk.

4.3 Periode Terakhir

Rakai Watukura Dyah Balitung mungkin tidak merencanakan akan berapa lama ia akan memimpin Mataram Kuna, namun kurun waktu 829 hingga 832 Śaka adalah periode empat tahun terakhir pemerintahannya berdasarkan prasasti yang sejauh ini ditemukan. Pada periode terakhir ini, kehidupan jauh lebih dinamis jika dibandingkan dua periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya prasasti yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian meskipun prasasti *sīma* masih banyak dijumpai pada periode ini, namun aspek-aspek yang terlihat lebih beragam terutama dalam hal keamanan.

Pada periode ini sepertinya raja merasa perlu mengukuhkan legitimasinya sebagai seorang raja dalam bentuk prasasti. Pada tahun 829 Śaka dalam prasasti Mantyasih I, raja menyinggung soal pernikahannya. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Balitung naik tahta akibat pernikahannya dengan seorang putri raja meskipun belum ditemui titik terang dengan siapa raja menikah. Mungkin saja Balitung ingin menegaskan bahwa ia berhak atas tahta dengan menyinggung

pernikahannya pada prasasti Mantyasih I. Satu tahun kemudian pada Prasasti Wanua Tengah III, raja juga menyinggung saat ia dinobatkan menjadi raja dan Daksa sebagai Hino-nya. Prasasti Mantyasih I dan Wanua Tengah III masing-masing dikeluarkan pada tahun 829 dan 830 Śaka. Mengapakah raja mengeluarkan prasasti yang menunjukkan legitimasinya sebagai seorang raja justru pada saat terakhir atau setelah 10 tahun pemerintahannya. (Soemadio, ed., 2009: 168-169)

Hal tersebut memberikan dugaan bahwa kehidupan kerajaan sudah mulai bergejolak dan posisi Balitung sebagai raja sudah mulai terusik yang mungkin disebabkan ancaman kudeta oleh Daksa yang saat itu menjabat sebagai *rakryan i hino*. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa yang berhak atas tahta Mataram Kuna sebenarnya adalah Daksa, karena nama abhiseka Balitung mengandung unsur *dharma* yang artinya ia menjadi raja karena perkawinannya dengan seorang anak raja (Soemadio, ed., 2009: ; Wurjantoro, 2003: 1), seperti yang ia singgung dalam prasasti Mantyasih I.

Berdasarkan salah satu artikelnya, Boechari mengatakan bahwa *rakryan mapatih i hino, i halu, dan i sirikan* merupakan putera-putera raja dari *parameswari* yang membantu jalannya pemerintahan selaku „raja muda“, dan mereka memiliki hak untuk menggantikan posisi raja di tahta kerajaan (Boechari, 1977:7). Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya Daksalah yang berhak atas tahta karena Balitung naik tahta karena perkawinannya dengan seorang puteri raja. Pendapat yang paling ekstrim adalah dugaan bahwa Daksa yang menjabat sebagai putera mahkota ingin melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Balitung. Oleh karena itu raja Balitung mengeluarkan prasasti-prasasti yang berisi silsilah dan pernikahannya yang seolah sebagai sebuah *statement* bahwa ia memang layak duduk di kursi raja.

Akan tetapi pendapat tersebut belum dapat dibuktikan, belum lagi pada periode terakhir ini Daksa lebih banyak muncul untuk menetapkan suatu anugerah, baik itu bersama-sama dengan raja ataupun seorang diri. Hal tersebut justru memberikan asumsi lain, yaitu bahwa raja dan Daksa memiliki hubungan yang harmonis.

Dalam masa pemerintahan Balitung, tercatat tiga prasasti *sīma* yang dikeluarkan oleh raja Balitung bersama dengan Daksa. Selain itu Daksa disebut seorang diri dalam empat prasasti masa Balitung, satu sebagai pemberi anugerah pada prasasti *sīma* dan tiga sebagai pembuat keputusan pada masalah di prasasti „sengketa pajak“. Banyaknya Daksa turut andil dalam pemerintahan membuktikan bahwa raja memberikan kepercayaan yang besar kepadanya. Pada saat sebuah masalah melewati proses hirarki dan pada akhirnya sampai kepada raja, raja mendengarkan pertimbangan-pertimbangan para pejabat kerajaan dan penasihat sebelum raja menjatuhkan putusannya (Soemadio, ed., 2009: 248). Keputusan raja tersebut kemudian diterima oleh putra mahkota dan pangeran kemudian kepada pejabat eksekutif. Oleh karena itu seringkali Daksa disebut sebagai pihak paling tinggi dalam sebuah prasasti, langsung memberi gambaran bahwa keputusan yang akan ia ambil sudah melewati proses restu dari raja terlebih dahulu.

Dinamika kehidupan pada periode terakhir ini lebih bergejolak dengan adanya banyak pertikaian yang terjadi. Masalah penyelewengan yang dilakukan oleh petugas kerajaan masih terjadi. Pertikaian tidak hanya seputar pajak, namun juga ada satu peristiwa yang hingga diselesaikan ke tingkat pengadilan, yaitu prasasti Guntur yang sejauh ini merupakan satu-satunya prasasti *jayapattra* dari periode Balitung. Akan tetapi masalah yang lebih meresahkan justru terjadi di tingkat watak dan wanua karena status *sīma* atas alasan keamanan cukup banyak dikeluarkan pada periode ini. Bahkan di dua tahun terakhir yaitu tahun 831 dan 832 Śaka, peristiwa yang muncul adalah pengaduan penduduk atas keresahan dan ketidakamanan.

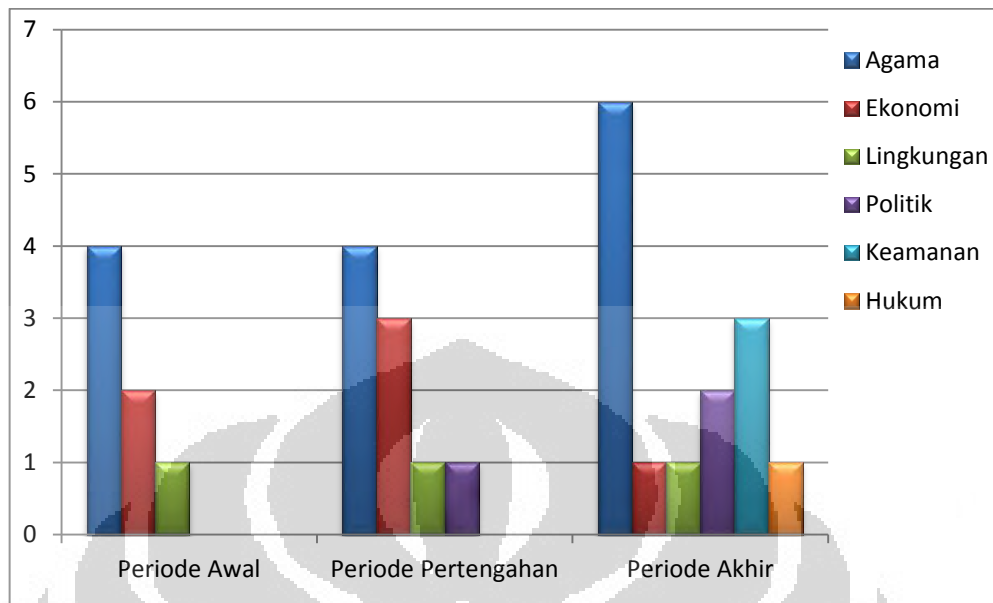
Prasasti terakhir Balitung sejauh ini adalah prasasti Tulangan yang berangka tahun 832 Ś. Di dalam prasasti tersebut pun tidak diperoleh informasi mengenai bagaimanakah pergantian kepemimpinan antara Balitung ke Daksa. Setelah itu tidak ditemukan lagi prasastinya hingga ditemukan prasasti yang dikeluarkan oleh Daksa yang bertarikh Sanjaya yaitu prasasti Taji Gunung (194 Sanjayawarsa) yang sama dengan 832 Śaka. Setelah Daksa menjadi raja, Daksa kembali mengeluarkan prasasti dengan tarikh sanjaya yaitu prasasti Timbanan Wungkal (196 Sanjayawarsa) yang sama dengan 835 Śaka. (Soemadio, ed., 2009: 175)

Gambaran dinamika kehidupan masa pemerintahan Balitung selama 13 tahun yang dibagi ke dalam 3 periode dengan menggunakan data *sambandha* prasasti-prasastinya, menunjukkan perkembangan isu yang berbeda pada setiap periode. Pada periode awal, isu masih seputar masalah keagamaan dan belum banyak dinamika yang terjadi. Secara umum masih dalam keadaan tenteram dan damai. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan suci merupakan alasan prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada periode awal. Oleh karena itu peristiwa yang mungkin dapat dijadikan peristiwa terbesar pada periode awal adalah pembangunan bangunan suci yang sangat besar di atas lahan yang sangat luas yang bernama Kabikuan Dewasabha.

Pada periode pertengahan, peristiwa-peristiwa yang terjadi lebih dinamis. Dapat terlihat bahwa pada masa pertengahan ini tidak setenang periode pertama. Isu meluaskan wilayah kerajaan yang terdapat pada prasasti Kubu-Kubu dapat dikatakan menjadi peristiwa terbesar dalam periode ini. Hal tersebut karena informasi tentang perang hanya terdapat pada prasasti Kubu-Kubu dan prasasti lainnya hanya menyangkut masalah di tingkat wanua dan watèk.

Dinamika yang paling bergejolak terjadi pada periode terakhir. Pada periode ini peristiwa-peristiwa yang dimunculkan oleh prasasti semakin beragam dan menunjukkan ketidakstabilan. Isu mengenai raja yang ingin memperkokoh legitimasinya sebagai penguasa yang berhak atas tahta adalah yang paling banyak karena terdapat pada dua prasasti yang muncul di tahun-tahun terakhir. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan sekaligus spekulasi tentang adanya krisis politik mengenai kelayakan Balitung untuk duduk di kursi penguasa.

Grafik 2: Kecenderungan Peristiwa yang Terjadi di Tiap Periode



Berdasarkan Grafik 2, terlihat perkembangan dinamika yang terjadi pada tiap periode pemerintahan Balitung. Pada periode awal, aspek yang ditemukan masih seputar masalah keagamaan dan ekonomi. Pada periode pertengahan aspek lain mulai muncul yaitu politik. Aspek yang paling banyak dijumpai adalah pada periode terakhir, aspek hukum dan keamanan mulai muncul meskipun aspek agama masih mendominasi segi-segi kehidupan dilihat dari tingginya frekwensi yang terlihat. Selain itu aspek agama konsisten dari periode awal hingga akhir merupakan aspek yang paling banyak terlihat. Hal tersebut berarti aspek agama menjadi alasan yang paling banyak di balik penganugerahan suatu keputusan. Dengan kata lain Balitung merupakan sosok pemimpin yang sangat dan selalu memperhatikan kehidupan religius.

Pada akhirnya, apapun aspek yang melatarbelakangi daerah-daerah di wilayah kerajaan Mataram Kuna ditetapkan menjadi *sīma*, Balitung tetap pada satu kenyataan bahwa ia banyak membebaskan banyak daerah menjadi wilayah otonom. Kenyataan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan perekonomian dan politik kerajaan. Semakin banyak desa yang berstatus *sīma* dengan kata lain membuat pemasukan ke kas kerajaan menjadi berkurang. Kemungkinan paling utama adalah telah kuatnya perekonomian

kerajaan sehingga mampu bertahan meskipun pemasukan hasil pajak yang dipungut dari desa-desa menjadi berkurang akibat pemberian status *sīma* tersebut.

Banyaknya daerah yang dibebaskan dari pembayaran pajak karena hak istimewa *sīma*, membawa dampak dikemudian hari sebagai mundurnya pendapatan keuangan negara. Bagi raja-raja yang memerintah sesudahnya, dimana kondisi keuangan tidak sekuat pada masa Balitung, maka kompensasi dari kemunduran ini adalah munculnya hak kebebasan untuk mempergunakan tanda status seperti memakai jenis kain tertentu atau memakan makanan tertentu sebagai hak-hak istimewa untuk raja dan pejabat-pejabat. (Susanti, 1991: 116)

Akan tetapi rupanya ada pemikiran lain dari banyaknya desa-desa yang dilepaskan menjadi wilayah *sīma*, yaitu pihak kerajaan justru tidak sanggup lagi membiayai sarana-sarana kehidupan. Misalnya biaya untuk pemeliharaan bangunan suci, pembuatan dan pemeliharaan sarana penyeberangan dan lain-lain. Pemerintah pusat sengaja membebaskan desa tersebut dari pembayaran pajak dan menggantinya dengan membebaskan mereka dengan tanggung jawab memelihara suatu sarana kehidupan yang sebelumnya dibiayai oleh pusat.

Kehidupan politik yang berdampak dari banyaknya daerah-daerah yang ditetapkan menjadi daerah *sīma* adalah banyaknya wilayah-wilayah otonom yang mengurus sendiri kehidupan di desanya meskipun tetap mengakui kekuasaan pusat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sambandha sebagai salah satu unsur dalam rangkaian formula prasasti menempati bagian yang sarat dengan peristiwa kesejarahan. Di dalamnya tercermin kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan oleh raja dan pejabat kerajaan, masalah-masalah yang pernah terjadi pada masa lalu, dan meskipun hanya secara samar namun dapat melengkapi bayangan mengenai kehidupan di masa lalu karena ada aspek-aspek yang terungkap dalam *sambandha*. Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian ini.

Pertama, unsur *sambandha* tidak hanya terdapat pada prasasti *sīma* namun juga terdapat pada prasasti jenis *jayapattra* dan parasasti „sengekta pajak“. *Sambandha* pada masing-masing prasasti memiliki perbedaan dalam hal sifat, fungsi dan ragam aspek yang dibawanya. *Sambandha* pada prasasti *sīma* mengantarkan alasan mengapa suatu daerah ditetapkan menjadi sebuah daerah perdikan. *Sambandha* pada prasasti *jayapattra* mengantarkan alasan suatu perkara dibawa ke pengadilan, sedangkan *sambandha* pada prasasti “pengaduan pajak” mengantarkan alasan dibalik permohonan pajak yang dilakukan oleh para pemohon. *Sambandha* atau alasan dibalik penganugerahan keputusan yang paling banyak dijumpai adalah mengenai aspek keagamaan. Kesimpulan pertama tersebut menjawab permasalahan penelitian mengenai ragam *sambandha* dan perbedaan antarjenis *sambandha* yang ada, serta jenis *sambandha* yang paling banyak dijumpai pada masa Balitung.

Kedua, berdasarkan hal-hal yang didapat pada kesimpulan pertama, maka dapat digaris bawahi mengenai definisi *sambandha* yang sering ditemukan dalam prasasti (khususnya pada masa Jawa Kuna) yaitu, *sambandha* merupakan alasan atau latar belakang ditetapkannya suatu keputusan pada masa lalu. Baik itu keputusan mengenai penganugerahan status *sīma* atas sebuah daerah, keputusan mengenai hal pajak, ataupun keputusan mengenai hal peradilan. Keputusan-keputusan tersebut secara kebetulan diperingati dalam sebuah prasasti hingga sampai kepada kita di masa sekarang.

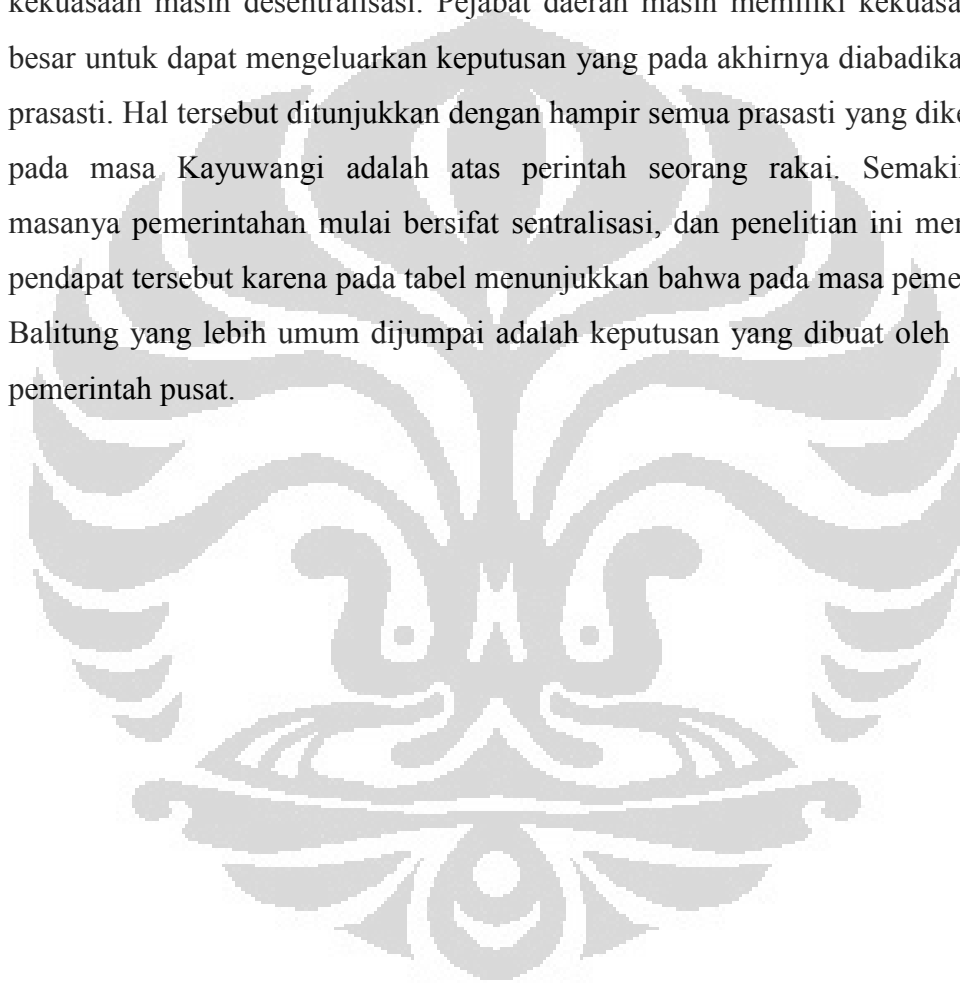
Ketiga, pada periode Balitung, dilihat dari prasasti yang banyak dikeluarkan dan dari *sambandha-sambandha* yang ada, menunjukkan dinamika kehidupan yang semakin lama semakin meningkat. Ada beberapa kemungkinan yang dapat diutarakan disini bahwa bahwa keadaan ekonomi kerajaan telah kuat sehingga mampu memberikan status *sīma* kepada banyak desa. Lebih dari 50 prasasti telah dikeluarkan dalam kurun waktu 13 tahun pemerintahan. Diantara prasasti-prasasti yang dikeluarkannya antara lain prasasti *sīma*, prasasti *jayapattra*, dan prasasti „sengketa pajak“. Prasasti yang paling banyak adalah jenis *sīma*, kemudian tujuh prasasti pajak, dan satu prasasti *jayapattra*. Selama pemerintahannya, kerajaan intens menganugerahkan status *sīma* kepada desa-desa setiap tahunnya dari tahun 822-832 Śaka. Selama kurun waktu tersebut Balitung telah membebaskan sedikitnya 18 desa sebagai daerah perdikan. Akan tetapi banyaknya desa yang ditetapkan menjadi daerah *sīma*, juga memberikan kemungkinan yang sebaliknya. Raja sudah tidak mampu lagi untuk membiayai atau mengurus sarana-sarana yang ada, oleh sebab itu desa-desa tersebut „dibagi-bagikan“ agar kewajiban memelihara sarana-sarana tersebut berpindah kepada orang lain dan pusat tidak lagi terbebani dengan kewajiban tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya status *sīma* yang diberikan dengan alasan untuk pemeliharaan bangunan suci.

Dari semua aspek kehidupan, aspek yang terlihat paling dinamis adalah masalah keamanan, politik, dan hukum. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan situasi kehidupan yang cenderung jauh dari kedamaian. Pada awal pemerintahannya, situasi kehidupan bisa dikatakan terkendali dan aman. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya banyak diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah keamanan, misalnya persengketaan, peperangan, ancaman, serta peradilan. Banyak masalah-masalah yang terjadi di penghujung pemerintahannya, mengindikasikan bahwa pemerintahannya tidak berjalan dengan damai.

Akan tetapi dibalik itu semua, rupanya masalah-masalah sengketa pajak dan hukum yang ada dapat diselesaikan di tingkat watak tanpa harus melibatkan raja, hal itu menunjukkan pada masa Balitung sistem birokrasi yang ada sudah berjalan mapan. Hubungan raja dan Daksa yang menjabat sebagai rakai hino juga

dapat disimpulkan berjalan harmonis, sehingga digantikannya Balitung oleh Daksa bukan merupakan suatu kudeta atau penggulingan secara paksa. Pada periode terakhir, banyak prasasti-prasasti yang dianugerahkan oleh Balitung bersama-sama dengan Daksa. Daksa banyak disebut dalam prasasti „sengketa pajak“, sehingga menumbuhkan kesimpulan bahwa Daksa dipercaya penuh oleh Balitung untuk menyelesaikan sengketa pajak menggantikan dirinya.

Pada masa sebelum Balitung yaitu masa pemerintahan raja Kayuwangi, kekuasaan masih desentralisasi. Pejabat daerah masih memiliki kekuasaan yang besar untuk dapat mengeluarkan keputusan yang pada akhirnya diabadikan dalam prasasti. Hal tersebut ditunjukkan dengan hampir semua prasasti yang dikeluarkan pada masa Kayuwangi adalah atas perintah seorang rakai. Semakin muda masanya pemerintahan mulai bersifat sentralisasi, dan penelitian ini mendukung pendapat tersebut karena pada tabel menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Balitung yang lebih umum dijumpai adalah keputusan yang dibuat oleh raja dan pemerintah pusat.



DAFTAR REFERENSI

- Bakker S.J. J.W.M. *Ilmu Prasasti Indonesia*. Jogjakarta: Djurusan Sedjarah Budaja IKIP Sanata Dharma, 1972.
- Brandes, J. L. A. *Oud Javaansche Oorkonden*, nagelaten transcripties van wiljen Dr. J. L.A. Brandes, uitgegeven door N. J. Krom. VBG LX, 1913.
- Boechari. "Epigrafi dan Sejarah Indonesia." *Majalah Arkeologi* I: 2. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1977: 1-35.
- . "Ulah Para Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuno." *Majalah Arkeologi* IV (1-2). Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1981: 67-87.
- . *Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I*. Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional, 1985/1986.
- . "Perbanditan di Dalam Masyarakat Jawa Kuna." *PIA I*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1986:159-196.
- Budi, Sadiono. *Prasasti Ayam Teas I Tahun 822 Śaka*. Skripsi Sarjana Bidang Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1986: 20-23.
- Casparis, J. G. de. "Sedikit tentang Golongan-Golongan di Dalam Masyarakat Jawa Kuno." *AMERTA* 2. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1985: 54-59.
- Darmosoetopo, Riboet. *Hubungan Tanah Sīma dengan Bangunan Keagamaan di Jawa pada Abad IX –X TU*. Disertasi Bidang Arkeologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.

- Dwiyanto, M. Djoko. "Pengamatan Terhadap Data Kesejarahan dari Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908." *PIA IV*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1986: 92-110.
- Djafar, Hasan. "Historiografi dalam Prasasti." *Majalah Arkeologi VI (1)*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990: 3-49.
- Ekawana, I Gusti Putu. "Sambandha dalam Beberapa Prasasti Bali." *Berkala Arkeologi IV (1)*. Balai Arkeologi Yogyakarta, 1983: 21-36.
- Haryono, Timbul. "Gambaran tentang Upacara Penetapan Sīma." *Majalah Arkeologi III (1-2), Sep-Nov*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1980: 35-54.
- Jones, A. M. B. *Early Tenth Century Java from the Inscriptions*. Dordrecht, Holland: Foris Publication, 1984.
- Naerssen, van. F. H. *Twee Koperen Oorkonden van Balitung in Het Koloniaal Instituut te Amsterdam*. BKI 95, 1937.
- Nastiti, T. S. *Prasasti Panggumulan: Suatu Telaah Masalah Tanah Abad 9 & 10 Masehi*. Skripsi Sarjana Bidang Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Unversitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- , Dyah Wijaya Dewi, dan Richadiana Kartakusuma. *Tiga Prasasti Dari Masa Balitung*. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- ". "Eksistensi Kekuasaan Rakai Watukura Dyah Balitung (898-910 M)." *AMERTA: Berkala Arkeologi 17*. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996: 29-41.
- Sedyawati, Edi. *Pengarcaan Ganeśa Masa Kaḍiri dan Siṅhasāri: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*. Disertasi Bidang Arkeologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soekmono. *Candi Fungsi dan Pengertiannya*. Jakarta: Jendela Pustaka, 2005.

Soemadio, Bambang, ed. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Susanti, Ninie. "Mekanisme Birokrasi di Jaman Raja Balitung (88-910 M)." *PIA IV*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1986: 305-311.

----- . *Raja dan Masalah Perpajakan Suatu Analisis Simbolik Integratif Jaman Raja Balitung (899-910 M)*. Tesis Bidang Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1991.

----- . *Masalah Sekitar Ketentuan Status 'Sima' pada Masyarakat Jawa Kuna*. Laporan Penelitian. Depok: FSUI. DIP OPFSUI. 1992/1993.

Wibowo, A. S. "Sedikit Tentang Tahun Permulaan Pemerintahan Balitung." *MISI II* (2), 1964: 147-154.

Wurjantoro, Edhie. *Struktur Pemerintahan Kerajaan Mataram di Jawa Timur Berdasarkan Data Prasasti Abad Ke-10*. Laporan Penelitian. Depok: Pusat Pengembangan Penelitian FIB UI, 2003.

----- . (belum diterbitkan). *Bahan Perkuliahan Epigrafi*.

Zoetmulder, P. J., dan Robson S. O. *Kamus Jawa Kuno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.